

POLA

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI SADDANG**

TAHUN 2015



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 497/KPTS/M/2015**

TENTANG

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, pengelolaan air dan/atau sumber-sumber air didasarkan pada kesatuan wilayah tata pengairan yang ditetapkan berdasarkan wilayah sungai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air dan tata pengairan yang baik pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat rencana tata pengaturan air dan tata pengairan berupa pola pengelolaan sumber daya air;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Saddang merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi ditetapkan oleh Menteri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SADDANG.

KESATU : Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Saddang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Saddang.

- KETIGA : Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, memuat:
1. tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air;
 2. skenario kondisi wilayah pada masa yang akan datang;
 3. alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario; dan
 4. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.
- KEEMPAT : A. Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- B. Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, dapat ditinjau kembali dan dievaluasi kembali paling singkat 5 (lima) tahun sekali sejak ditetapkan.
- C. Peninjauan kembali dan evaluasi kembali sebagaimana dimaksud pada huruf B, dilakukan melalui konsultasi publik.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Menteri Agraria dan Penataan Ruang;
7. Gubernur Provinsi Riau;
8. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
14. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air; dan
15. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang	6
1.2.1 Maksud	6
1.2.2 Tujuan	6
1.2.3 Sasaran	6
1.3 Isu-isu Strategis	7
1.3.1 Isu Strategis Nasional	7
1.3.2 Isu Stategis Lokal	9

BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI SADDANG	13
2.1 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Air dan Peraturan Lainnya Yang Terkait	13
2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada WS Saddang	17
2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air	17
2.2.2 Kebijakan Pulau Sulawesi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	18
2.2.3 Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	19
2.2.4 Arahana Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	20
2.2.5 Arahana Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2034	25
2.2.6 Arahana Kebijakan Kabupaten dan Kota	30
2.2.7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018	39
2.2.8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan 2008 - 2028	42
2.2.9 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum	42
2.3 Inventarisasi Data	43
2.3.1 Data Umum	43
2.3.2 Data Sumber Daya Air	55
2.3.3 Data Sosial dan Ekonomi	100
2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan	102
2.5 Identifikasi Potensi Yang Dapat Dikembangkan	104

2.5.1	Aspek Konservasi Sumber Daya Air	104
2.5.2	Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air	104
2.5.3	Aspek Pengendalian Daya Rusak Air	106
2.5.4	Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air	106
2.5.5	Aspek Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha Serta Kelembagaan	106
BAB III	ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI SADDANG	108
3.1	Asumsi, Kriteria dan Standar	108
3.2	Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, dan Perubahan Iklim Pada WS Saddang	117
3.3	Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang	135
3.3.1	Konservasi Sumber Daya Air	135
3.3.2	Strategi Pendayagunaan Sumber Daya Air	135
3.3.3	Strategi Pengendalian Daya Rusak Air	136
3.3.4	Strategi Peningkatan Sistem Data dan Informasi bidang Sumber Daya Air	137
3.3.5	Strategi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	138
BAB IV	KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS SADDANG	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama DAS dan Luas DAS Wilayah Sungai Saddang	2
Tabel 2.1	Kawasan Lindung di WS Saddang	22
Tabel 2.2	Rencana Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya di WS Saddang	23
Tabel 2.3	Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung Provinsi Sulawesi Barat di WS Saddang	25
Tabel 2.4	Arahan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat di WS Saddang	26
Tabel 2.5	Luasan Pemanfaatan Ruang Dalam RTRW Sulawesi Selatan dan RTRW Sulawesi Barat	27
Tabel 2.6	Luasan Pemanfaatan Ruang Dalam RTRW Sulawesi Selatan dan RTRW Sulawesi Barat	28
Tabel 2.7	Luas Kabupaten/Kota di WS Saddang	43
Tabel 2.8	Pembagian DAS di WS Saddang	44
Tabel 2.9	Perubahan Penggunaan Lahan di WS Saddang Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011	53
Tabel 2.10	Tipe Iklim di Provinsi Sulawesi Selatan	55
Tabel 2.11	Rekapitulasi Suhu Udara Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012	56
Tabel 2.12	Kelembapan Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012	57
Tabel 2.13	Lama Penyinaran Matahari Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012	58
Tabel 2.14	Kecepatan Angin Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012	59
Tabel 2.15	Stasiun Pengukur Curah Hujan di WS Saddang	61
Tabel 2.16	Curah Hujan Bulanan WS Saddang	64
Tabel 2.17	Hasil pengukuran debit Beberapa Sungai di WS Saddang	66
Tabel 2.18	Potensi Ketersediaan Air WS Saddang	73
Tabel 2.19	Beberapa Prasarana Sumber Daya Air WS Saddang	74
Tabel 2.20	Sebaran Cekungan Air Tanah di WS Saddang	76
Tabel 2.21	Luas Lahan Kritis WS Saddang Tahun 2011	79

Tabel 2.22	Perhitungan Erosi dan Sedimentasi Pada Sungai Besar di WS Saddang	82
Tabel 2.23	Data Kejadian Banjir di WS Saddang Tahun 2005-2009	83
Tabel 2.24	Hasil Analisis Kualitas Air Baku Sungai Saddang	86
Tabel 2.25	Hasil Analisa Kualitas Air Baku Sungai Saddang	87
Tabel 2.26	Hasil Analisa Kualitas Air Baku Sungai Saddang	89
Tabel 2.27	Hasil Analisa Kualitas Air Baku Sungai Saddang	90
Tabel 2.28	Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan	92
Tabel 2.29	Kebutuhan Air Irigasi pada WS Saddang	94
Tabel 2.30	Kebutuhan Air Untuk Peternakan WS Saddang	95
Tabel 2.31	Neraca Air Eksisting WS Saddang	97
Tabel 2.32	Neraca Air Eksisting DAS Saddang	97
Tabel 2.33	Jumlah dan Kepadatan Penduduk WS Saddang Tahun 2012	100
Tabel 2.34	PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di WS Saddang	101
Tabel 3.1	Standar Perhitungan Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan	110
Tabel 3.2	Proyeksi Luas Daerah Irigasi WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033	112
Tabel 3.3	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033	113
Tabel 3.4	Proyeksi Penduduk WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033	114
Tabel 3.5	Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033	115
Tabel 3.6	Proyeksi Kebutuhan Air Industri WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033	116
Tabel 3.7	Kebutuhan Air Peternakan WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033	117
Tabel 3.8	Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Rendah	121
Tabel 3.9	Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Sedang	126
Tabel 3.10	Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Tinggi	131

Tabel 4.1	Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang Skenario Ekonomi Rendah	141
Tabel 4.2	Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang (Skenario Ekonomi Sedang)	160
Tabel 4.3	Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang (Skenario Ekonomi Tinggi)	180

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Sungai Saddang	4
Gambar 1.2	Peta Daerah Aliran Sungai Wilayah Sungai Saddang	5
Gambar 1.3	Peta Isu Strategis Nasional Wilayah Sungai Saddang	11
Gambar 1.4	Peta Isu Strategis Lokal Wilayah Sungai Saddang	12
Gambar 2.1	Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di WS Saddang	29
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administrasi di WS Saddang	46
Gambar 2.3	Peta Ketinggian WS Saddang	48
Gambar 2.4	Peta Geologi WS Saddang	50
Gambar 2.5	Peta Morfologi Permukaan WS Saddang	52
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan WS Saddang Tahun 2011	54
Gambar 2.7	Rekapitulasi Suhu Udara Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2012	56
Gambar 2.8	Rekapitulasi Kelembapan Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2012	57
Gambar 2.9	Rekapitulasi Lama Penyinaran Matahari Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012	59
Gambar 2.10	Rekapitulasi Kecepatan Angin Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012	60
Gambar 2.11	Rekapitulasi Evapotranspirasi Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012	61
Gambar 2.12	Peta Curah Hujan WS Saddang	65
Gambar 2.13	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi : Bendung Benteng)	67
Gambar 2.14	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Mamasa (Lokasi : Sikuku, Sungai Mamasa)	67
Gambar 2.15	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Sungai Mata Allo)	68
Gambar 2.16	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Rantepao Sungai Saddang)	68
Gambar 2.17	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Baraka Sungai Saddang)	69

Gambar 2.18	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Sikuku, Sungai Mamasa)	69
Gambar 2.19	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Masepe, Sungai Saddang)	70
Gambar 2.20	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Mangilu, Sungai Tabo-Tabo)	70
Gambar 2.21	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Bungaeja)	71
Gambar 2.22	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Rantepao, Sungai Saddang)	71
Gambar 2.23	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Buiringire)	72
Gambar 2.24	Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Baraka, Sungai Baraka)	72
Gambar 2.25	Potensi Ketersediaan Air WS Saddang Tahun 2013	74
Gambar 2.26	Grafik Potensi Air Tanah WS Saddang	77
Gambar 2.27	Peta Cekungan Air Tanah di WS Saddang	78
Gambar 2.28	Peta Lahan Kritis WS Saddang Tahun 2011	81
Gambar 2.29	Grafik Neraca Air Eksisting WS Saddang Tahun 2013	98
Gambar 2.30	Grafik Neraca Air Eksisting DAS Saddang Tahun 2013	98
Gambar 2.31	Skema Sistem Sungai Eksisting WS Saddang	99
Gambar 3.1	Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Rendah	122
Gambar 3.2	Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Sedang	127
Gambar 3.3	Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Tinggi	132
Gambar 3.4	Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang Ekonomi Rendah	123
Gambar 3.5	Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang Ekonomi Sedang	128
Gambar 3.6	Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang Ekonomi Tinggi	133
Gambar 3.7	Rencana Skema Sistem WS Saddang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033	134
Gambar 4.1	Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi	201

Gambar 4.2	Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi	202
Gambar 4.3	Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan)	203
Gambar 4.4	Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi	204
Gambar 4.5	Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan)	205
Gambar 4.6	Peta Tematik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi	206
Gambar 4.7	Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Tinggi	207

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, yang merupakan keterpaduan dalam pengelolaan yang diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun secara terkoordinasi diantara instansi terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas.

Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha baik koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Untuk dapat menyusun rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai perlu diketahui sistem pengelolaan sumber daya air yang sedang berjalan saat ini, mencakup aspek-aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, Sistem Informasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut SISDA, dan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.

Di samping melakukan inventarisasi sistem pengelolaan sumber daya air saat ini, juga dilakukan inventarisasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Saddang yang selanjutnya disebut WS Saddang merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi. Letak geografis WS Saddang

berada antara 119° 45' 00" - 122° 45' 08" Bujur Timur dan 0° 50' 00" - 3° 45' 36" Lintang Selatan. WS Saddang mencakup 2 (dua) wilayah administrasi provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 dengan ibukota provinsi Kabupaten Mamuju. Kode WS Saddang sesuai Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai adalah 05.15.A2 – A25, dengan status sebagai Wilayah Sungai Lintas Provinsi. Batas administrasi WS Saddang yaitu :

- Sebelah Utara : WS Kalukku-Karama dan WS Pompengan-Larona
- Sebelah Selatan : WS Jeneberang
- Sebelah Timur : WS Walanae-Cenranae
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Gambaran mengenai WS letak WS Saddang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

WS Saddang memiliki luas sebesar 9.908,09 Km² yang meliputi 24 (dua puluh empat) Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS. Seluruh DAS tersebut bermuara di sepanjang Selat Makassar. DAS dengan luasan terbesar yaitu DAS Saddang, dengan luas sebesar 6.439,20 km², panjang sungai rerata 189,5 km², lebar rerata 80 m, dan terdiri dari 294 anak sungai. Nama dan letak DAS yang terdapat di WS Saddang beserta luasannya, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 berikut ini.

Tabel 1.1 Nama DAS dan Luas DAS Wilayah Sungai Saddang

Kode	Nama DAS	Luas (km ²)	Kode	Nama DAS	LUAS (km ²)
001	Galanggalang	147,38	014	Lampoko	186,04
002	Bungi/Kalobe	224,60	015	Lakepo	101,58
003	Massila/Lemba	104,65	016	Binangae	106,29
004	Saddang	6.439,20	017	Lipukasi	368,35
005	Sibo	119,54	018	Matajang/Bungi	126,99
006	Kariango	418,02	019	Sageri	166,59
007	Agalacange	19,97	020	Limbangan	96,64
008	Jawijawi	48,01	021	Labbakkang	78,23
009	Karajae	105,69	022	Pangkajene	440,06
010	Bojo	33,92	023	Sangkara	352,30
011	Pelapekae	15,87	024	Maronak	53,04
012	Kupa/Barru	17,93		WS. Saddang	9.908,09
013	Jampue	137,20			

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

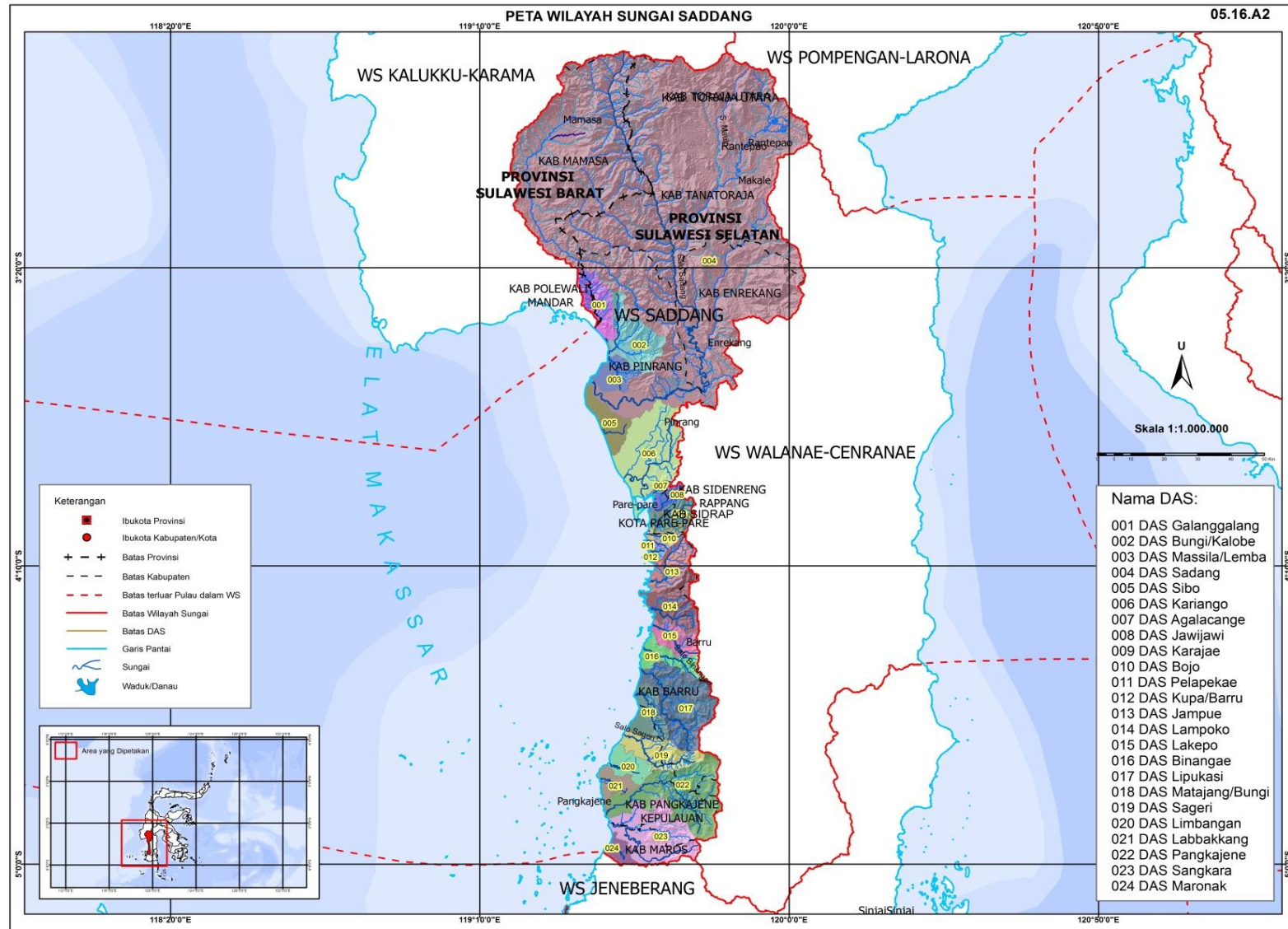
Berdasarkan satuan wilayah administrasi, WS Saddang meliputi 1 (satu) Kota yaitu Kota Pare-Pare dan 10 (sepuluh) Kabupaten, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar.

Potensi air permukaan di WS Saddang yang telah dimanfaatkan yaitu sebesar 3,27 Milyar m³/tahun dari total potensi sebesar 16,53 Milyar m³/tahun. Dalam WS Saddang terdapat Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI yang besar dan strategis, yaitu DI Saddang. DI Saddang terletak pada bagian hilir DAS Saddang dengan luas mencapai 64.999 Ha. Dalam DAS Saddang juga terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru pada bagian hilir Sungai Mamasa dengan kapasitas 2 x 64 MW.



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Gambar 1.1 Peta Wilayah Sungai Saddang



Sumber : Hasil Analisis, 2013

Gambar 1.2 Peta Daerah Aliran Sungai Wilayah Sungai Saddang

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Saddang adalah untuk menyusun kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di WS Saddang.

1.2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang secara umum adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, sedangkan tujuan spesifiknya antara lain :

- a. memenuhi kepentingan dan kebijakan pemerintah daerah Provinsi (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) dan seluruh Kabupaten/Kota dalam WS Saddang (Kota Pare-Pare, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa);
- b. memenuhi kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat sumber daya air di WS Saddang; dan
- c. mengupayakan konservasi sumber daya air (air, sumber air dan daya air), berdaya dan berhasil guna, agar daya rusak air dapat dikendalikan, dikelola secara menyeluruh, terpadu, dalam satu kesatuan sistem tata air WS Saddang, melakukan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan selalu memenuhi fungsi lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras serta menjaga keseimbangan antara ekosistem dan daya dukung lingkungan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang adalah untuk memberikan arahan tentang kebijakan dalam upaya :

- a. konservasi sumber daya air di WS Saddang;
- b. pendayagunaan sumber daya air di WS Saddang dengan memperhatikan kebijakan daerah, termasuk arahan dalam penataan ruang wilayah;
- c. pengendalian daya rusak air di WS Saddang;
- d. pelaksanaan Sistem Informasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut SISDA di WS Saddang; dan
- e. pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air WS Saddang.

Visi, Misi Pengelolaan Sumber daya air di Wilayah Sungai Saddang

Sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, maka Visi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang yaitu:

“Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat di Wilayah Sungai Saddang”

Misi dalam pola pengelolaan sumber daya air WS Saddang adalah :

- a. konservasi sumber daya air yang berkelanjutan di WS Saddang;
- b. pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas di WS Saddang;
- c. pengendalian daya rusak air di WS Saddang;
- d. peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumber daya air di WS Saddang;
- e. peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah di WS Saddang; dan
- f. pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah di WS Saddang.

1.3 Isu-isu Strategis

Mengingat pengelolaan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola, maka pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai perlu dilakukan secara terpadu dan dilaksanakan secara holistik, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sumber daya air di WS Saddang. Pengelolaan sumber daya air di WS Saddang juga turut dipengaruhi oleh isu-isu strategis yang terjadi, baik isu strategis di tingkat global, nasional maupun lokal.

1.3.1 Isu Strategis Nasional

a. Target *Millenium Development Goals* (MDG's) untuk penyediaan air minum

Target *Millenium Development Goals* yang selanjutnya disebut MDG's yang terkait dengan sumber daya air adalah pencapaian pemenuhan air bersih yang masih belum terjangkau secara luas dan menyeluruh di Indonesia. Dukungan semua pihak diperlukan untuk mewujudkan target tersebut, dimana sumber daya air berkontribusi terhadap penyediaan sumber-sumber air yang layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Target capaian MDG's untuk penyediaan air minum pada tahun 2015 tingkat nasional yaitu pelayanan air perpipaan kawasan perkotaan mencakup 69%, populasi. sedangkan di kawasan pedesaan mencakup 54% dari populasi. Target capaian layanan air minum non-perpipaan

yang terlindungan adalah sebesar 25% di kawasan perkotaan dan 26% di kawasan pedesaan.

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, target capaian pelayanan air perpipaan di kawasan perkotaan adalah sebesar 63,38%, sedangkan di kawasan pedesaan adalah sebesar 33,45%. Pemenuhan air bersih pada WS Saddang masih rendah, sehingga untuk mencapai target penyediaan air minum MDG's perlu didukung dengan penyediaan air baku yang dapat dialokasikan dengan pembangunan embung, bendung ataupun waduk yang akan dibangun di wilayah sungai ini.

b. Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefenisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penyediaan air irigasi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang ketahanan pangan tersebut. Saat ini total luas daerah irigasi teknis yang berfungsi di WS Saddang adalah 160.575 ha, sedangkan daerah irigasi tadah hujan memiliki luasan sebesar 11.603 ha.

Produksi beras yang dihasilkan di WS Saddang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis tahun 2013 adalah sebesar $\pm 1.040.505$ ton. WS Saddang berkontribusi sebesar 21% terhadap produksi padi Sulawesi Selatan yang mencapai $\pm 4.941.265$ ton. Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi 20% terhadap produksi nasional, sehingga produksi padi di WS Saddang berkontribusi sebesar 4% terhadap produksi padi nasional. Jika memperhatikan angka peningkatan rata-rata produksi padi Sulawesi Selatan sebesar 6,7% per tahun, maka di masa yang akan datang produksi padi di WS Saddang dapat terus bertambah.

Pembangunan beberapa waduk dan bendung akan memberikan manfaat yang optimal dan nilai keandalan yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan produksi padi yang signifikan di WS Saddang, yang pada akhirnya dapat menunjang penyediaan kebutuhan pangan (khususnya padi) bagi Provinsi Sulawesi Selatan, maupun bagi provinsi lain di tingkat nasional.

c. Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Salah satu fenomena perubahan iklim global adalah peningkatan suhu dan curah hujan tahunan yaitu dengan penurunan jumlah hari hujan sehingga musim hujan menjadi lebih singkat namun intensitas hujan

lebih tinggi. Dampak perubahan iklim terhadap pengelolaan sumber daya air adalah :

- berkurangnya hasil panen
- penurunan kualitas air permukaan dan air tanah
- frekuensi banjir semakin meningkat
- kerusakan infrastruktur sumber daya air dan pengaman pantai
- kegagalan panen akibat kekeringan dan degradasi lahan.

Salah satu upaya penting untuk mengantisipasi perubahan iklim global di WS Saddang antara lain dengan meningkatkan daya dukung DAS kritis melalui program GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelematan Air) di WS Saddang yang bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya program Pengelolaan DAS Terpadu dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Saddang.

d. Ketahanan Energi

Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia diperkirakan mencapai 76.670 Megawatt (MW), sedangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Makro Hidro (PLTM/PLTMH) mencapai 770 MW. Dari potensi tersebut baru sekitar 6% yang telah dikembangkan. Berdasarkan dokumen MP3EI, penambahan kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 90.000 MW dalam kondisi beban puncak. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya menyebabkan kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Berdasarkan data Tahun 2008-2012, ketersediaan daya listrik Provinsi Sulawesi Selatan untuk kapasitas terpasang (eksisting) Tahun 2008 sebesar 479 MW dan Tahun 2012 sebesar 442 MW. Kapasitas yang dibutuhkan tahun 2008 adalah sebesar 960 MW dan meningkat menjadi 1.251 MW pada tahun 2012. Kebutuhan listrik didominasi oleh kebutuhan listrik rumah rumah tangga yang meningkat dari 1.441 GWH pada tahun 2008 menjadi 1.803 GWH pada tahun 2012. Total kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2012 mencapai 3.758 GWH. Kekurangan penyediaan kebutuhan listrik tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan kekurangan energi listrik akan berdampak pada sektor industri dalam mengembangkan kapasitas produksinya.

1.3.2 Isu Strategis Lokal

a. DAS Kritis

Berdasarkan analisis terhadap data lahan kritis, terjadi penurunan kondisi bagian hulu WS Saddang, terutama pada DAS Galanggalang, DAS Bungi, DAS Saddang. Sebesar 24,3 % luas WS Saddang sudah masuk dalam kategori kritis. Hal tersebut merupakan akibat dari kegiatan illegal logging dan perladangan berpindah yang masih banyak terjadi di WS Saddang.

b. Banjir

Penurunan kondisi pada bagian hulu WS Saddang (DAS Galanggalang, DAS Bungi, DAS Saddang), menyebabkan banjir di kawasan hilir di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Sungai Babana dan Sungai Paria merupakan 2 sungai yang saat ini mengalami luapan ketika debit sungai mencapai puncaknya.

c. Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air

Kerusakan bangunan prasarana sumber daya air akibat kurangnya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP), terutama di DI Saddang yang terletak di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Erosi dan Sedimentasi

Tingginya erosi di kawasan hulu DAS Saddang, terutama Sub-DAS Masupu, Sub-DAS Saddang Hulu, Sub-DAS Saddang Mamasa, Sub-DAS Bakar, Sub-DAS Mataallo dan Sub-DAS Baraka menyebabkan sedimentasi yang cukup tinggi pada bangunan prasarana sumber daya air, terutama pada kawasan hilir yang terleyak di bagian muara sungai.

e. Abrasi Pantai

Abrasi pantai menyebabkan terjadinya kerusakan pantai dan bangunan pelindung pantai. Abrasi banyak terdapat di bagian barat pantai Kabupaten Pangkajene Kepulauan hingga Kota Pare-Pare.

Isu strategis nasional dan isu strategis lokal di WS Saddang dibuat peta tematik seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4.

1. MDGs 2015

Belum tercapainya tingkat pelayanan air minum berdasarkan MDG's. Target penyediaan air untuk per-kotaan 69%, baru tercapai 63,38%. Target untuk pe-desaan 54%, baru tercapai 33,45% . Di-sisi lain potensi air permukaan WS Sadang sangat besar, mencapai 16,50 milyar m³.

2. Ketahanan Pangan

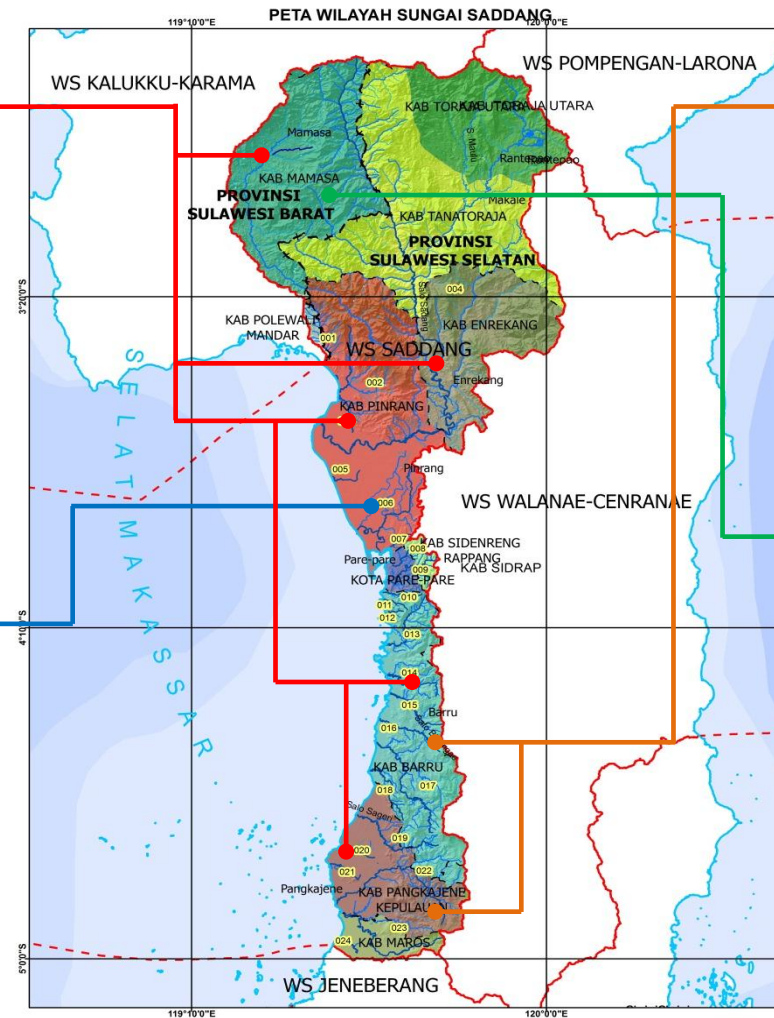
Potensi sawah cukup besar 94.222 Ha, tetapi produksi belum optimal. Masih terdapat sawah tadah hujan seluas 32.560 Ha (32%). Sistem irigasi hanya mengandalkan bendung (*run-off-river*), belum didukung oleh penyediaan air dari waduk.

3. Perubahan Iklim

Terjadinya perubahan cuaca-ekstrem seringkali menimbulkan bencana banjir (3.000 Ha), longsor dan kekeringan di pantai barat WS Saddang (5.000-10.000 Ha).

4. Ketahanan Energi

Pertumbuhan kebutuhan listrik sangat tinggi, rata-rata >10% pertahun. Energi Listrik yang tersedia tahun 2010 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 541 MW, padahal beban puncak mencapai 728 MW. Potensi pembangkit listrik tenaga air pada DAS Saddang mencapai 1.000 MW.



Sumber : Hasil Analisis, 2013

Gambar 1.3 Peta Isu Strategis Nasional Wilayah Sungai Saddang

1. DAS Kritis

Luas lahan kritis 2.480 km² (24,3% dari Luas WS).
Variasi Rasio Q_{max}/Q_{min}: 50.
Degradasi DAS Saddang sangat tinggi akibat kon-versi lahan menjadi kebun, jalan, pemukiman, dll.

2. Banjir

Luas areal rawan banjir 3.000 Ha pada 3 lokasi. Kerugian rata-rata Rp. 2-3 Milyar pertahun. Penangan-an s/d 2010 belum optimal. Masih diperlukan infra-struktur pengendali banjir untuk 2.000 Ha pada 3 lokasi.

3. OP Prasarana SDA

Kinerja prasarana SDA tidak optimal akibat tinggi-nya sedimentasi, sampah, dan minimnya pemeliharaan terutama DI Saddang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng

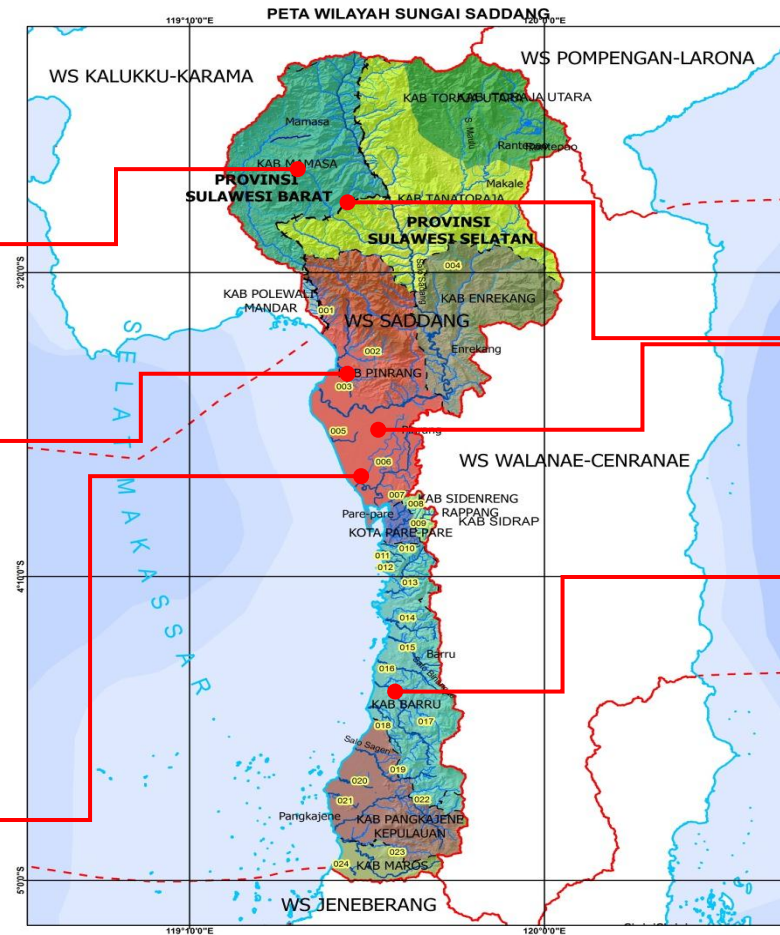
4. Erosi dan Sedimentasi

Erosi tinggi di hulu DAS Saddang mencapai 60,88 ton/ha/th yang menyebabkan masalah sedimentasi, 9,93 ton/ha/th.

Hal tersebut mengakibatkan biaya O & P menjadi tinggi, dan kapasitas saluran irigasi, sungai, waduk mengalami penurunan.

5. Abrasi Pantai

Hutan mangrove banyak mengalami kerusakan yang menyebabkan peningkatan abrasi pantai. Hal tersebut mengancam prasarana umum dan pemukiman di kawasan pantai barat dari Kota Pare-pare hingga Kabupaten Pangkajene Kepulauan.



Sumber : Hasil Analisis, 2013

Gambar 1.4 Peta Isu Strategis Lokal Wilayah Sungai Saddang

BAB II

KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI SADDANG

2.1 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Air dan Peraturan Lainnya Yang Terkait

Beberapa aturan yang terkait dengan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 11) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- 12) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah;
- 13) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 16) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintah;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012;
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

- 32)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
- 33)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Efek Rumah Kaca;
- 34)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
- 35)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 36)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 37)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai;
- 38)Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 39)Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 40)Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air;
- 41)Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
- 42)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 43)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
- 44)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;

- 45)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;
- 46)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
- 47)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
- 48)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 49)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
- 50)Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Air Limbah Domestik;
- 51)Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana;
- 52)Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
- 53)Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;
- 54)Peraturan Daerah Kota Pare-pare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pare-pare Tahun 2011-2031;
- 55)Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032;
- 56)Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Tahun 2012-2032;
- 57)Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2012-2032;
- 58)Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032;
- 59)Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032

- 60) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031
- 61) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030;
- 62) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032;
- 63) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2033; dan
- 64) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2379/X/Tahun 2010 tentang Penetapan Daerah Irigasi Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada WS Saddang

Mengingat pengelolaan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola, maka pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai perlu dilakukan secara terpadu *Integrated Water Resources Management (IWRM)* dan dilaksanakan secara holistik, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sumber daya air di WS Saddang.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan pengelolaan sumber daya air di WS Saddang mengacu pada oleh Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang termuat dalam Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Kebijakan nasional sumber daya air terdiri dari :

1. Kebijakan Umum, terdiri dari :
 - a. peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air;
 - b. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta budaya terkait air;
 - c. peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
2. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus Menerus, terdiri dari :
 - a. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. peningkatan upaya pengawetan air; dan

- c. peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- 3. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. peningkatan upaya penatagunaan sumber daya air;
 - b. peningkatan upaya penyediaan sumber daya air;
 - c. peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumber daya air;
 - d. peningkatan upaya pengembangan sumber daya air; dan
 - e. pengendalian pengusahaan sumber daya air.
- 4. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak, terdiri dari :
 - a. peningkatan upaya pencegahan;
 - b. peningkatan upaya penanggulangan; dan
 - c. peningkatan upaya pemulihan.
- 5. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan;
 - b. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan; dan
 - c. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan.
- 6. Kebijakan Pengembangan Jaringan SISDA Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolaan SISDA;
 - b. pengembangan jejaring SISDA; dan
 - c. pengembangan teknologi informasi.
- 7. Koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air WS Saddang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut TKPSDA WS Saddang.

2.2.2 Kebijakan Pulau Sulawesi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Rencana Tata Ruang Ruang Pulau Sulawesi merupakan perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN di Pulau Sulawesi yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Salah satu strategi perwujudan struktur ruang adalah strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air.

Beberapa kebijakan pengelolaan sumber daya air di WS Saddang yang termuat dalam RTR Pulau Sulawesi antara lain :

1. Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air, yang meliputi:
 - a. mendayagunakan sumber air berbasis pada wilayah sungai yang meliputi sumber air pada wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas provinsi. WS Saddang (Provinsi Sulawesi

Selatan-Provinsi Sulawesi Barat) yang melayani Kawasan Andalan Pare-Pare dan Sekitarnya, dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pangkajene.

- b. merehabilitasi DAS yang termasuk dalam kategori sangat kritis dan kritis; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah Cekungan Air Tanah (CAT) dilakukan pada CAT Kalosi yang berada di Kabupaten Enrekang, CAT Pinrang yang berada di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Soppeng, CAT Barru yang berada di Kabupaten Barru, dan CAT Pangkajene yang berada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Maros.
2. Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air meliputi:
- a. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan Pare-Pare sekitarnya, maupun untuk melayani kebutuhan irigasi bagi kawasan pertanian yang terdapat di WS Saddang. Pembangunan dan pemeliharaan bendungan yang direncanakan meliputi Bendung Torere di Kabupaten Sidenreng Rappang, Embung Datae di Kabupaten Sidenreng Rappang, Bendung Paku di Kabupaten Pinrang, Bendung Salassoe di Kabupaten Barru, Bendung Bonto Baku dan Bendung Jalikko di Kabupaten Enrekang; dan
 - b. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis pada DI untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan dilakukan antara lain di DI Bulutimorang, DI Bila, DI Benteng, DI Saddang, dan DI Matajang.

2.2.3 Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah provinsi agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tercapai. Salah satu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah ialah peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, salah satunya mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai dan daerah irigasi teknis. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan, salah satunya mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya, salah satunya membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.

Rencana struktur ruang Wilayah Provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi dikembangkan untuk mengintegrasikan konektivitas wilayah antar provinsi sekaligus melayani kegiatan dalam skala Provinsi.

Terkait dengan sumber daya air, rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi :

- a. sistem jaringan sumberdaya air nasional meliputi wilayah sungai, DAS, bendungan, DI dan Daerah Rawa (DR);
- b. sistem jaringan sumberdaya air lintas Provinsi meliputi wilayah sungai, dan DAS;
- c. sistem jaringan sumberdaya air provinsi terdiri atas bendung, bendungan, DI dan Instalasi Pengolahan Air (IPA); dan
- d. sistem pengelolaan sumberdaya air.

2.2.4 Arahan Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana pemanfaatan ruang wilayah yang dimaksud dalam dokumen ini mengacu pada arahan pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029. Perlu digaris bawahi bahwa rencana pemanfaatan wilayah ruang yang dimaksud hanya bersifat sebagai arahan pemanfaatan ruang, tidak atau belum dapat dijadikan dasar bagi pemberian izin lokasi. Titik berat rencana diletakkan pada upaya/pembentukan struktur tata ruang agar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mampu berartikulasi secara optimal terhadap kebijaksanaan/kegiatan-kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Arahan yang dimaksud adalah :

- a) arahan pengelolaan kawasan lindung;
- b) arahan pengelolaan kawasan budidaya;
- c) arahan pengembangan kawasan budidaya;
- d) arahan pengembangan kawasan andalan;
- e) arahan pengembangan kawasan penunjang pertahanan;
- f) arahan pengembangan sistem kota-kota;
- g) arahan pengembangan prasarana wilayah; dan
- h) kebijaksanaan tataguna tanah, tataguna air, dan tataguna sumber daya alam lainnya.

Berikut ini adalah arahan penataan ruang dan arahan pengelolaan kawasan WS Saddang

1. Arahan Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan suatu rencana publik yang mewadahi arahan pokok pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka panjang (25 tahun). RTRW Provinsi menjadi pedoman perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah (kabupaten/kota) serta keserasian antar sektor dan pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah atau masyarakat.

Sehubungan perubahan kewenangan pemerintah Provinsi dengan berlakunya otonomi daerah di kabupaten/kota, maka peran dan muatan suatu RTRW Provinsi dalam pengembangan wilayah juga harus menyesuaikan dengan kewenangan pemerintahan Provinsi. RTRWP hanya mengatur pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah kabupaten/kota baik dilihat dari segi fisik maupun fungsinya.

2. Arahan Pengelolaan Kawasan

Arahan pengelolaan kawasan terdiri atas arahan pengelolaan "kawasan lindung", "kawasan budidaya", "kawasan pesisir dan laut".

a) Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Dalam upaya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan diperlukan kawasan lindung yang dikelola secara terarah. Pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang kegiatan yang dimaksud memenuhi persyaratan. Sasaran utama yang ingin dicapai dengan adanya pengelolaan kawasan lindung adalah:

- i. melindungi dan meningkatkan fungsi terhadap konservasi tanah, air, pengendalian iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; dan
- ii. menjaga dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

Untuk mencapai sasaran diatas maka di perlukan suatu upaya yang baik dan terarah. Pengelolaan kawasan lindung di Sulawesi Selatan diarahkan pada :

- i. penetapan dan pemantapan batas serta status kawasan lindung sehingga keberadaannya menjadi lebih jelas, baik secara fisik maupun hukum;

- ii. memanfaatkan kawasan lindung untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, sejauh tidak mengurangi fungsi lindungnya;
- iii. mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pemeliharaan kawasan lindung; dan
- iv. pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi, baik dari segi fisik maupun fungsional dilakukan dibawah koordinasi pemerintah provinsi. Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi.

Berdasarkan lokasi dan luasannya, arahan pengelolaan kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam WS Saddang di tampilkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Kawasan Lindung di WS Saddang

No	Kawasan Lindung Nasional	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung	Maros	42.794,24
2	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang	Pangkep	43.442,51

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (RTRW) Tahun 2009 – 2029.

b) Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan kawasan budidaya adalah suatu pendekatan dalam mengelola kawasan-kawasan di luar kawasan lindung agar pemanfaatannya dilakukan secara optimal, selaras, dan serasi dengan kawasan lindung dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Penetapan suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama tertentu, selain mengacu pada kriteria harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu:

- i. lingkungan buatan, sosial, dan interaksi antar wilayah;
- ii. tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan; dan
- iii. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan

Berdasarkan fungsinya, kawasan budidaya dapat dibagi menjadi kawasan budidaya hutan dan non-hutan. Kawasan budidaya hutan terdiri dari hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan rakyat. Sedangkan kawasan budidaya non-hutan terdiri dari kawasan permukiman, pertanian, dan perkebunan, yang disajikan dalam Tabel 2.2. Suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama tertentu dapat dilakukan kegiatan budidaya yang lainnya sepanjang memenuhi persyaratan pemanfaatan.

Tabel 2.2 Rencana Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya di WS Saddang

No	Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya	Sub Sistem Budidaya	Lokasi di WS Saddang
A	kawasan hutan produksi dan hutan rakyat	hutan produksi dan hutan rakyat	Kabupaten. Pangkep; Kabupaten Barru; Kabupaten Maros; Kota Parepare; Kabupaten Pinrang; Kabupaten Enrekang; Kabupaten Tana Toraja; dan Kabupaten Toraja Utara
B	kawasan pertanian dan perikanan	kawasan potensial budidaya padi sawah	Kabupaten Pangkep; Kabupaten Barru; Kabupaten Maros; Kabupaten Pinrang; Kabupaten Enrekang; dan Kabupaten Toraja Utara
		kawasan potensial budidaya kakao, kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete dan jarak	Kabupaten Pangkep; Kabupaten Barru; Kabupaten Maros; Kabupaten Pinrang; Kabupaten Enrekang; Kabupaten Toraja Utara; dan Kabupaten Tana Toraja
		kawasan potensial peternakan sapi kandang	Kota Pare-Pare; Kabupaten Pangkep; Kabupaten Barru; Kabupaten Maros; Kabupaten Pinrang; Kabupaten Enrekang; Kabupaten Toraja Utara; dan Kabupaten Tana Toraja
C	kawasan pertambangan	potensial tambang logam	tambang kromit di Kabupaten Barru; tambang tembaga di Kabupaten Tana Toraja, dan

No	Sistem Tata Ruang Kawasan Budaya	Sub Sistem Budaya	Lokasi di WS Saddang
			Kabupaten Toraja Utara; tambang timbal di Kabupaten Tana Toraja
		potensi tambang non logam	tambang andesit di Kabupaten Pangkajene Kepulauan; tambang basal di Kabupaten Kab. Pangkajene Kepulauan; tambang batubara : Kabupaten Toraja Utara; tambang batu dan pasir di Kabupaten Pangkajene Kepulauan
		potensi tambang migas	Blok Enrekang di Kabupaten. Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Pinrang
D	kawasan Industri	kawasan industri skala besar	Kabupaten Pangkep; dan Kota Pare-Pare
		kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah	Kabupaten Enrekang; Kabupaten Pinrang; dan Kabupaten Barru
E	kawasan perdagangan	kawasan perdagangan skala besar	Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene
		kawasan perdagangan skala sedang	Kabupaten Barru
F	kawasan pariwisata	Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Nasional (TN) skala nasional	TWA Laut Kepulauan Kapoposang di Kabupaten Pangkajene Kepulauan; TN Bantimurung – Bulusarang di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep
		Taman Wisata Alam (TWA) skala provinsi	TWA Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros; TWA Sungai Saddang di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang
		Taman Wisata Budaya (TWB) skala nasional	Kabupaten Toraja Utara; Kabupaten Tana Toraja.
		Taman Wisata Prasejarah	Taman Wisata Sejarah Leang-Leang di Kabupaten Maros
G	kawasan simpul pelayanan transportasi	kawasan pelabuhan nasional	Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru; dan Pelabuhan Pare-Pare di Kota Pare-Pare
		kawasan pelabuhan provinsi	Awerange di Kabupaten Barru
		kawasan bandar udara pusat penyebaran nasional	Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros
		kawasan bandar udara bukan pusat penyebaran	Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja;
H	Kawasan Permukiman	Kawasan perkotaan	Kota Pare-Pare dan ibukota seluruh kabupaten di WS Saddang
		Kawasan permukiman perdesaan	Seluruh kota dan kabupaten di

No	Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya	Sub Sistem Budidaya	Lokasi di WS Saddang
			WS Saddang

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

2.2.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2034

Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. Rencana pola ruang meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.

a. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Arahan pengembangan kawasan lindung yang termuat dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 disajikan dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung
Provinsi Sulawesi Barat di WS Saddang**

No.	Kawasan Budidaya	Arahan Pemanfaatan
1.	Suaka alam	Kabupaten Polewali Mandar; dan Kabupaten Mamasa
2.	Taman Wisata Alam	TWA Mirring di Kabupaten Polewali Mandar
3.	Perlindungan bawahan	Kabupaten Polewali Mandar; dan Kabupaten Mamasa
4.	Hutan bakau primer	Kabupaten Polewali Mandar

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

b. Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan ruang untuk berbagai macam kegiatan eksploitasi guna kelangsungan hidup manusia dan kepentingan daerah, yang diharapkan mampu memacu perkembangan wilayah kabupaten yang bersangkutan. Kegiatan pada kawasan ini perlu diatur pemanfaatannya oleh karena kondisi fisik masing-masing wilayah/ kawasan berbeda-beda dan memiliki sifat khusus yang berbeda-beda pula. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan alokasi pemanfaatan ruang berbeda antara satu kawasan dengan kawasan yang lainnya. Secara umum, kriteria yang digunakan adalah kegiatan yang ada sekarang, kesesuaian fisik lahan, jumlah masyarakat yang mengusahakan, dan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Arahan pemanfaatan kawasan budidaya di Provinsi Sulawesi Barat yang termasuk dalam WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Arahan Pemanfaatan Kawasan Budidaya
Provinsi Sulawesi Barat di WS Saddang**

No.	Kawasan Budidaya	Arahan Pemanfaatan	Lokasi di WS Saddang
1.	hutan produksi	hutan produksi terbatas	Kabupaten Polewali Mandar
			Kabupaten Mamasa
		hutan produksi biasa	Kabupaten Polewali Mandar
			Kabupaten Mamasa
2.	pertanian	komoditas padi sawah, padi lahan kering	Kabupaten Polewali Mandar
		komoditas kopi rabika, teh, hortikultura dan sayuran	Kabupaten Polewali Mandar
			Kabupaten Mamasa
		komoditas kakao	Kabupaten Polewali Mandar
			Kabupaten Mamasa
		komoditas kelapa	Kabupaten Polewali Mandar
4.	peternakan	hewan besar seperti sapi, dan kerbau	Kabupaten Polewali Mandar
			Kabupaten Mamasa
5.	pertambangan	minyak	Blok South Mandar dan Blok Mandar di Kabupaten Polewali Mandar
		logam	emas di Kabupaten Mamasa
			biji besi di Kabupaten Polewali Mandar
			galena di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa;
			perak di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;
			mangan di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
		galian industri	mika di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
			gypsum di Kabupaten Polewali Mandar
			sulfat di Kabupaten Polewali Mandar
			zeolit di Kabupaten Mamasa;
			pasir kuarsa di Kabupaten Mamasa

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

RTRW Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan dianalisis untuk menjadi acuan dalam analisis pemanfaatan ruang dalam WS Saddang, yang disajikan dalam Gambar 2.1.

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung pada WS Saddang sesuai RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 dan

RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, beting karang, dan kawasan rawan bencana gerakan tanah. Luasan rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung di WS Saddang 3.898,11 Km² atau sekitar 39% dari luas WS Saddang. Kawasan lindung didominasi oleh arahan pemanfaatn lindung yang memiliki luasan mencapai 3.287, 11 km². Rincian luasan masing-masing arahan pemanfaatan ruang kawasan lindung WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Luasan Pemanfaatan Ruang Dalam RTRW Sulawesi Selatan dan RTRW Sulawesi Barat

No	Kawasan	Arahan Pemanfaatan	Luas (Km ²)
1	Kawasan Lindung	Hutan Lindung	3.287,89
2	Kawasan Lindung	Kawasan Suaka Margasatwa	358,86
3	Kawasan Lindung	Taman Nasional	187,00
4	Kawasan Lindung	Beting Karang	39,92
5	Kawasan Lindung	Rentan Gerakan Tanah	24,44
	Total Kawasan Lindung		3.898,11

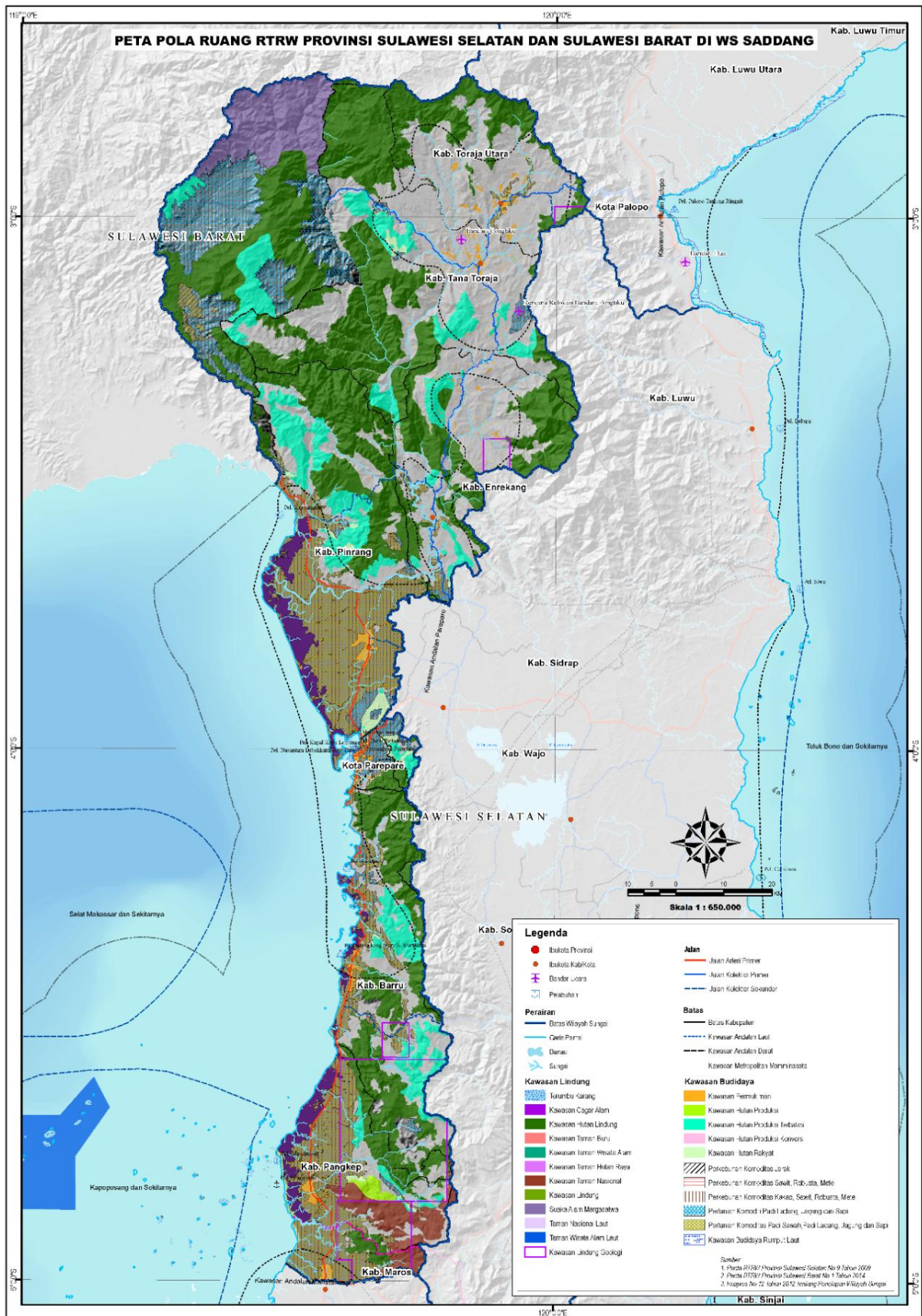
Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 dan RTRW Provinsi Sulawesi Barat, 2014-2034

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya pada WS Saddang berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 dan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2030 terdiri dari kawasan budidaya hutan dan kawasan budidaya non hutan. Total luasan kawasan budidaya adalah sebesar 6.009,98 km² atau 61 % dari luasan WS Saddang. Luasan arahan pemanfaatan budidaya terbesar yaitu perkebunan Komoditas Kakao, Sawit, Robusta, Mete dengan luas 1.025,98 km². Rincian arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya hutan maupun non hutan disajikan dalam Tabel 2.6.

**Tabel 2.6 Luasan Pemanfaatan Ruang Dalam RTRW
Sulawesi Selatan dan RTRW Sulawesi Barat**

No	Kawasan	Arahan Pemanfaatan	Luas km²
1	Kawasan Budidaya Hutan	Hutan Produksi	60,20
2	Kawasan Budidaya Hutan	Hutan Produksi Terbatas	844,66
3	Kawasan Budidaya Hutan	Hutan Rakyat	69,20
4	Kawasan Budidaya Non Hutan	Kawasan Permukiman	176,58
5	Kawasan Budidaya Non Hutan	Pertanian Komoditas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung & Sapi	691,86
6	Kawasan Budidaya Non Hutan	Pertanian Komoditas Padi, Ladang, Jagung & Sapi	372,92
7	Kawasan Budidaya Non Hutan	Perkebunan Komoditi Sawit, Robusta, Mete	18,11
8	Kawasan Budidaya Non Hutan	Perkebunan Komoditas Kakao, Sawit, Robusta, Mete	1.025,98
9	Kawasan Budidaya Non Hutan	Perkebunan Komoditas Jarak	20,69
10	Kawasan Budidaya Non Hutan	Tidak Sesuai Unggulan Provinsi	2.729,78
	Total		6.009,98

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 dan RTRW Provinsi Sulawesi Barat, 2014-2034
Gambar 2.1 Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat di WS Saddang

2.2.6 Arahan Kebijakan Kabupaten dan Kota

1. Kabupaten Maros

- a. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Maros meliputi :
 - 1) pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Maros Makassar Sungguminasa Takalar (Mamminasata);
 - 2) pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki;
 - 3) peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - 4) peningkatan sumber daya hutan produksi;
 - 5) peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
 - 6) pengembangan potensi pertambangan; dan
 - 7) pengembangan potensi industri;
- b. Strategi penataan ruang Kabupaten Maros untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang yaitu :
 - 1) pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional;
 - 2) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
 - 3) mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% dari luas DAS;
 - 4) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kawasan perkotaan;
 - 5) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - 6) melakukan upaya konservasi di kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30%, sempadan sungai dan sempadan pantai; dan
 - 7) mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, abrasi dan tsunami

2. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

- a. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan meliputi :
 - 1) peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - 2) peningkatan sumber daya hutan produksi;
 - 3) peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - 4) pengembangan potensi pertambangan; dan

- 5) pengembangan potensi industri
- b. Strategi penataan ruang Kabupaten Pangkajene Kepulauan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang yaitu :
 - 1) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
 - 2) menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - 3) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, termasuk reboisasi di jalur lingkaran wisata Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan menarik partisipasi wisatawan, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten; dan
 - 4) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan

3. Kabupaten Barru

- a. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Barru meliputi :
 - 1) peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - 2) peningkatan sumber daya hutan produksi;
 - 3) peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - 4) pengembangan potensi pertambangan;
 - 5) pengembangan potensi industri; dan
 - 6) peningkatan kualitas sumber daya manusia
- b. Strategi penataan ruang Kabupaten Barru untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang yaitu :
 - 1) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
 - 2) menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - 3) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten; dan
 - 4) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan

4. Kota Pare-Pare

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Pare-Pare meliputi :
 - 1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung, yang terdiri dari :
 - a) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup.
 - 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, yang terdiri dari :
 - a) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - b) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Strategi penataan ruang Kota Pare-Pare untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang yaitu :
 - 1) menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
 - 2) membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - 3) membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - 4) mengoptimalkan pengembangan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - 5) memulihkan/merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis

5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-Pare

Strategi pengembangan kawasan ekonomi terpadu (KAPET) Pare-Pare yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air terbagi dalam 4 (empat) wilayah Kabupaten dan 1 (satu) kota, yang terdiri dari :

- a. Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Baranti, Kecamatan Panca Riajang, Kecamatan Kulo, Kecamatan Maritengange, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Pitu, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
 - 1) pengembangan dan peningkatan Bendung Torere di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 2) rehabilitasi prasarana penyediaan air baku di Embung Datae di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 3) pengembangan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku di Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
 - 4) peningkatan pelayanan jaringan irigasi DI Kulo, DI Bulutimorang dan DI Bila;

- b. Kabupaten Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lansirang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
 - 1) pengembangan dan peningkatan Bendung Paku;
 - 2) pengembangan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku di Kabupaten Pinrang; dan
 - 3) peningkatan pelayanan jaringan irigasi DI Benteng dan DI Saddang
- c. Kabupaten Barru yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Ballusu dan Kecamatan Mallusetasi dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
 - 1) pengembangan dan peningkatan Bendung Salossae;
 - 2) pengembangan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku di Kabupaen Barru; dan
 - 3) pembangunan jaringan irigasi di DI Matajang
- d. Kabupaten Enrekang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Masalle dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
 - 1) pengembangan dan peningkatan Bendung Bonto Batu dan Bendung Jalikko; dan
 - 2) pengembangan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku di Kabupaen Enrekang
- e. Kota Pare-Pare yang meliputi Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan dan Kecamatan Bacukiki Barat di Kota Pare-Pare, dengan strategi pengembangan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku di Kota Pare-Pare.

6. Kabupaten Pinrang

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Pinrang, meliputi:
 - 1) pengendalian, pemulihan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 2) pengembangan kawasan budidaya secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dalam tatanan kondisi spasial geografis wilayah, termasuk wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil; dan
 - 3) peningkatan pengelolaan kawasan yang berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kabupaten Pinrang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang, meliputi :

- 1) mewujudkan kawasan berfungsi lindung, dalam wilayah kabupaten dengan luas paling sedikit 30% dari luas wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- 2) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan;
- 3) menyelesaikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan serta pemindahan kegiatan pemukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;
- 4) mengembalikan fungsi areal penggunaan lain untuk ditetapkan menjadi hutan rakyat dengan fungsi kawasan konservasi, kawasan lindung dan kawasan produksi;
- 5) mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan; dan
- 6) menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung

7. Kabupaten Sidenreng Rappang

- a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi :
 - 1) penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - 3) pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata;
 - 4) penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
 - 5) pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam; dan
 - 6) pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dengan menetapkan fungsi sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya
- b. Strategi penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendukung kebijakan penataan ruang, yaitu
 - 1) memantapkan fungsi lindung dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan

pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran masyarakat sekitar kawasan;

- 2) mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar dam, *check dam*, embung dan mata air;
- 3) mengembangkan dan pemantapan kawasan pelestarian alam dengan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan diantaranya memelihara habitat dan ekosistem, serta meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama;
- 4) mengembangkan penanganan kawasan rawan bencana alam dengan menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin ribut sebagai kawasan terbangun. Selain itu langkah yang dilakukan adalah dengan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir, pengembangan bangunan yang dapat meminimasi terjadinya bencana, pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa; dan
- 5) upaya mitigasi dengan penyediaan peta kawasan rawan bencana, pemetaan resiko bencana, penyelidikan bencana, diseminasi, penguatan ketahanan masyarakat, penyusunan rencana kontijensi, kegiatan tanggap darurat, dan pasca bencana

8. Kabupaten Enrekang

a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Enrekang, yaitu :

- 1) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang;
- 2) penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- 3) peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- 4) pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; dan
- 5) pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan

penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana

- b. Strategi penataan ruang Kabupaten Enrekang untuk mendukung kebijakan penataan ruang, yaitu :
 - 1) memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - 2) menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - 3) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - 4) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati

9. Kabupaten Tana Toraja

- a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas:
 - 1) pengembangan prasarana wilayah;
 - 2) peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - 3) peningkatan sumber daya hutan produksi;
 - 4) peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - 5) pengembangan potensi pertambangan;
 - 6) pengembangan potensi industri; dan
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia
- b. Strategi penataan ruang Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang, yaitu :
 - 1) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
 - 2) menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - 3) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, termasuk reboisasi di jalur lingkaran wisata Tana Toraja dengan menarik partisipasi para wisatawan, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten;
 - 4) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - 5) mengendalikan kawasan-kawasan permukiman yang ada pada kawasan hutan lindung;
 - 6) mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif;

- 7) mengelolah hutan produksi dengan mengembangkan hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman hasil reboisasi (HTHR); dan
- 8) mengembangkan *agro forestry* (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun

10. Kabupaten Toraja Utara

- a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Toraja Utara, terdiri atas :
 - 1) peningkatan fungsi ekologis kawasan lindung utamanya hutan lindung melalui penanganan lahan kritis;
 - 2) pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem lingkungan, dan mempertahankan fungsi perlindungan kawasan;
 - 3) pelestarian dan peningkatan fungsi warisan budaya lokal dan rona alam sebagai obyek wisata dunia; dan
 - 4) peningkatan sektor unggulan pada kawasan strategis di kabupaten;
- b. Strategi penataan ruang Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang, yaitu:
 - 1) meningkatkan pola penanganan lahan kritis baik yang berada dalam kawasan hutan lindung maupun yang berada dalam hutan produksi melalui kegiatan penghijauan/reboisasi;
 - 2) meningkatkan pengendalian kegiatan dan fungsi pengawasan terhadap areal kawasan lindung;
 - 3) meningkatkan sosialisasi ke masyarakat sekitar akan fungsi penting keberadaan kawasan lindung;
 - 4) meningkatkan upaya diversifikasi lahan usaha baru di daerah pedesaan sehingga bermanfaat pada peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan;
 - 5) mewujudkan kawasan budidaya yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya dan disesuaikan dengan perubahan kondisi lahan;
 - 6) meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pengalihfungsian kawasan lindung; dan
 - 7) meningkatkan pengendalian aktivitas kegiatan budidaya yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem lingkungan

11. Kabupaten Mamasa

- a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Mamasa, terdiri dari:
 - 1) peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - 2) peningkatan sumber daya hutan produksi dan hutan produksi terbatas;
 - 3) pengembangan prasarana wilayah;
 - 4) pengembangan potensi pariwisata;
 - 5) pengembangan potensi pertanian dan tanaman pangan; dan
 - 6) pengembangan potensi budidaya perikanan air tawar

- b. Strategi penataan ruang Kabupaten Masasa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang meliputi :
- 1) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - 2) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;
 - 4) mengembangkan prasarana dan sarana penanggulangan bencana pada lokasi-lokasi yang strategis;
 - 5) mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
 - 6) meningkatkan kualitas lahan pertanian;
 - 7) mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan; dan
 - 8) mengembangkan jenis hasil pertanian dan tanaman pangan

12. Kabupaten Polewali Mandar

- a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Polewali Mandar meliputi :
- 1) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 2) pengembangan kegiatan budidaya secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3) pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;
 - 4) pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis;
 - 5) peningkatan pengelolaan kawasan yang dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Strategi penataan ruang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang, yaitu :
- 1) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten dengan luas paling sedikit 30% dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - 2) melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - 3) mencegah terjadinya hak kepemilikan perorangan terhadap hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi terbatas;
 - 4) meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan, serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;

- 5) menyelesaikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;
- 6) mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan organik untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten, sebagai daerah pendukung lahan pangan berkelanjutan;
- 7) membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- 8) mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor;
- 9) mengembangkan lumbung desa modern;
- 10) mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
- 11) mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor;
- 12) mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
- 13) meningkatkan status fungsi sawah secara bertahap;
- 14) mempertahankan kualitas lingkungan hidup;
- 15) meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian; dan
- 16) mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan

2.2.7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) secara bertahap. Prioritas kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu :

a. Konservasi Sumber Daya Air

- 1) Sasaran: meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Strategi: peningkatan keterlibatan banyak pihak dalam gerakan penangan lahan kritis dan pelestarian sumber daya hayati.
Kebijakan umum: konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

- 2) Sasaran: meningkatnya perlindungan fungsi lingkungan dan penanganan dampak lingkungan hidup.

Strategi: peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup secara beriring dengan penanganan dampak lingkungan hidup.

Kebijakan umum: perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanganan dampak lingkungan.

- 3) Sasaran: terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Strategi: pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara menyeluruh dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru.

Kebijakan umum: penegakan regulasi lahan pangan berkelanjutan.

b. Pendayagunaan Sumber Daya Air

- 1) Sasaran: meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah.

Strategi: penguatan keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumber daya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi.

Kebijakan umum: peningkatan kualitas air dan optimalisasi pemanfaatan air.

- 2) Sasaran: meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Strategi: penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Kebijakan umum: peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

- 3) Sasaran: tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Strategi: kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau kecil.

Kebijakan umum: dukungan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil.

c. Pengendalian Daya Rusak Air

Sasaran: tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana.

Strategi: pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan kebencanaan.

Kebijakan umum: memperkuat Pusat Pengendalian Operasi dan Penyiapan Logistik untuk mendukung penanggulangan bencana di kawasan timur di Indonesia.

d. Sistem Informasi Sumber Daya Air

Sasaran: berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.

Strategi: membangun sinergitas penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Kebijakan umum: kebijakan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) daerah serta kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

e. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

- 1) Sasaran: meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat.

Strategi: peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.

Kebijakan umum: penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

- 2) Sasaran: meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa.

Strategi: penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa.

Kebijakan umum: penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa.

- 3) Sasaran: meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Strategi: penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis kordinasi kelembagaan penyuluhan, level provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan umum: peningkatan kordinasi penyuluhan.

- 4) Sasaran: efektifnya peran Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota, klaster MP3EI, kerjasama regional Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, dan kerjasama internasional.

Strategi: pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, regional, nasional dan global.

Kebijakan umum: pengembangan dukungan BKPRS dan MP3EI serta pengembangan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Luar Negeri.

- 5) Sasaran: meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Strategi: peningkatan kordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan pangan.

Kebijakan umum: Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan.

2.2.8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan 2008 - 2028

Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan aspek pengelolaan sumber daya air, yaitu :

1. Menjadikan wilayah Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan

Sasaran yang diharapkan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan per-kapita dan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, serta terwujudnya kemitraan dan sinergitas pembangunan ekonomi dan sosial antara Kabupaten/Kota sehingga masing-masing dapat membangun sesuai keunggulan lokal yang mereka miliki.

2. Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri, maju dalam memperkuat ketahanan nasional

Sasaran yang diharapkan pada kebijakan di bidang ini adalah tercapainya pembangunan sumber daya ekonomi yang terpadu dan berkelanjutan di wilayah pesisir, laut dan kepulauan yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketahanan nasional.

2.2.9 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka pengembangan wilayah, maka rencana pembangunan/pengembangan infrastruktur sumber daya air harus terpadu dan searah dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, yang merupakan matra spasial dari kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini berarti, arahan lokasi dan pembangunan/pengembangan sistem jaringan infrastuktur sumber daya air harus sesuai dengan struktur ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Selanjutnya, dalam rangka integrasi dengan rencana pembangunan/pengembangan sektor-sektor lain, maka pembangunan/pengembangan infrastruktur sumber daya air harus mendukung sektor-sektor lain, dengan strategi seperti dalam uraian berikut :

- 1) Strategi pembangunan/pengembangan infrastruktur sumber daya air harus dilakukan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan mengacu RTRW (nasional, provinsi, kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang);

- 2) Strategi pembangunan/pengembangan infrastruktur sumber daya air harus dilakukan sejalan dengan pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah untuk peningkatan sektor-sektor strategis dan pengembangan kawasan cepat tumbuh;
- 3) Strategi pembangunan/pengembangan infrastruktur sumber daya air harus dilakukan dalam rangka ikut mengembangkan sentra pendukung ketahanan pangan guna pengembangan potensi pertanian skala besar, dan pengembangan kawasan agropolitan;
- 4) Strategi pembangunan/pengembangan jaringan infrastruktur sumber daya air harus dikaitkan dengan upaya mendorong kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dalam suatu kesatuan wilayah sungai; dan
- 5) Strategi konservasi sumber daya air untuk menjaga kelestarian sumber daya air dipadukan dengan keberadaan kawasan lindung dan hutan konservasi. Pengaturan fungsi pengendalian daya rusak air diarahkan pada kawasan lindung setempat antara lain, sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah rawan bencana.

2.3 Inventarisasi Data

Inventarisasi data ini merupakan salah satu pangkalan data dibidang sumber daya air yang terseleksi dan tervalidasi sehingga dihasilkan data-data yang faktual tentang data dari lembaga/institusi terkait, data sumber daya air di WS Saddang maupun data tentang kebijakan dibidang sumber daya air.

2.3.1 Data Umum

1. Lokasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, WS Saddang merupakan wilayah sungai lintas provinsi, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Luas WS Saddang adalah sekitar 9.908,09 km², yang terbagi seluas 8.292,30 km² atau 83,69% di Provinsi Sulawesi Selatan dan seluas 1.615,79 km² atau 16,31% di Provinsi Sulawesi Barat.

Luas dan presentase kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat yang masuk dalam WS Saddang dapat dilihat pada Tabel 2.7. Gambaran wilayah administrasi kabupaten/kota yang terdapat dalam WS Saddang disajikan dalam Gambar 2.2.

Tabel 2.7 Luas Kabupaten/Kota di WS Saddang

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Kabupaten Dalam WS (Km ²)	Prosentase Luas Kabupaten dalam WS (%)
I	Prov. Sulawesi Selatan	8.292,30	83,69
1	Kab. Maros	240,06	2,42

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Luas Kabupaten Dalam WS (Km ²)	Prosentase Luas Kabupaten dalam WS (%)
2	Kab. Pangkajene & Kep	809,94	8,17
3	Kab. Barru	1.227,88	12,39
4	Kota Pare-Pare	88,27	0,89
5	Kab. Pinrang	1.787,00	18,04
6	Kab. Sidenreng Rappang	72,48	0,73
7	Kab. Enrekang	1.120,41	11,31
8	Kab. Tana Toraja	1.965,58	19,84
9	Kab. Toraja Utara	980,67	9,90
II	Prov. Sulawesi Barat	1.615,79	16,31
10	Kab. Mamasa	1.571,68	15,86
11	Kab. Polewali Mandar	44,11	0,45
	WS SADDANG	9.908,09	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Pembagian wilayah administrasi masing-masing DAS yang terdapat dalam WS dapat dilihat dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Pembagian DAS di WS Saddang

Kode	Nama DAS	Luas (Km ²)	Kabupaten/Kota
001	Galanggalang	147,38	Polewali Mandar, Pinrang
002	Bungi/Kalobe	224,60	Pinrang
003	Massila/Lemba	104,65	Pinrang
004	Saddang	6.439,20	Mamasa, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang
005	Sibo	119,54	Pinrang
006	Kariango	418,02	Pinrang
007	Agalacange	19,97	Pinrang
008	Jawijawi	48,01	Sidrap, Pare-Pare
009	Karajae	105,69	Sidrap, Pare-Pare
010	Bojo	33,92	Barru
011	Pelapekae	15,87	Barru
012	Kupa/Barru	17,93	Barru
013	Jampue	137,20	Barru
014	Lampoko	186,04	Barru
015	Lakepo	101,58	Barru
016	Binangae	106,29	Barru
017	Lipukasi	368,35	Barru
018	Matajang/Bungi	126,98	Barru, Pangkep

Kode	Nama DAS	Luas (Km²)	Kabupaten/Kota
019	Sageri	166,59	Barru, Pangkep
020	Limbangan	96,64	Pangkep
021	Labbakkang	78,23	Pangkep
022	Pangkajene	440,06	Barru, Pangkep
023	Sangkara	352,30	Pangkep, Maros
024	Maronak	53,04	Maros
	WS Saddang	9.908,09	

Sumber : Hasil Analisis, 2014

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi di WS Saddang di bagian utara terdiri dari pegunungan berlereng curam dengan ketinggian berkisar 800 – 2.500 m, dan kawasan karst di Kabupaten Tana Toraja. Topografi bagian selatan terdiri dari perbukitan dengan ketinggian rata-rata 1.000 m, sedangkan bagian barat sepanjang WS Saddang didominasi oleh dataran pantai. Sebaran topografi pada WS Saddang disajikan pada Gambar 2.3.

Adapun kondisi WS Saddang berdasarkan ketinggian lahan dapat dikelompokkan atas :

a. ketinggian < 7 m

Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar hingga landai. Luasannya mencapai 726,74 km², dan sebagian besar terletak di kawasan pesisir bagian barat. Wilayah yang memiliki kondisi topografi ini adalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kota Pare-Pare

b. ketinggian 7-500 m

Wilayah ini memiliki permukaan yang landai hingga bergelombang, dengan luasan mencapai 5.322,7 km², dan merupakan elevasi yang dominan di WS Saddang. Kelas elevasi ini tersebar dari selatan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Enrekang.

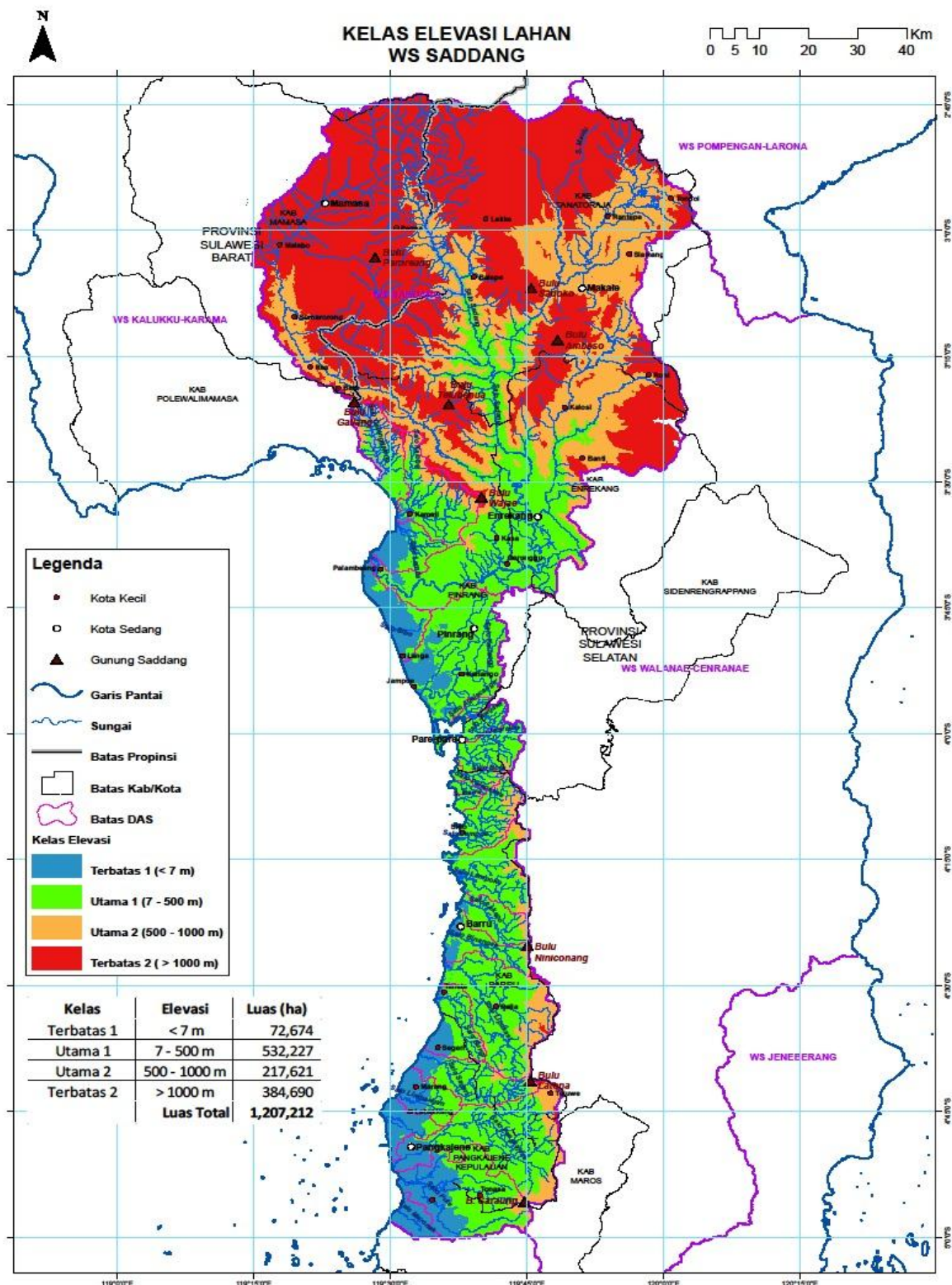
c. ketinggian 500–1000 m

Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang hingga curam, dengan luasan mencapai 2.276,21 km². Sebarannya banyak terdapat di bagian utara di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara, dan selatan-timur di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

d. ketinggian > 1000 m

Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung dengan luasan mencapai 3.846,90 km². Umumnya terdapat di kawasan pegunungan dan perbukitan yang terdapat di bagian utara di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang.

Gambaran terkait ketinggian permukaan WS Saddang disajikan dalam Gambar 2.3.



Sumber : Hasil Analisis SRTM, Tahun 2013

Gambar 2.3 Peta Ketinggian WS Saddang

3. Kondisi Geologi

Struktur geologi batuan di WS Saddang memiliki karakteristik yang kompleks. Hal tersebut dicirikan dengan adanya jenis satuan batuan

yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Formasi-formasi geologi yang terdapat di WS Saddang terdiri dari :

a. vulkanik tersier

Sebaran formasi volkantercier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi.

b. batuan volkan kwarter

Formasi batuan ini terdapat di sekitar Gunung Karua (Tana Toraja)

c. kapur kerang

Kapur kerang terdapat di sebelah memanjang antara Enrekang sampai Rantepao Toraja Utara, bagian utara Kota Pare-pare, dan bagian barat Pulau Selayar.

d. alluvium kwarter

Alluvium terdiri dari endapan laut dan sungai yang dapat dijumpai di dataran sepanjang lembah sungai antara Sungai Saddang dan Danau Tempe, Takalar – Sumpang Binange (Barru), di selatan Parepare, di Rantepao (Toraja Utara) dan Camba (Maros). Dataran Camba merupakan depresi yang dikelilingi formasi eruptif yang terdiri dari endapan liat.

e. sekis hablur

Formasi sekis hablur merupakan formasi geologi tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Formasi ini ditemukan di beberapa tempat seperti di bagian barat Sabbang (Luwu Utara), , di sebelah tenggara Barru dan di Bukit Tanjung Kerambu di Kabupaten Pangkep.

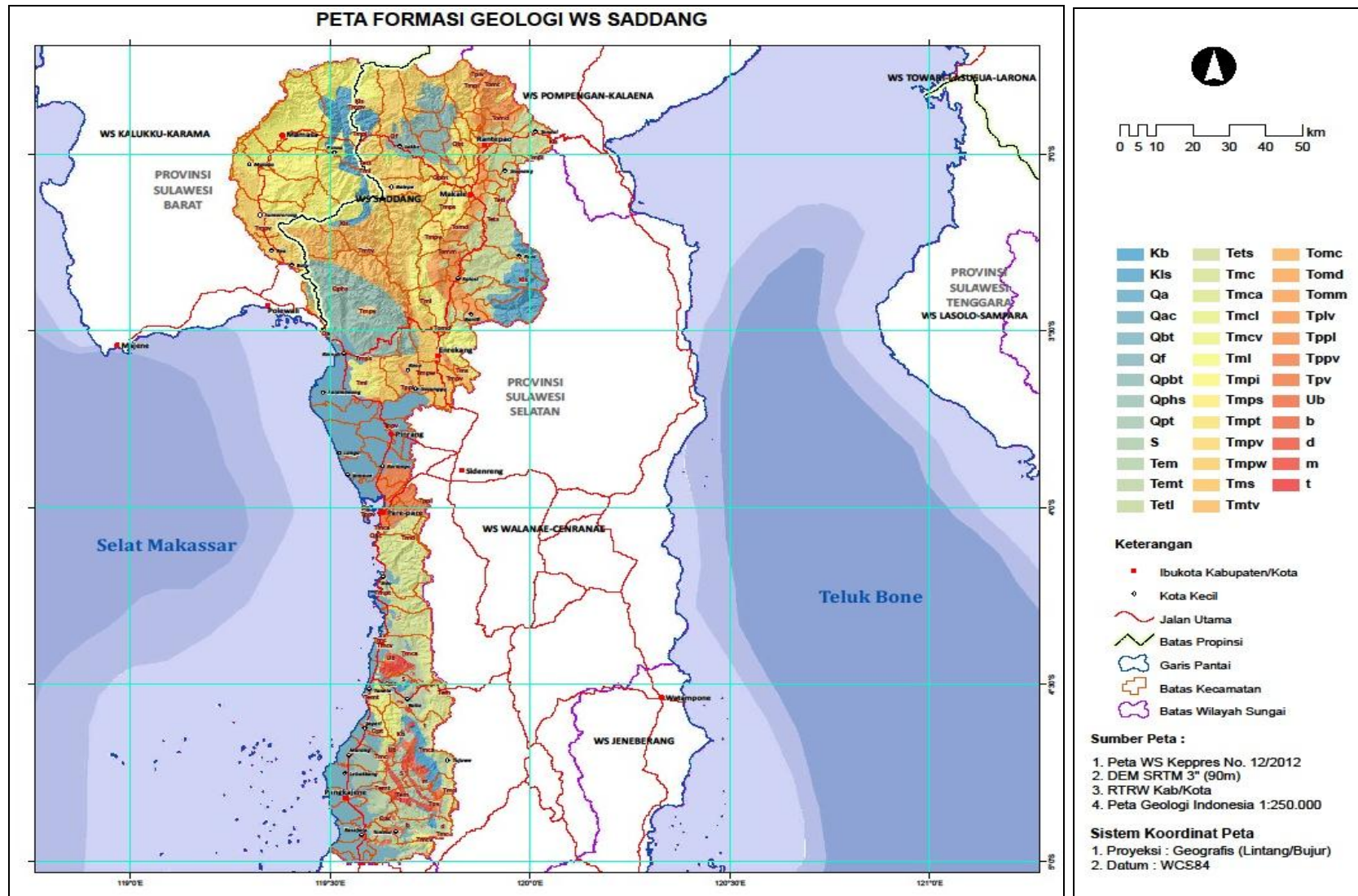
f. batuan sedimen mesozoikum

Formasi ini terdapat berdampingan dengan sekis hablur, terdapat antara lain di Kabupaten Tana Toraja (Pegunungan Kambung dan di sebelah barat Masamba). Batuan terdiri dari serpih, napal, batu tulis, batu pasir, konglomerat yang umumnya berwarna merah, ungu, biru, dan hijau.

g. batuan sediment paleogen

Tersebar di bagian selatan WS Saddang, yaitu di bagian timur Pangkajene sampai di timur Maros.

Sebaran kondisi geologi batuan WS Saddang disajikan dalam Gambar 2.4

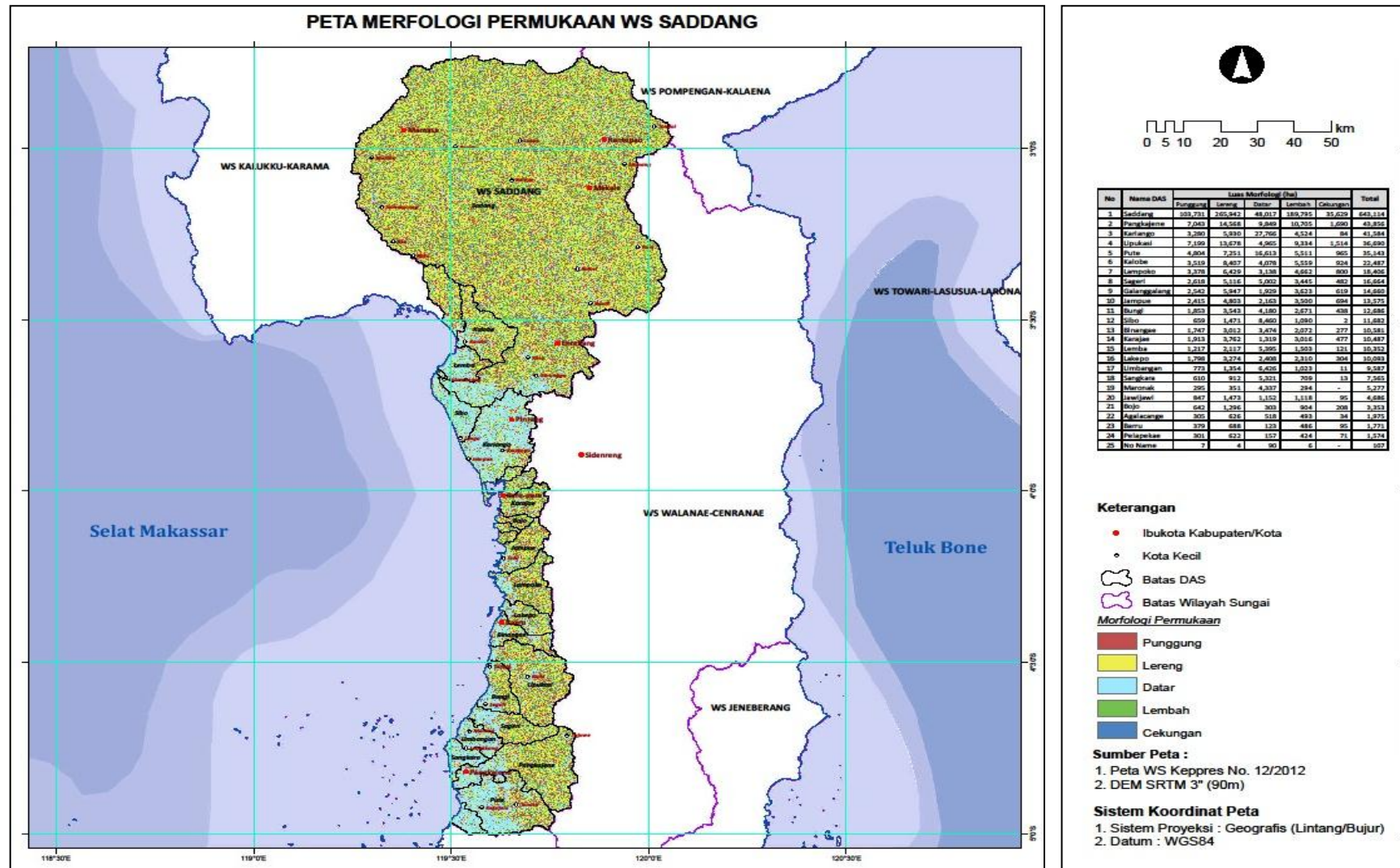


Sumber : Peta Geologi Indonesia Skala 1 : 250.000

Gambar 2.4 Peta Geologi WS Saddang

4. Kondisi Fisiografi

Morfologi permukaan WS Saddang dapat dikelompokkan menjadi 3 satuan morfologi yaitu punggung gunung, lereng, lembah, cekungan dan dataran rendah. Relief permukaan yang kasar merupakan kombinasi dari gunung, lereng, lembah dan cekungan. Relief tersebut mendominasi WS Saddang di bagian utara dan selatan-bagian timur. Relief yang relatif landai dan datar terdapat di kawasan pesisir di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Pinrang, dan Kota Pare-Pare. Sebaran morfologi permukaan WS Saddang dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber : Analisis SRTM 90m, Tahun 2013

Gambar 2.5 Peta Morfologi Permukaan WS Saddang

5. Penggunaan Lahan

Hasil analisis peta penggunaan lahan Tahun 2011 menunjukkan sebagian besar penggunaan lahan di WS Saddang didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak, dengan luasan mencapai 3.795,83 km², atau 38,31% dari total luas WS Saddang. Penggunaan lahan berikutnya yang memiliki luasan cukup besar adalah hutan lahan kering sekunder (seluas 1.708,79 km²/17,25%), semak/belukar (seluas 1.648,20 km²/ 16,63%) dan sawah (seluas 1.169,20 km²/11,80%).

Berdasarkan analisis perubahan penggunaan lahan Tahun 2000 hingga Tahun 2011, terjadi pengurangan luasan hutan lahan kering primer sebesar 154,29 km². Penambahan terjadi pada luasan semak/belukar sebesar 155,68 km². Perubahan hutan menjadi lahan terbuka / belukar tersebut meningkatkan potensi erosi dan longsor lahan di kawasan hulu, dan sedimentasi di kawasan hilir DAS. Luasan sawah yang cenderung tidak berubah banyak selama 11 tahun menunjukkan pertanian masih bertahan menjadi sektor andalan di Provinsi Sulawesi Selatan kedepannya.

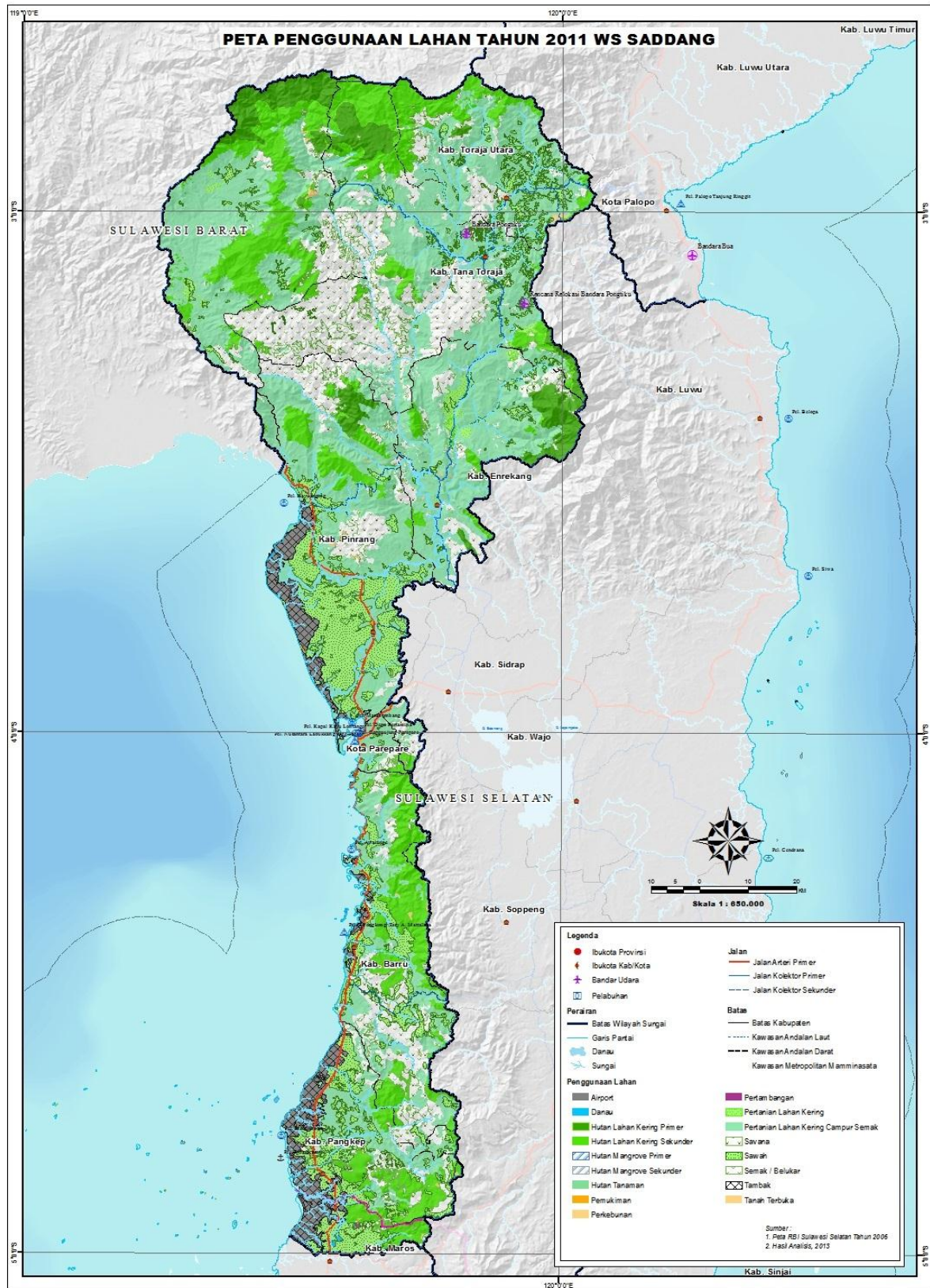
Data perubahan penggunaan lahan di WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Perubahan Penggunaan Lahan di WS Saddang Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011

Penggunaan Lahan	Tahun 2000		Tahun 2011		Perubahan
	Km ²	%	Km ²	%	Km
Bandara	1,09	0,0	1,09	0,01	0,00
Danau	50,39	0,5	50,41	0,51	0,02
Hutan Lahan Kering Primer	630,94	6,4	476,65	4,81	-154,29
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.664,82	16,8	1.708,79	17,25	43,97
Hutan Mangrove Primer	0,97	0,0	0,97	0,01	0,00
Hutan Mangrove Sekunder	1,15	0,0	1,15	0,01	0,00
Hutan Tanaman	17,55	0,2	16,49	0,17	-1,06
Pemukiman	33,92	0,3	33,92	0,34	0,00
Perkebunan	4,75	0,0	4,75	0,05	0,00
Pertambangan	0,60	0,0	0,60	0,01	0,00
Pertanian Lahan Kering	79,18	0,8	79,53	0,80	0,35
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3.833,77	38,7	3.795,83	38,31	-37,94
Savana	544,63	5,5	536,35	5,41	-8,28
Sawah	1.169,29	11,8	1.169,20	11,80	-0,08
Semak / Belukar	1.492,34	15,1	1.648,02	16,63	155,68
Tambak	357,81	3,6	358,33	3,62	0,52
Tanah Terbuka	24,89	0,3	26,00	0,26	1,12
Total	9.908,09	100	9.908,09	100	-

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Peta sebaran penggunaan lahan Tahun 2011 di WS Saddang dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan WS Saddang Tahun 2011

2.3.2 Data Sumber Daya Air

1. Iklim

Secara umum kondisi iklim di WS Saddang merupakan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan dan angin musim timur, sehingga curah hujan cukup tinggi yang merata setiap tahunnya dan volume curah hujan berkisar antara 1.000 - 2.500 milimeter.

Tipe iklim di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Tipe Iklim di Provinsi Sulawesi Selatan

Zona	Bulan Basah > 200 mm	Bulan Basah < 100mm	Sebaran
A	10-12 bulan	0-2 bulan	Kabupaten Enrekang
B1	7-9 bulan	0-1 bulan	Kabupaten Tana Toraja
C1, C2, C3	5-6 bulan	0-6 bulan	Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Enrekang, Kota Pare-Pare.
D1, D2, D3	3-4 bulan	0-6 bulan	Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan,
E1, E2, E3, E4	0-2 bulan	0-6 bulan	Kabupaten Maros

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2011

a. Suhu Udara

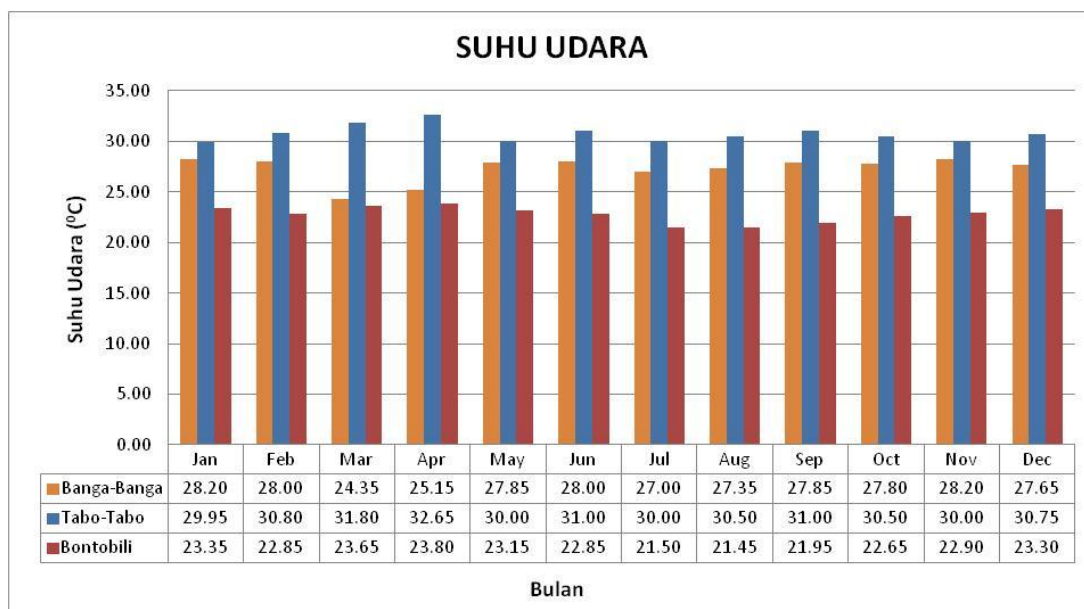
Suhu rerata bulanan pada berdasarkan hasil pengukuran di 3 stasiun meteorologi menunjukkan nilai yang bervariasi, yaitu 29,3°C pada Stasiun Banga-Banga, 34,7°C pada Stasiun Tabo-Tabo, dan 23,6°C pada stasiun Bontobili. Fluktuasi suhu udara di stasiun Banga-Banga relatif kecil, yaitu suhu terendah 19,7°C pada bulan Maret dan suhu tertinggi 29,7°C pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, dan November. Sedangkan di Stasiun Tabo-Tabo suhu udara terendah berkisar 23,0°C pada bulan Mei dan suhu udara tertinggi 37,0°C pada bulan September. Hasil pengukuran di Stasiun Bontobili menunjukkan suhu udara terendah 20,2 °C pada bulan Juli dan suhu udara tertinggi 24.6°C pada bulan Maret.

Data rekapitulasi hasil pengamatan suhu udara bulanan dan rerata di Stasiun Banga-Banga, Stasiun Tabo-Tabo dan Stasiun Bontobili disajikan dalam Tabel 2.11 dan Gambar 2.7 ditampilkan grafik rekapitulasi suhu udara bulanan dan rata-rata tahunan.

Tabel 2.11 Rekapitulasi Suhu Udara Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012

Bulan	Stasiun Banga-Banga		Stasiun Tabo-Tabo		Stasiun Bontobili	
	Suhu Min (°C)	Suhu Maks (°C)	Suhu Min (°C)	Suhu Maks (°C)	Suhu Min (°C)	Suhu Maks (°C)
Januari	26,7	29,7	28,7	31,2	22,3	24,4
Februari	26,3	29,7	29,2	32,4	21,8	23,9
Maret	19,7	29,0	30,6	33,0	22,7	24,6
April	21,0	29,3	31,2	34,1	23,5	24,1
Mei	26,0	29,7	23,0	37,0	22,3	24,0
Juni	26,3	29,7	26,0	36,0	21,7	24,0
Juli	25,7	28,3	26,0	34,0	20,2	22,8
Agustus	25,7	29,0	26,0	35,0	20,8	22,1
September	26,7	29,0	25,0	37,0	21,8	22,1
Oktober	26,3	29,3	25,0	36,0	22,3	23,0
November	26,7	29,7	25,0	35,0	21,7	24,1
Desember	26,3	29,0	26,0	35,5	22,4	24,2
Rata-rata	25,3	29,3	26,8	34,7	22,0	23,6

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013



Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Gambar 2.7 Rekapitulasi Suhu Udara Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2012

b. Kelembapan Relatif

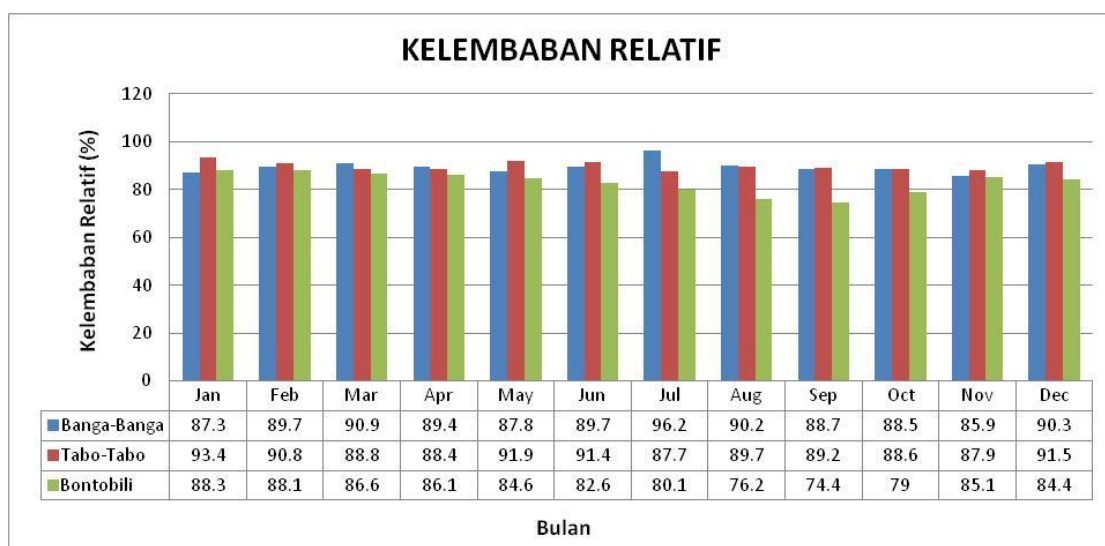
Kelembapan relatif rerata berdasarkan hasil pengukuran di 3 (tiga) stasiun meteorologi menunjukkan nilai yang bervariasi, yaitu 89,5% pada Stasiun Banga-Banga, 89,9% pada Stasiun Tabo-Tabo, dan 82,9% pada Stasiun Bontobili. Kelembapan minimum dan maksimum di Stasiun Banga-Banga adalah 85,9% dan 96,2% yang

terjadi pada bulan November dan Juli. Sedangkan kelembaban relatif di Stasiun Tabo-Tabo dengan kelembaban minimum 87,7% pada bulan Juli dan kelembaban maksimum 93,4% pada bulan Januari. Kelembaban relatif di Stasiun Bontobili dengan kelembaban minimum 74,4% pada bulan September dan kelembaban maksimum 88,3% pada bulan Januari. Data rekapitulasi hasil pengamatan kelembapan bulanan dan rerata di Stasiun Banga-Banga, Stasiun Tabo-Tabo dan Stasiun Bontobili disajikan dalam Tabel 2.10 dan Gambar 2.8 adalah grafik kelembapan bulan dan rata-rata tahunan.

Tabel 2.12 Kelembapan Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012

Bulan	Stasiun Banga-Banga (%)	Stasiun Tabo-Tabo (%)	Stasiun Bontobili (%)
Januari	87,3	93,4	88,3
Februari	89,7	90,8	88,1
Maret	90,9	88,8	86,6
April	89,4	88,4	86,1
Mei	87,8	91,9	84,6
Juni	89,7	91,4	82,6
Juli	96,2	87,7	80,1
Agustus	90,2	89,7	76,2
September	88,7	89,2	74,4
Oktober	88,5	88,6	79
November	85,9	87,9	85,1
Desember	90,3	91,5	84,4
Rata-rata	89,5	89,9	82,9

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013



Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Gambar 2.8 Rekapitulasi Kelembapan Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2012

c. Lama Penyinaran Matahari

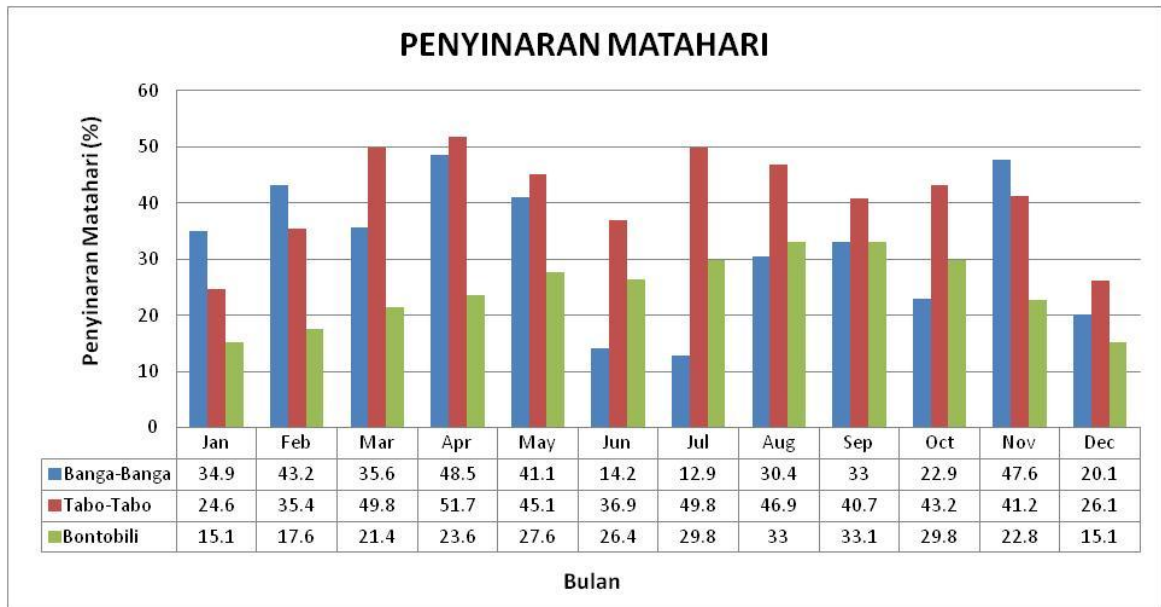
Lama penyinaran matahari di WS Saddang berdasarkan hasil pengukuran di 3 stasiun meteorologi menunjukkan nilai yang bervariasi, yaitu 32,1% pada Stasiun Banga-Banga, 40,9% pada Stasiun Tabo-Tabo dan 24,6% pada Stasiun Bontobili. Hasil pengukuran Stasiun Banga-Banga menunjukkan lama penyinaran matahari minimum dan maksimum adalah 12,9% dan 48,5% yang terjadi pada bulan Juli dan April. Hasil pengukuran lama penyinaran matahari minimum dan maksimum di Stasiun Tabo-Tabo adalah 24,6% dan 51,7% dan terjadi pada bulan Januari dan April. Sedangkan hasil pengukuran lama penyinaran matahari minimum dan maksimum di Stasiun Bontobili adalah 15,1% dan 33,1% dan terjadi pada bulan Januari dan September.

Data rekapitulasi hasil pengamatan durasi penyinaran matahari bulanan dan rerata di Stasiun Banga-banga, Stasiun Tabo-Tabo dan Stasiun Bontobili disajikan dalam Tabel 2.13 dan Gambar 2.9.

Tabel 2.13 Lama Penyinaran Matahari Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012

Bulan	Stasiun Banga-Banga (%)	Stasiun Tabo-Tabo (%)	Bontobili (%)
Januari	34,9	24,6	15,1
Februari	43,2	35,4	17,6
Maret	35,6	49,8	21,4
April	48,5	51,7	23,6
Mei	41,1	45,1	27,6
Juni	14,2	36,9	26,4
Juli	12,9	49,8	29,8
Agustus	30,4	46,9	33
September	33,0	40,7	33,1
Oktober	22,9	43,2	29,8
November	47,6	41,2	22,8
Desember	20,1	26,1	15,1
Rata-rata	32,1	40,9	24,6

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013



Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Gambar 2.9 Rekapitulasi Lama Penyinaran Matahari Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012

d. Kecepatan Angin

Kecepatan angin rerata tahunan di WS Saddang berdasarkan hasil pengukuran di 3 stasiun meteorologi menunjukkan nilai yang bervariasi, yaitu 92,5 km/hari pada Stasiun Banga-Banga, 13,7 km/hari pada Stasiun Tabo-Tabo dan 76,8 km/hari pada Stasiun Bontobili. Kecepatan angin minimum dan maksimum di Stasiun Banga-Banga tercatat sebesar 34,9 km/hari dan 173,6 km/hari yang terjadi berturut-turut pada bulan April dan Agustus. Pada Stasiun Tabo-Tabo, kecepatan angin minimum dan maksimum berkisar pada 4,2 km/hari pada bulan Juni dan 18,9 km/hari pada bulan Januari. Sementara itu kecepatan minimum dan maksimum di Stasiun Bontobili tercatat sebesar 59,5 km/hari pada bulan Juli dan 90,3 km/hari pada bulan Oktober.

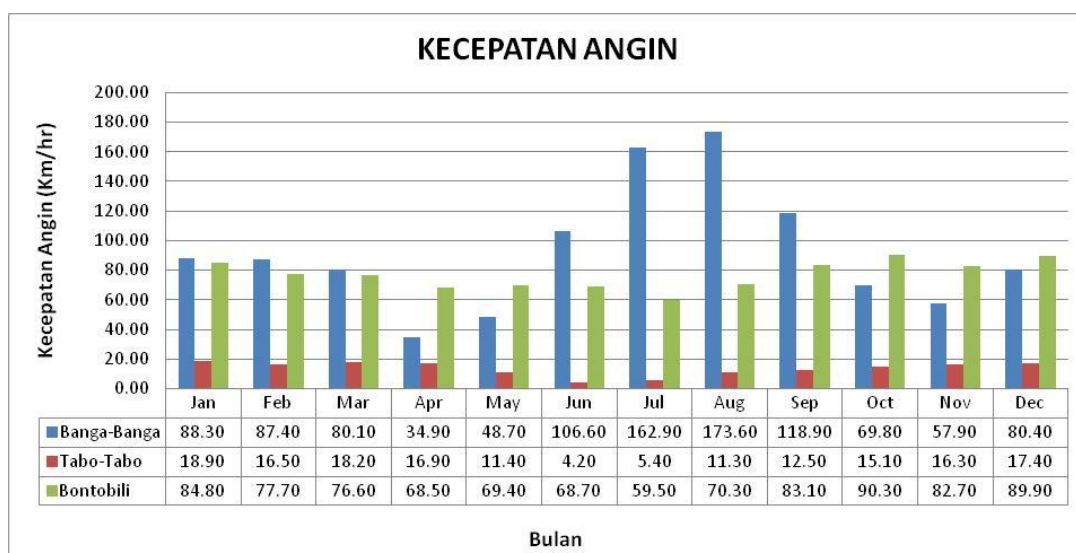
Data rekapitulasi hasil pengamatan kecepatan angin bulanan dan rerata di Stasiun Banga-banga, Tabo-Tabo dan Bontobili disajikan dalam Tabel 2.14 dan Gambar 2.10. adalah grafik kecepatan angin bulanan.

Tabel 2.14 Kecepatan Angin Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012

Bulan	Stasiun Banga-Banga (km/hari)	Stasiun Tabo-Tabo (Km/hari)	Stasiun Bontobili (Km/hari)
Januari	88,3	18,9	84,8
Februari	87,4	16,5	77,7
Maret	80,1	18,2	76,6
April	34,9	16,9	68,5
Mei	48,7	11,4	69,4

Bulan	Stasiun Banga-Banga (km/hari)	Stasiun Tabo-Tabo (Km/hari)	Stasiun Bontobili (Km/hari)
Juni	106,6	4,2	68,7
Juli	162,9	5,4	59,5
Agustus	173,6	11,3	70,3
September	118,9	12,5	83,1
Oktober	69,8	15,1	90,3
November	57,9	16,3	82,7
Desember	80,4	17,4	89,9
Rata-rata	92,5	13,7	76,8

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

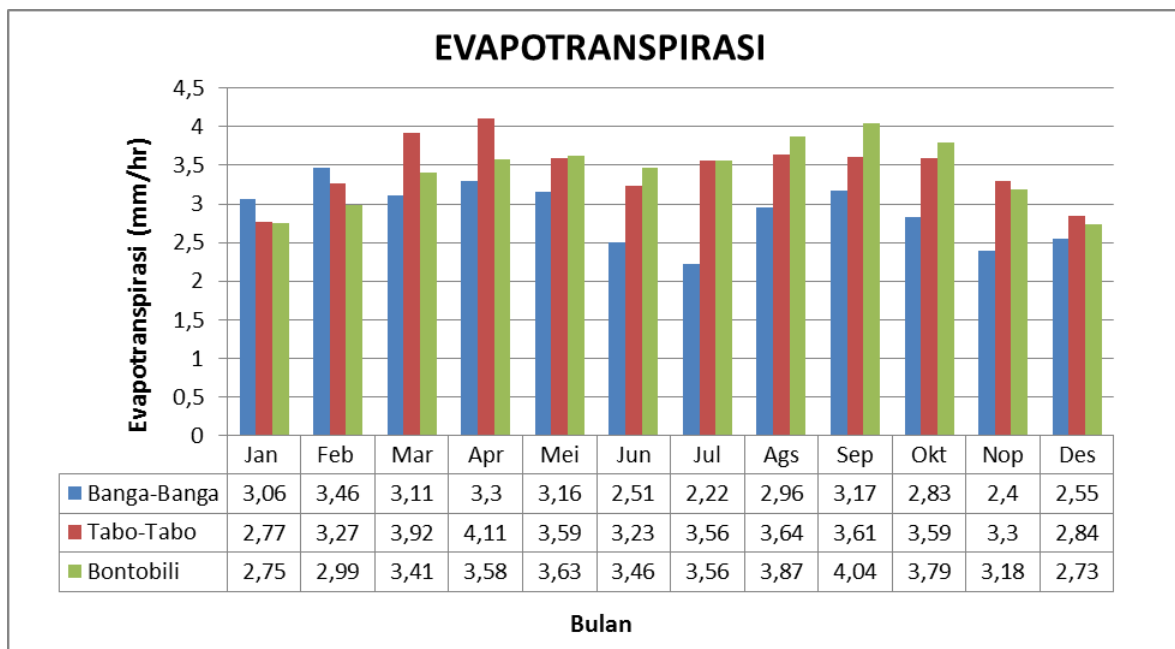


Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Gambar 2.10 Rekapitulasi Kecepatan Angin Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012

e. Evapotranspirasi

Perhitungan Evapotranspirasi pada data iklim menggunakan pendekatan Penman. Tingkat evapotranspirasi pada saat musim kemarau akan lebih besar daripada saat musim hujan, yang diikuti dengan karakteristik suhu udara yang tinggi dan kelembaban yang rendah. Hasil analisis menunjukkan evapotranspirasi maksimum untuk Stasiun Banga-Banga adalah sebesar 3,46 mm/hari, Stasiun Tabo-Tabo sebesar 4,11 mm/hari dan Stasiun Bontobili sebesar 4,04 mm/hari. Evapotranspirasi rerata Stasiun Banga-Banga adalah 2,98 mm/hari, Stasiun Tabo-Tabo 3,45 mm/hari dan Stasiun Bontobili adalah 3,42 mm/hari. Hasil perhitungan evapotranspirasi di WS Saddang disajikan dalam Gambar 2.11.



Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Gambar 2.11 Rekapitulasi Evapotranspirasi Bulanan dan Rata-Rata Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 2012

2. Curah Hujan

Hasil analisis terhadap data yang diukur di 61 pos hujan yang terletak di WS Saddang menunjukkan curah hujan cenderung lebih tinggi di bagian utara Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, bagian tengah di Kabupaten Pinrang, bagian selatan di Kabupaten Maros dan Pangkajene Kepulauan serta perbatasan antara Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene. Tinggi curah hujan rata-rata di tempat tersebut berkisar 3.000 mm/tahun hingga 4.000 mm/tahun. Curah hujan yang rendah yang < 2000 mm/tahun terdapat di Kabupaten Barru dan Kabupaten Enrekang bagian timur.

Data curah hujan bulanan dari 21 stasiun hujan disajikan pada Tabel 2.11. Lokasi 61 pos penakar curah hujan dan sebaran curah hujan berdasarkan analisis isohyet disajikan pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.13.

Tabel 2.15 Stasiun Pengukur Curah Hujan di WS Saddang

No	Nama	Kabupaten	Koodinat	
			Lintang	Bujur
1	Alitta	Pinrang	-3,881	119,681
2	Aressie	Pinrang	-3,827	119,736
3	Balajen / Alla	Enrekang	-3,325	119,823
4	Banga-Banga	Pinrang	-3,821	119,588
5	Bankae	Sidenreng Rappang	-3,905	119,742
6	Baraka	Enrekang	-3,414	119,860

No	Nama	Kabupaten	Koodinat	
			Lintang	Bujur
7	Baring	Pangkajene Kepulauan	-4,689	119,611
8	Batu Bassi	Barru	-4,411	119,650
9	Bendung Benteng	Pinrang	-3,687	119,677
10	Bittoeng	Pinrang	-3,641	119,535
11	Bonto Kappong	Maros	-5,953	119,469
12	Bontoharu	Selayar	-6,124	120,457
13	Bungi	Pinrang	-3,568	119,538
14	Ciddie	Pinrang	-4,045	119,652
15	Sikapa	Barru	-4,567	119,717
16	Data	Pinrang	-3,609	119,538
17	Galesong	Takalar	-5,316	119,386
18	Jampue	Pinrang	-3,714	119,629
19	Kaballangan	Pinrang	-3,689	119,595
20	Kalian Patomo	Pinrang	-3,706	119,513
21	Kalosi	Pinrang	-3,483	119,537
22	Kariango	Pinrang	-3,915	119,577
23	Kariango - Ujung	Pinrang	-3,917	119,250
24	Lanrae	Barru	-4,201	119,659
25	Lingga-Lingga	Pinrang	-3,867	119,733
26	Lompoe	Pare-pare	-4,044	119,652
27	Makale	Tator	-3,003	119,877
28	Mangkoso	Barru	-4,265	119,622
29	Manipi	Sinjai	-5,212	120,011
30	Manuba	Barru	-4,258	119,634
31	Marang	Pangkajene Kepulauan	-4,672	119,571
32	Mareppang	Barru	-4,186	119,657
33	Maroangin	Enrekang	-3,734	119,866
34	Mata Allo-Bamba	Enrekang	-3,556	119,779
35	Nanggala	Tator	-2,959	119,988
36	Palanro	Barru	-4,171	119,639
37	Pammana	Wajo	-4,170	120,038
38	Paria	Pinrang	-3,670	119,481
39	Patomo	Pinrang	-5,398	119,591
40	Pattojo	Soppeng	-4,397	119,945
41	Pg. Arosoe	Bone	-4,723	120,319
42	Pongtiku	Tana Toraja	-3,045	119,819
43	Ralla	Barru	-4,535	119,703
44	Ralla	Barru	-4,535	119,703
45	Sadang Batu-batu	Pinrang	-3,694	119,555
46	Sadang Rantepao	Tana Toraja	-3,973	119,894
47	Sadang Tana Toraja	Toraja Utara	-2,973	119,836
48	Sadang Kabere	Enrekang	-3,657	119,785
49	Salipolo	Pinrang	-3,935	119,614

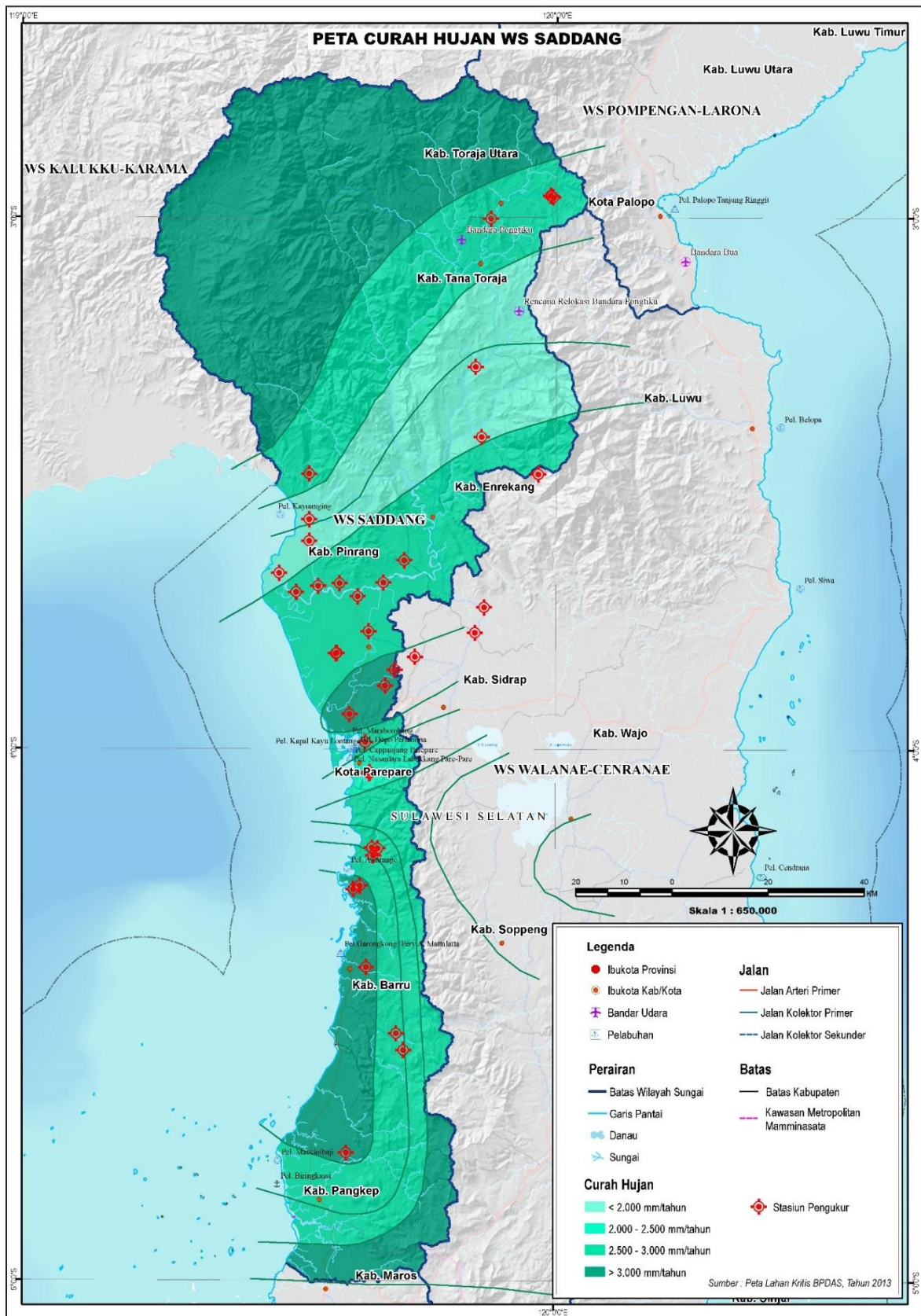
No	Nama	Kabupaten	Koodinat	
			Lintang	Bujur
50	Salokarajae	Enrekang	-3,781	119,849
51	Salubarani	Enrekang	-3,282	119,849
52	Sawitto	Pinrang	-3,779	119,649
53	Sereang	Pare-Pare	-5,020	119,665
54	Sesean	Toraja Utara	-2,895	119,947
55	Sikapa	Barru	-4,506	119,658
56	Sikuku	Polmas	-3,217	119,300
57	Suppa	Pinrang	-3,933	119,550
58	Tabo - Tabo	Pangkajene Kepulauan	-4,771	119,633
59	Talang Riaja	Enrekang	-3,483	119,967
60	Tandung Nanggala	Tana Toraja	-2,963	119,993
61	Tiroang	Pinrang	-3,646	119,716

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Tabel 2.16 Curah Hujan Bulanan WS Saddang

No	Stasiun	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Teppo	180	188	234	357	254	165	141	61	103	158	166	242	2.249
2	Labukkang	327	251	340	277	157	89	88	45	57	103	287	449	2.470
3	Langnga	246	195	325	219	226	94	113	84	115	81	209	293	2.199
4	Pekkabata	185	346	248	233	261	235	163	129	130	174	216	240	2.559
5	Bindoro	103	103	151	257	292	210	210	113	119	134	106	145	1.941
6	Amparita	114	116	143	171	174	135	135	63	55	71	102	125	1.403
7	Pangkajene	125	115	151	181	186	155	155	72	80	102	115	190	1.628
8	Bilokka	97	119	117	148	199	93	93	50	32	62	79	177	1.266
9	Manisa	134	135	154	150	167	137	137	74	36	80	129	164	1.497
10	Tiroang	96	79	168	175	129	106	106	37	66	65	144	127	1.297
11	Banga-Banga	162	126	188	159	151	40	40	26	31	89	107	170	1.289
12	Cempa	150	50	250	181	221	66	66	49	40	80	136	171	1.459
13	Kanyuara	114	83	136	149	211	103	103	85	42	84	102	156	1.367
14	Salokarajae	180	139	183	222	271	225	191	96	107	163	145	165	2.002
15	Salu Barani	140	113	165	227	270	201	227	98	68	143	139	117	2.108
16	Patomo/Kaliang	305	215	319	288	116	156	116	138	79	215	194	348	3.026
17	Bungi	171	134	237	209	184	114	65	51	108	165	169	258	2.139
18	Kalosi	255	349	355	233	194	99	49	26	60	227	376	493	3.083
19	Marowangin	207	200	223	290	354	307	300	178	145	236	173	245	2.461
20	Benteng	281	270	330	392	390	310	187	191	170	334	289	317	3.837
21	Kaballangan	185	187	252	249	158	213	137	116	87	159	204	254	2.775
Total		3.757	3.513	4.669	4.767	4.565	3.253	2.822	1.782	1.730	2.925	3.587	4.846	44.055
Rata-rata		179	167	222	227	217	155	134	85	82	139	171	231	2.098

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013



Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Gambar 2.12 Peta Curah Hujan WS Saddang

3. Data Air Permukaan

a. Debit

Potensi air permukaan pada 24 DAS yang terdapat dalam WS Saddang mencapai 16.50 milyar m^3/tahun . Sebagian besar potensi air permukaan tersebut mengalir di DAS Saddang. DAS Saddang merupakan DAS terluas di WS Saddang.

Hasil pengukuran lapangan debit Sungai Saddang I di Desa Kabere Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang menunjukkan debit Sungai Saddang mencapai 258,529 m^3/detik . Pengukuran di Sungai Saddang III di Desa Masape/Batu Batu Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang menunjukkan debit Sungai Saddang sebesar 219,743 m^3/detik . Pengukuran di Sungai Saddang Toraja Utara di Desa Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara menghasilkan nilai debit sebesar 19,548 m^3/detik .

Hasil pengukuran lapangan terhadap debit beberapa sungai di WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Hasil pengukuran debit Beberapa Sungai di WS Saddang

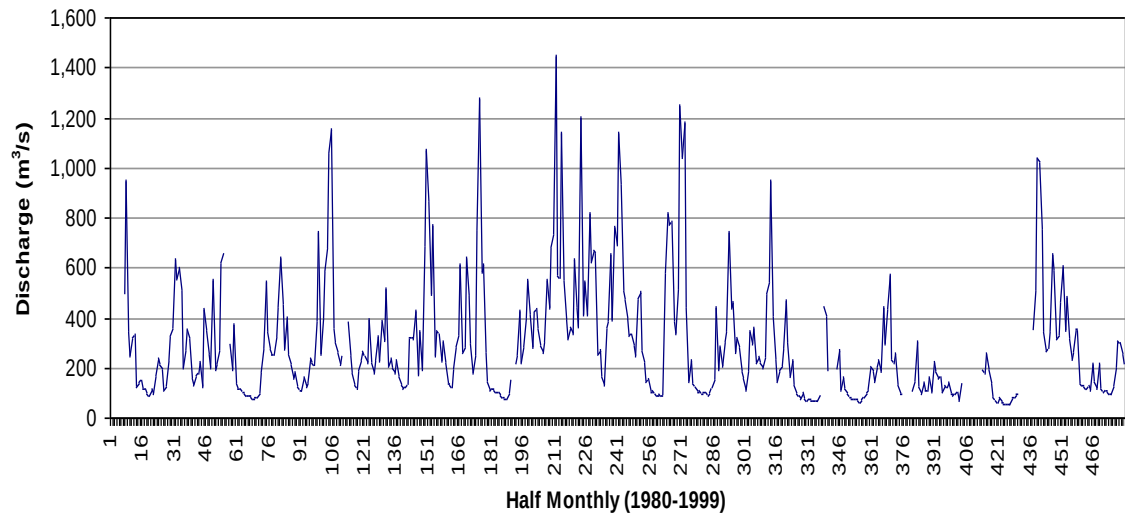
No	Sungai	Lokasi Pengukuran	Luas DAS (Ha)	Debit rerata (m^3/dtk)
1	Batu Bassi	Kabupaten Barru	1.800	2,654
2	Tabo Tabo	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	28.100	15,779
3	Mata Allo	Kabupaten Enrekang	87.000	26,513
4	Saddang III	Kabupaten Pinrang	598.500	219,743
5	Baraka	Kabupaten Enrekang	162.800	5,880
6	Saddang Tana Toraja	Kabupaten Toraja Utara	354.668	19,548
7	Saddang I	Kabupaten Enrekang	576.000	258,529
8	Mamasa	Kabupaten Polewali Mandar	90.800	47,282

Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Selain melakukan pengukuran lapangan, besaran debit sungai di WS Saddang juga dihitung menggunakan hidrograf, yang didapatkan dari hasil rekapitulasi pos duga ketinggian permukaan air di WS Saddang.

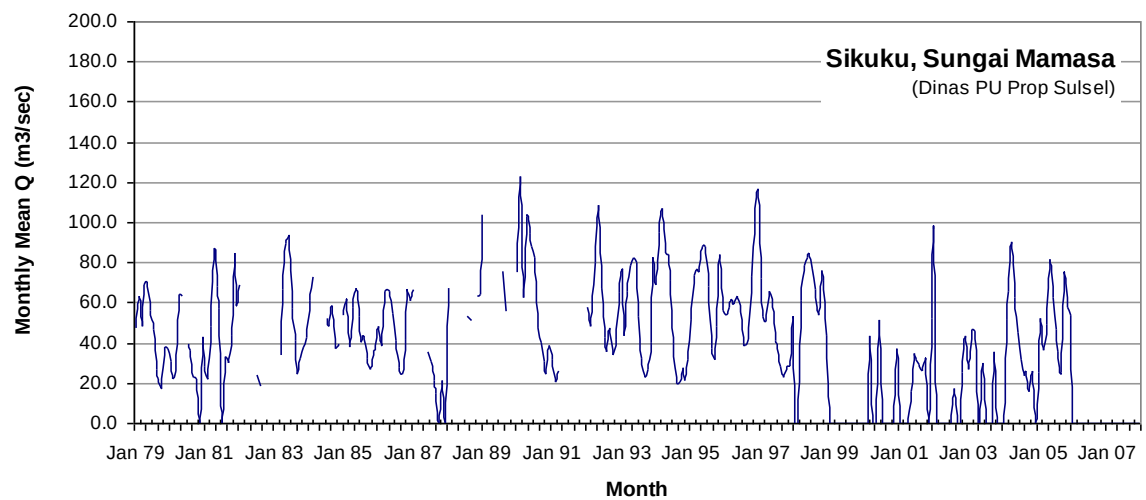
Debit pengamatan rata-rata bulanan di Bendung Benteng yang memiliki luas 5,700 km^2 di Sungai Saddang memiliki besaran mencapai 296 m^3/detik . Sementara itu debit Sungai Saddang yang mengalir di Sikuku, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat menunjukkan debit yang lebih kecil, yaitu 55.31 m^3/det .

Grafik hidrograf beberapa sungai di WS Saddang disajikan dalam Gambar 2.13 sampai dengan Gambar 2.24.



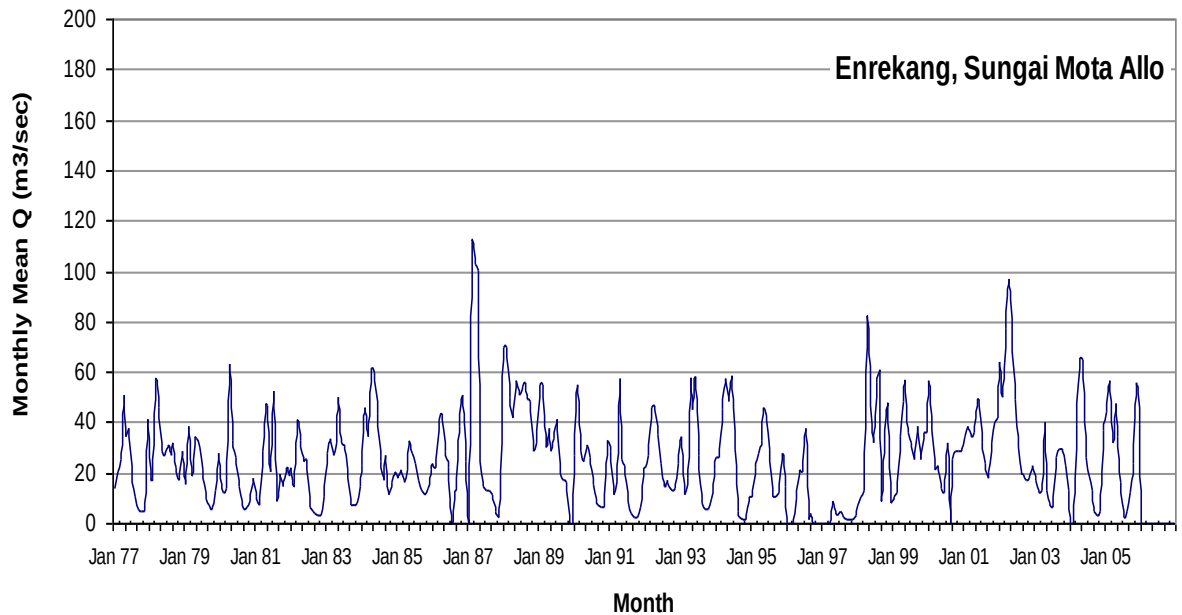
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.13 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi : Bendung Benteng)



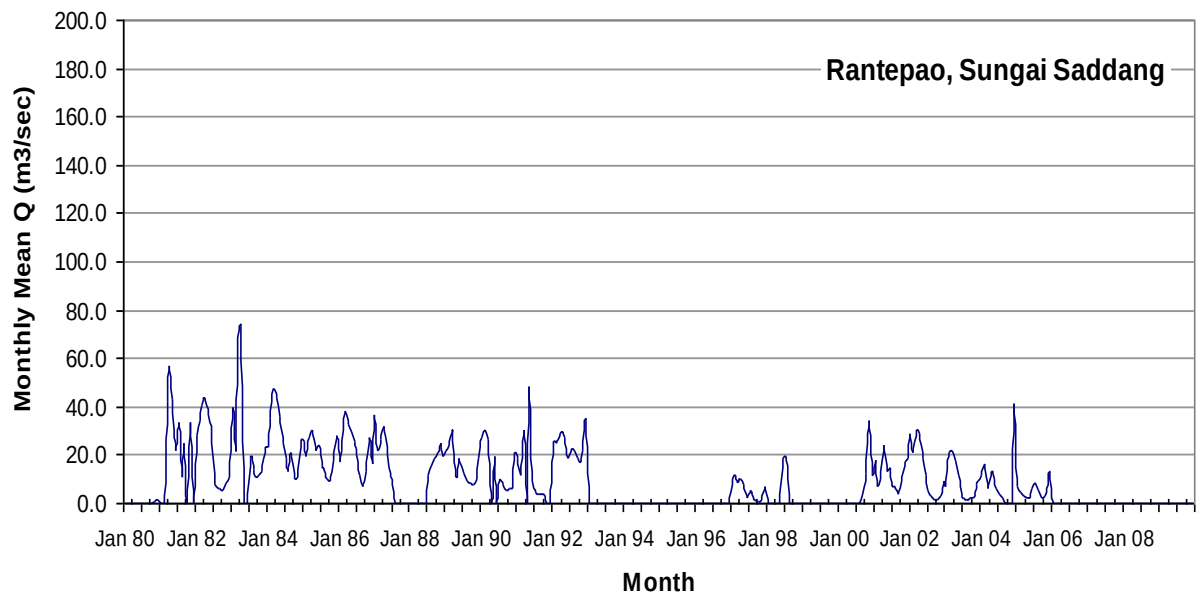
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.14 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Mamasa (Lokasi : Sikuku, Sungai Mamasa)



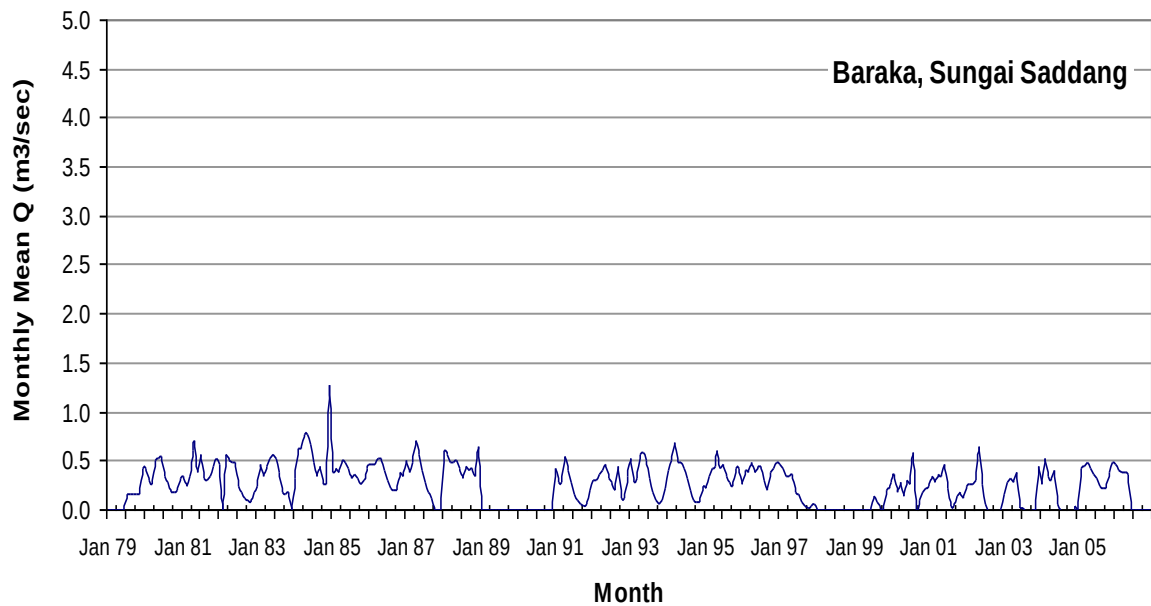
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.15 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Sungai Mata Allo)



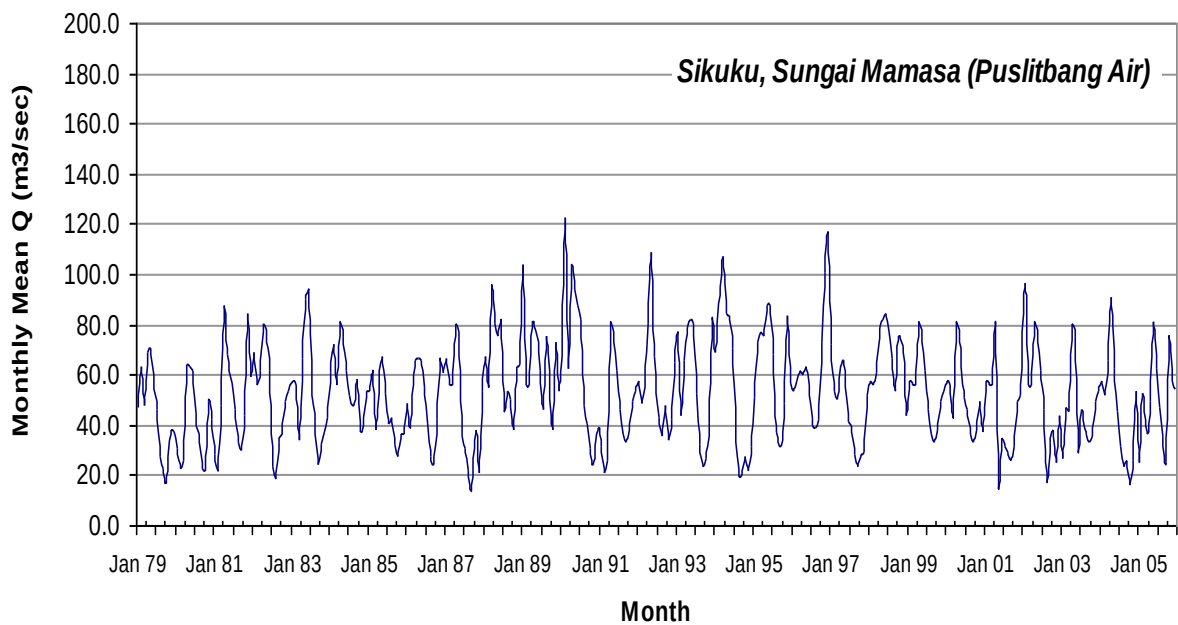
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.16 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Rantepao Sungai Saddang)



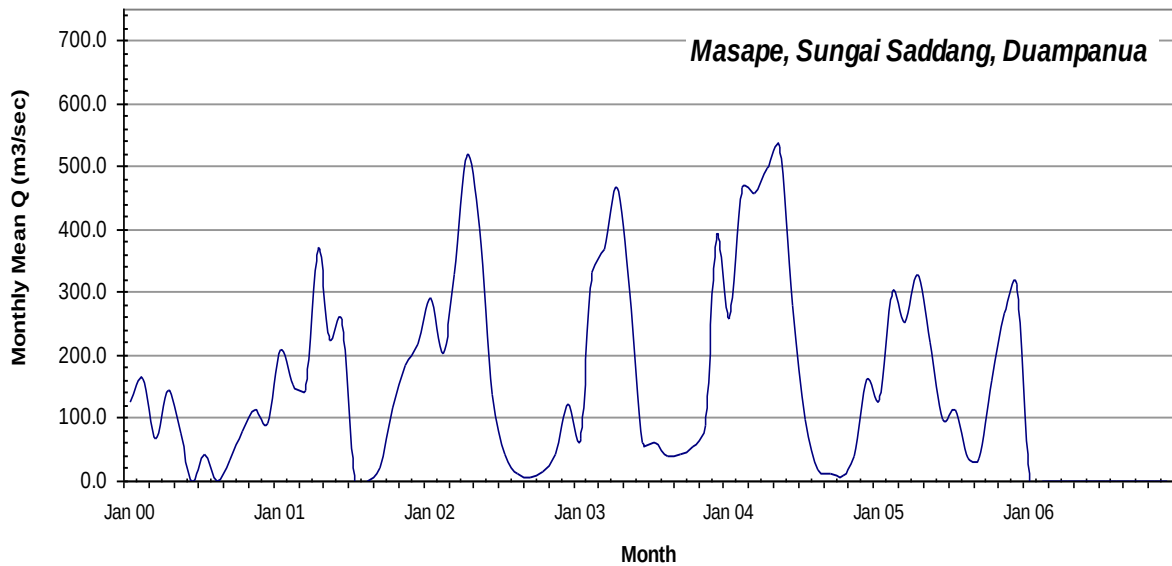
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.17 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Baraka Sungai Saddang)



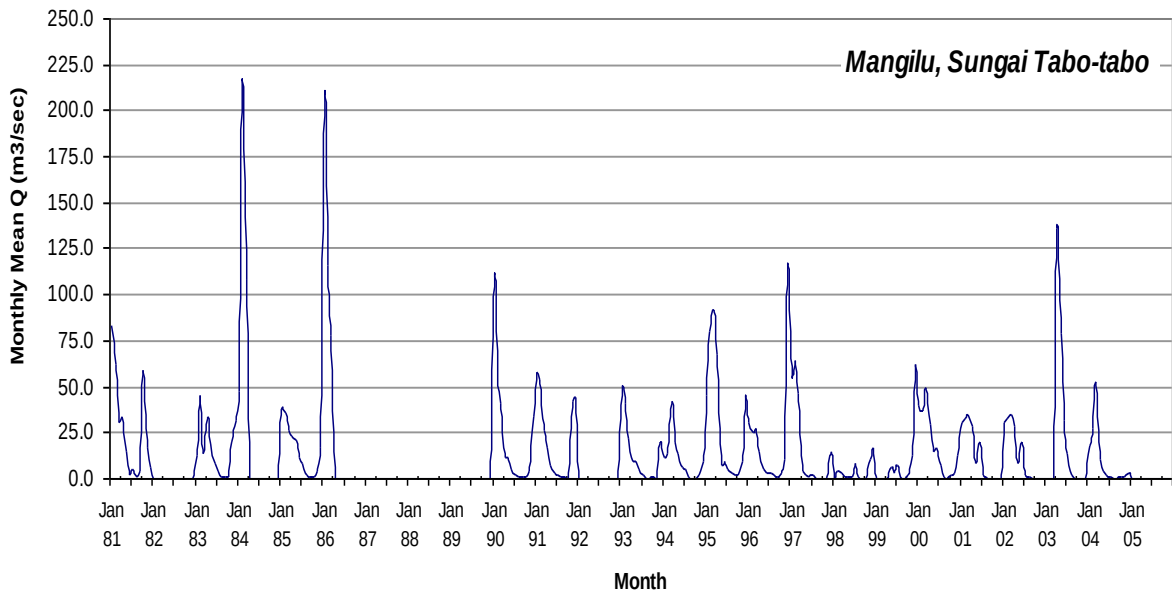
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.18 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Sikuku, Sungai Mamasa)



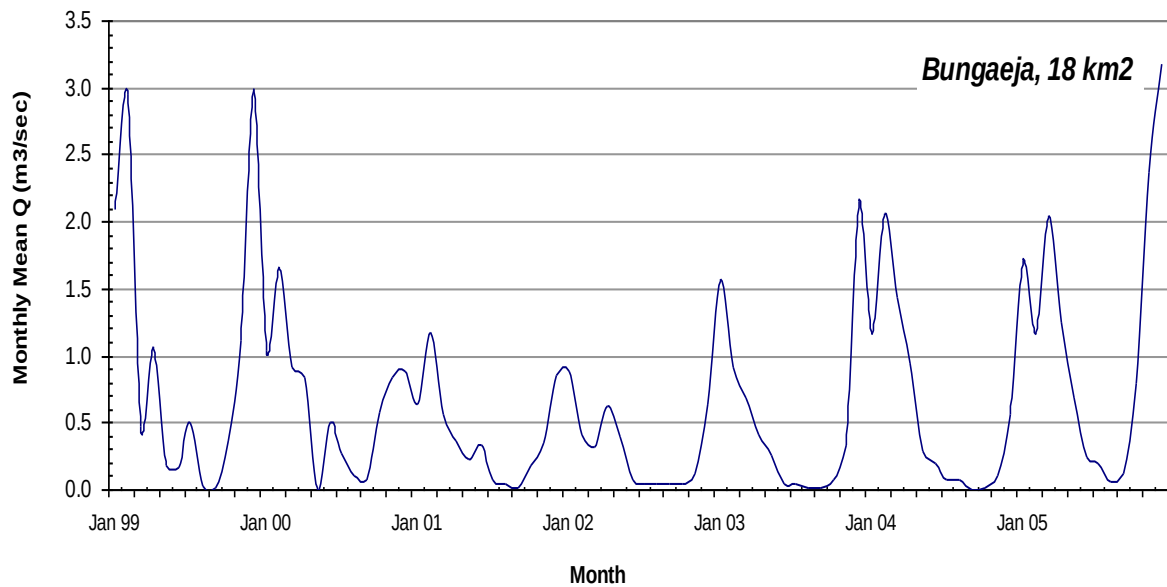
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

**Gambar 2.19 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang
(Lokasi: Masepe, Sungai Saddang)**



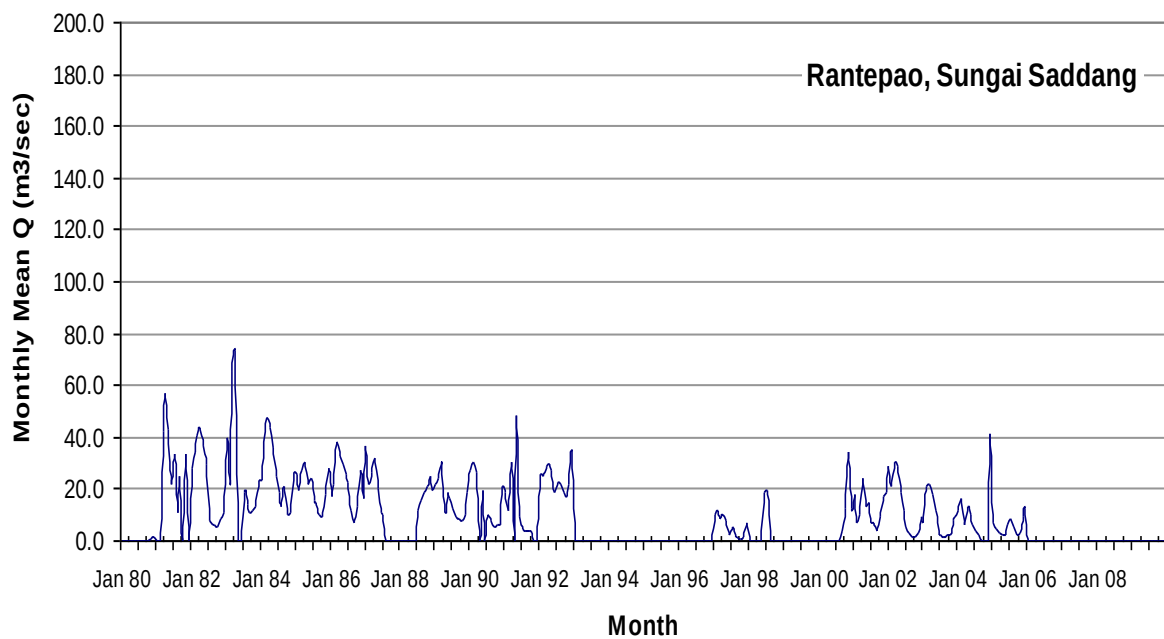
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

**Gambar 2.20 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang
(Lokasi: Mangilu, Sungai Tabo-Tabo)**



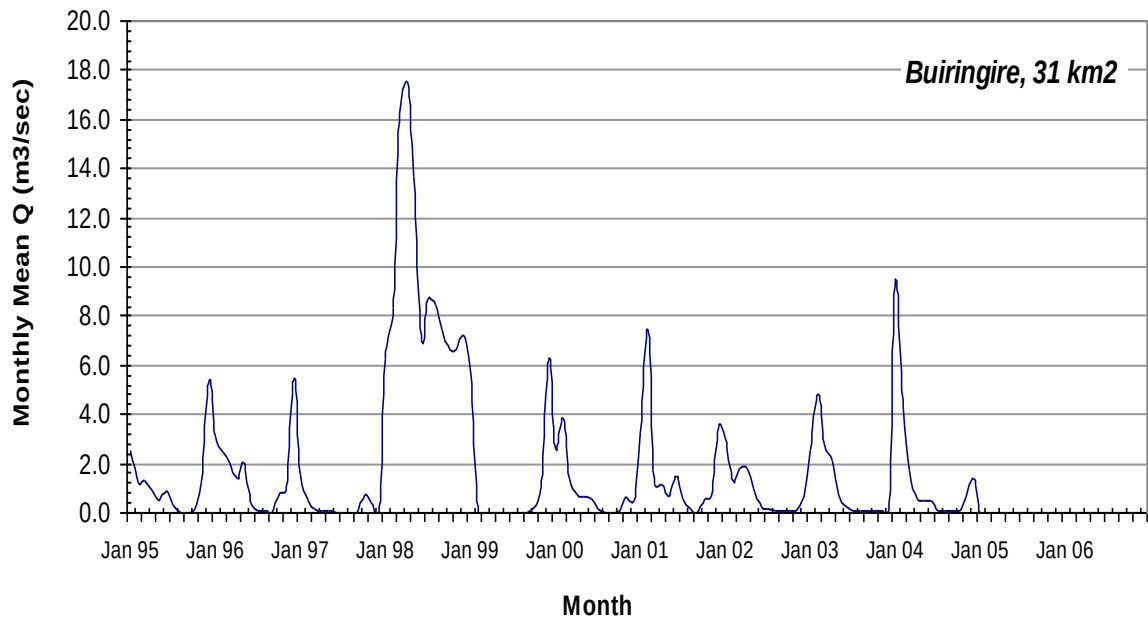
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.21 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Bungaeja)



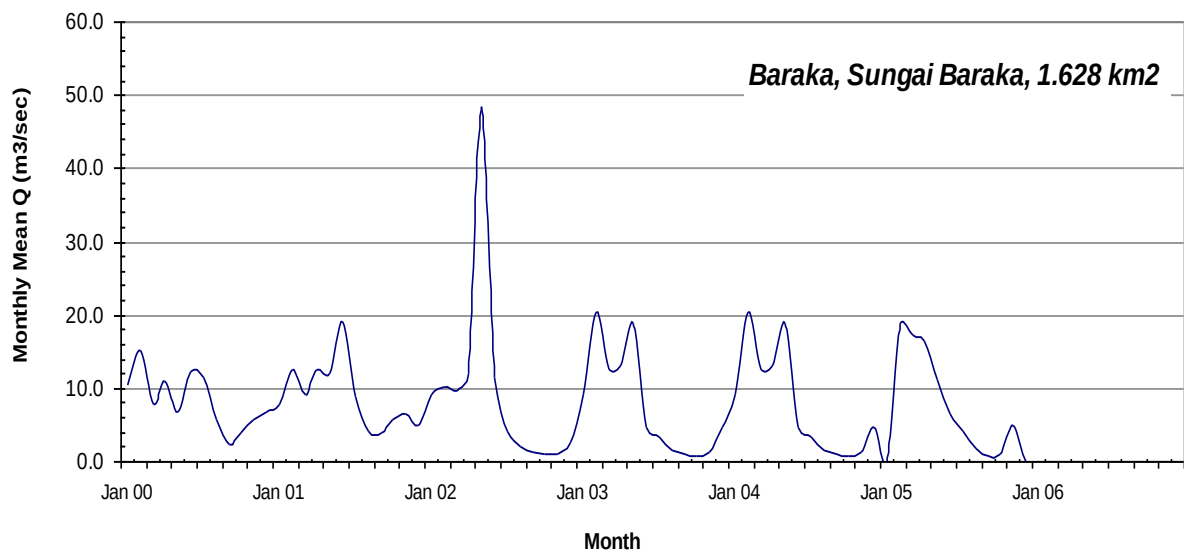
Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.22 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Rantepao, Sungai Saddang)



Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.23 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Buiringire)



Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.24 Hidrograf Debit Sungai Rata-rata Bulanan di DAS Saddang (Lokasi: Baraka, Sungai Baraka)

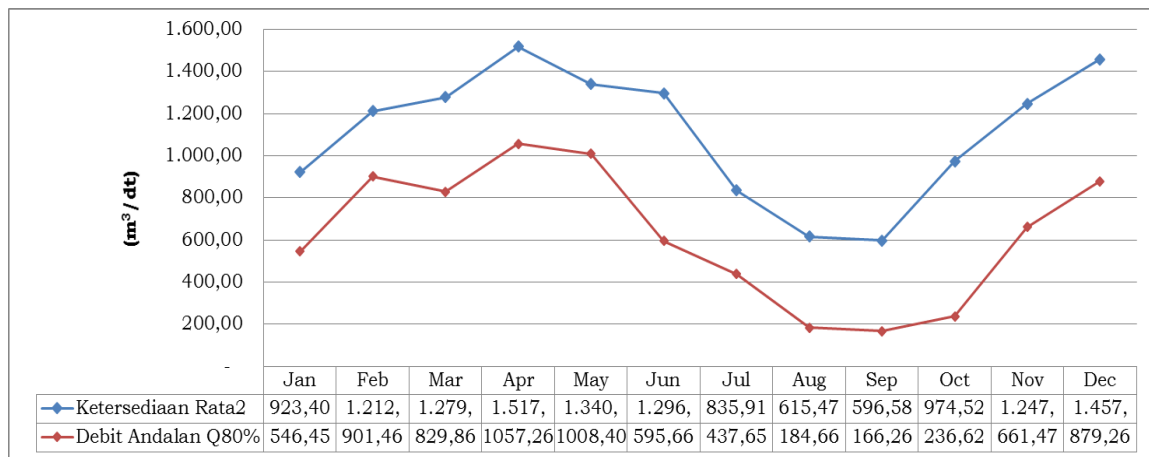
b. Potensi Permukaan

Potensi ketersediaan air di WS Saddang cukup besar. Ketersediaan air rata-rata adalah 1.108,15 m³/detik, dengan volume tahunan mencapai 34.946,55 juta m³/tahun. Sementara itu ketersediaan air Q80% adalah 625,42 m³/detik dan volume tahunan sebesar 19.723,15 m³/tahun. Data potensi ketersediaan air masing-masing DAS di WS Saddang dapat dilihat pada Tabel 2.18 dan Gambar 2.25. Gambar 2.25 ditampilkan potensi ketersediaan air WS Saddang Tahun 2013.

Tabel 2.18 Potensi Ketersediaan Air WS Saddang

Kode	Nama DAS	Luas (Km ²)	Ketersediaan Air Rata-rata		Ketersediaan Q80%	
			m ³ /det	juta m ³ /th	m ³ /det	juta m ³ /th
1	Galanggalang	147,38	0,65	20,40	0,33	10,51
2	Bungi	224,60	1,10	34,72	0,53	16,75
3	Massila	104,65	0,24	7,71	0,11	3,41
4	Saddang	6.439,20	1.061,83	33.485,79	600,49	18.937,07
5	Sibo	119,54	18,88	595,36	11,15	351,54
6	Kariango	418,02	3,90	122,99	1,73	54,49
7	Agalacange	19,97	0,01	0,32	0,01	0,21
8	Jawijawi	48,01	0,06	1,84	0,04	1,21
9	Karajae	105,69	0,22	6,84	0,10	3,04
10	Bojo	33,92	0,02	0,61	0,00	0,05
11	Pelapekae	15,87	0,01	0,18	0,00	0,06
12	Kupa	17,93	0,01	0,37	0,01	0,21
13	Jampue	137,20	0,47	14,94	0,27	8,53
14	Lampoko	186,04	1,02	32,10	0,58	18,40
15	Lakepo	101,58	0,38	11,94	0,21	6,60
16	Binangae	106,29	0,22	6,92	0,10	3,08
17	Lipukasi	368,35	3,99	125,84	2,29	72,12
18	Matajang	126,99	0,48	15,16	0,27	8,38
19	Segeri	166,59	0,98	30,76	0,55	17,21
20	Limbangan	96,64	0,37	11,77	0,22	7,07
21	Labbakang	78,23	0,27	8,42	0,11	3,43
22	Pangkajene	440,06	8,45	266,36	3,45	108,66
23	Sangkara	352,30	4,52	142,46	2,84	89,55
24	Maronak	53,04	0,09	2,76	0,05	1,55
	WS Saddang	9.908,09	1.108,15	34.946,55	625,42	19.723,15

Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009



Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan, 2009

Gambar 2.25 Potensi Ketersediaan Air WS Saddang Tahun 2013

c. Prasarana Sumber Daya Air

Dalam WS Saddang telah terbangun beberapa prasarana sumber daya air. DAS Saddang sebagai DAS yang memiliki luas paling besar 6.439,20 km². Dalam DAS Saddang terdapat potensi irigasi DI Saddang di bagian hulu dengan luasan mencapai 39.510 ha. Bangunan bendung dan embung yang berada di DAS Saddang yaitu Bendung Gerak Benteng, Embung Lemo Menduruk dengan kapasitas tampungan 28.811 m³ dan Embung Tampang dengan kapasitas tampungan 5.670 m³. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) merupakan prasarana sumber daya air lainnya yang terdapat di DAS Saddang, yaitu PLTA Malea dengan kapasitas produksi 14,4 MW, dan PLTA Bakaru dengan kapasitas 126 MW.

Beberapa prasarana sumber daya air yang terdapat di WS Saddang termuat dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Beberapa Prasarana Sumber Daya Air WS Saddang

No	Nama Infrastruktur	Kapasitas	Lokasi
A	Bendung		
1.	Bendung Gerak Benteng	Mengairi 63.000 ha	Kabupaten Pinrang (DAS Saddang)
2.	Bendung Bakaru	Potensi Listrik 126 MW	Kabupaten Pinrang (DAS Saddang)
B	Embung		
1.	Embung Lemo Menduruk	28.811 m ³	Kabupaten Tana Toraja (DAS Saddang)
2.	Embung Tampang	5.670 m ³	Kabupaten Enrekang (DAS Saddang)
3.	Embung Karajae	2.275 m ³	Kota Pare-Pare (DAS Karajae)

No	Nama Infrastruktur	Kapasitas	Lokasi
4.	Embung Calie	7.917 m ³	Kabupaten Sidenreng Rappang (DAS Jampue)
5.	Embung Datae	42.216 m ³	Kabupaten Sidenreng Rappang (DAS Jampue)
6.	Embung Bingkulu	32.016 m ³	Kabupaten Sidenreng Rappang (DAS Lampoko)
7.	Embung Alabong	19.392 m ³	Kabupaten Sidenreng Rappang (DAS Lampoko)
8.	Embung Bojo	136.234 m ³	Kabupaten Barru (DAS Binangae)
9.	Embung Galung	50.000 m ³	Kabupaten Barru (DAS Binangae)
C	PLTA		
1,	PLTA Buntu Batu	300 MW	Kabupaten Enrekang (DAS Saddang)
2.	PLTA Bakarui	126 MW	Kabupaten Pinrang (DAS Saddang)
3..	PLTA Malea	14,4 MW	Kabupaten Tana Toraja (DAS Saddang)
D	Daerah Irigasi (DI)		
1.	DI Saddang Sidrap	15.195 ha	Kabupaten Sidenreng Rappang (DAS Saddang)
2.	DI Saddang Pinrang	42.931 ha	Kabupaten Pinrang (DAS Saddang)
3.	DI Tacippi	1.568 ha	Kabupaten Pinrang (DAS Kariango)
5.	DI Bila	5.400 ha	Kabupaten Sidenreng Rappang (DAS Jawijawi)
6.	DI Kalola Kalosi	5.405 ha	Kabupaten Pinrang (DAS Jawijawi)
7.	DI Bulucenrana	6.000 ha	Kabupaten Sidenreng Rappang (DAS Jawijawi)
9.	DI Sidenreng	3.400 ha	Kabupaten Sidenreng Rappang (DAS Jawijawi)
11.	DI Matajang	1.828 ha	Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DAS Lakepa)
12.	DI Bentung Batupute	1.000 ha	DAS Lakepa

No	Nama Infrastruktur	Kapasitas	Lokasi
13.	DI Padaelo	2.958 ha	Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DAS Pangkajene)
14.	DI Leang Lonrong	1.229 ha	Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DAS Pangkajene)
15	DI Lanrae	1.120 ha	Kabupaten Barru
15.	DI Tabo-Tabo	8.615 ha	Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DAS Pangkajene)

Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang, Tahun 2013

d. Potensi Air Tanah

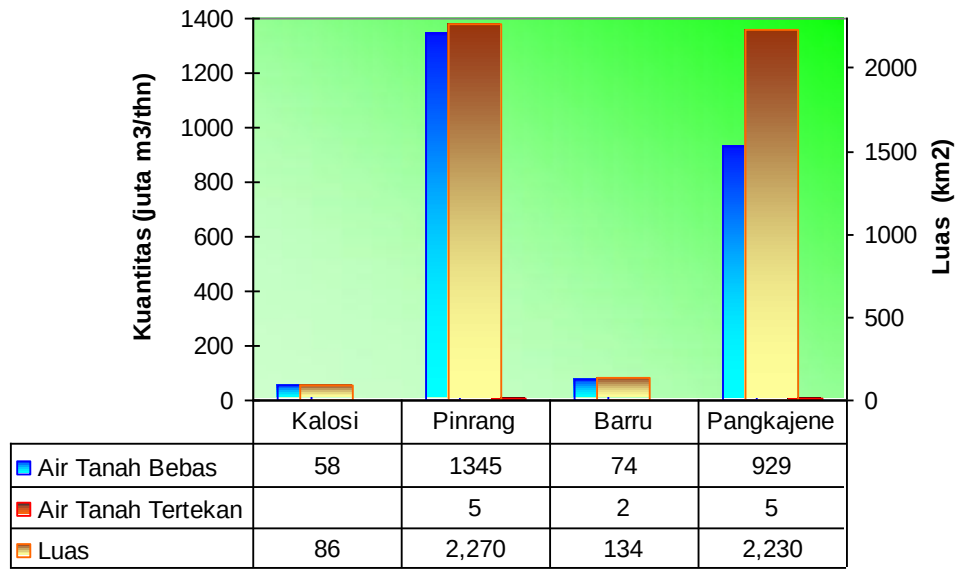
Berdasarkan hasil kajian potensi air tanah, sebaran cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT tersebar di sepanjang pantai barat WS Saddang, berupa potensi air tanah bebas dan air tanah tertekan.

Luasan CAT terbesar berada di kawasan Pinrang dan Pangkajene. Potensi CAT berupa air tanah bebas yang terdapat pada Kabupaten Pinrang memiliki luasan 2.270 km², dengan potensi kapasitas 1.345 juta m³/tahun. Potensi CAT berupa air tanah bebas yang terdapat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan memiliki luasan sebesar 2.230 km² dengan potensi kapasitas 929 juta m³/tahun. Penyebaran lokasi CAT dan luasannya disajikan dalam Tabel 2.20 dan grafik potensi air tanah di WS Saddang ditampilkan pada Gambar 2.26, dan peta sebaran lokasi CAT di WS Saddang ditampilkan pada Gambar 2.27.

Tabel 2.20 Sebaran Cekungan Air Tanah di WS Saddang

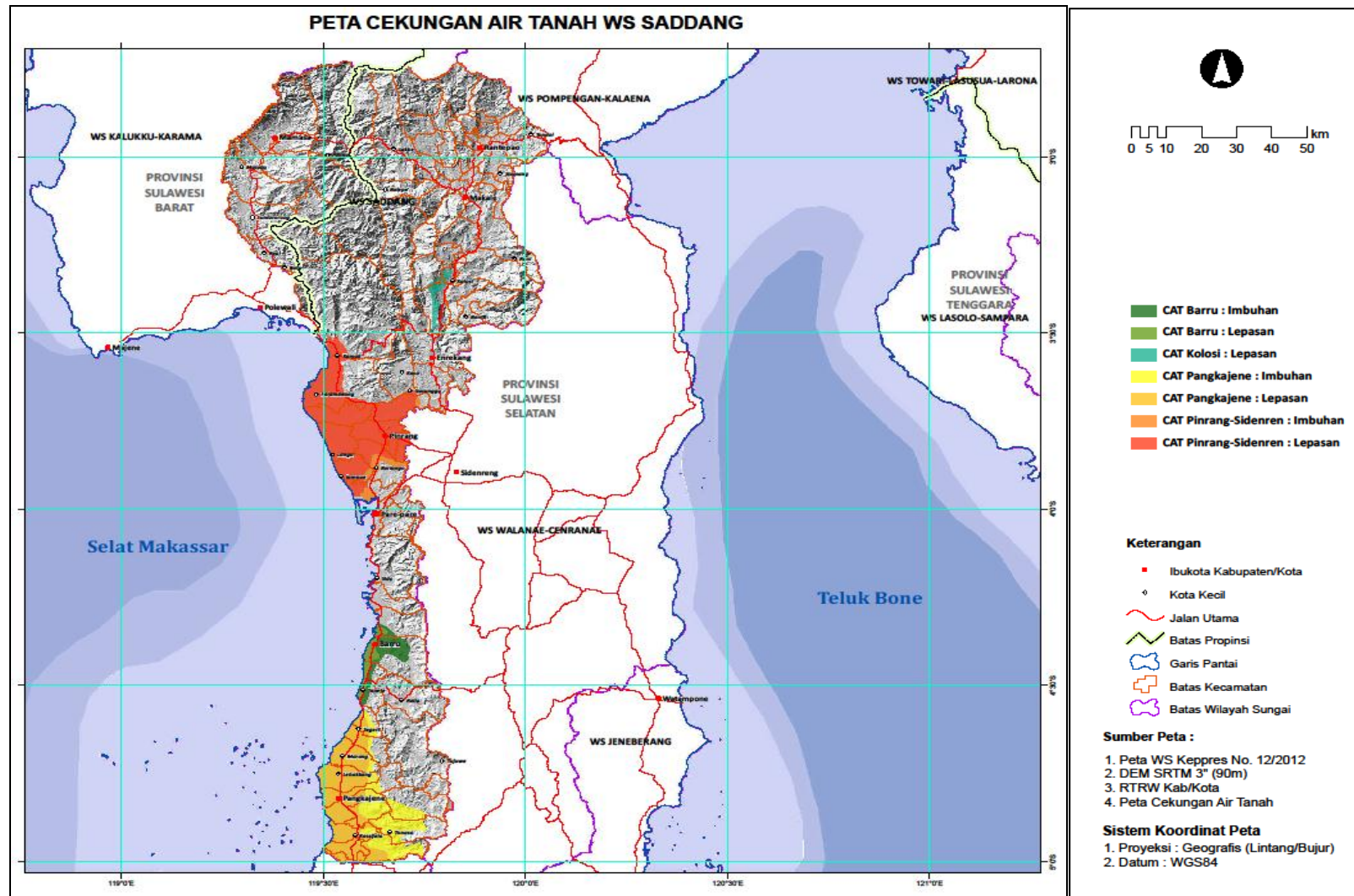
No	Nama	Penyebaran
1	Kalosi	Kab. Enrekang
2	Pinrang	Kab. Pinrang, Kab. Sidenreng, Kab. Wajo, Kab. Soppeng
3	Barru	Kab. Barru
4	Pangkajene	Kab. Pangkajene dan Kab. Maros

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011



Sumber : Hasil Analisis, 2011

Gambar 2.26 Grafik Potensi Air Tanah WS Saddang



Sumber : Lampiran Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah

Gambar 2.27 Peta Cekungan Air Tanah di WS Saddang

4. Data Lahan Kritis

Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan baik yang berada di dalam maupun diluar kawasan hutan. Usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) salah satunya ditujukan untuk mengurangi atau menanggulangi lahan kritis di dalam DAS/sub DAS.

Penentuan kekritisan lahan berdasarkan pada metode penilaian lahan kritis dimana sasaran penilaiannya adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang berhubungan dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan lindung bagi hutan lindung dan fungsi lindung di luar kawasan hutan dan juga fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian.

Pada setiap fungsi lahan ditentukan kriteria/faktor pendukung yang terbagi kedalam beberapa kelas. Penilaian masing-masing kelas diberi bobot, besaran serta skoring. Jumlah total skor dikalikan bobot masing-masing merupakan kelas kekritisan lahan masing-masing kawasan.

DAS Saddang merupakan DAS dengan kondisi kritis terbesar, mencapai 1.110,69 km² kategori sangat kritis, 1.361 km² dan 2.059 km² kategori agak kritis. Hal tersebut menunjukkan potensi terancamnya ketersediaan air di DAS Saddang di masa yang akan datang. Langkah-langkah konservasi sangat diperlukan untuk revitalisasi kawasan hulu sehingga dapat menurunkan luasan lahan kritis. Lebih lengkapnya tentang tingkat kekritisan dan luasannya pada masing-masing DAS disajikan dalam Tabel 2.21. Sebaran lahan kritis pada masing-masing DAS disajikan dalam Gambar 2.28.

Tabel 2.21 Luas Lahan Kritis WS Saddang Tahun 2011

No	Nama DAS	Tingkat Kritis					Total Luas (Km ²)
		Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	
1	DAS Galanggalang	51,24	23,03	0,68	0,05	72,38	147,38
2	DAS Bungi/Kalobe	53,52	14,89	8,52	0,00	147,67	224,60
3	DAS Massila/Lemba	6,44	3,08	6,79	31,98	56,37	104,65
4	DAS Sadang	1.110,69	1.361,35	2.059,39	567,03	1.340,73	6.439,20
5	DAS Sibo	0,92	2,08	1,55	53,88	61,10	119,54
6	DAS Kariango	4,42	14,10	10,56	147,77	241,16	418,02
7	DAS Agalacange	0,41	5,48	6,39	3,33	4,35	19,97
8	DAS Jawijawi	4,23	7,43	13,39	0,92	22,04	48,01
9	DAS Karajae	35,74	17,40	6,57	0,04	45,94	105,69
10	DAS Bojo	12,70	1,65	1,84	0,00	17,73	33,92
11	DAS Pelapekae	2,69	0,05	1,85	0,05	11,24	15,87
12	DAS Kupa/Barru	13,86	0,02	0,38	0,02	3,65	17,93
13	DAS Jampue	25,29	9,63	3,57	0,06	98,65	137,20

No	Nama DAS	Tingkat Kritis					Total Luas (Km ²)
		Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	
14	DAS Lampoko	8,26	20,45	2,16	0,08	155,09	186,04
15	DAS Lakepo	10,22	7,40	1,16	0,20	82,60	101,58
16	DAS Binangae	13,43	15,05	0,63	0,01	77,17	106,29
17	DAS Lipukasi	133,31	80,74	8,75	0,01	145,53	368,35
18	DAS Matajang/Bungi	41,50	12,55	13,91	0,01	59,02	126,99
19	DAS Sageri	42,08	8,72	12,87	0,03	102,88	166,59
20	DAS Limbangan	0,82	1,66	1,93	0,61	91,63	96,64
21	DAS Labbakkang	0,27	5,02	0,27	0,27	72,39	78,23
22	DAS Pangkajene	177,84	37,71	27,56	0,01	196,94	440,06
23	DAS Sangkara	98,03	15,24	6,54	0,03	232,47	352,30
24	DAS Maronak	0,09	1,41	0,09	0,09	51,37	53,04
	total	1.848,02	1.666,13	2.197,36	806,48	3.390,10	9.908,09

Sumber : Analisis Lahan Kritis BPDAS Kementerian Kehutanan, Tahun 2014

5. Data Erosi dan Sedimentasi

Kegiatan ladang berpindah yang disertai dengan pembangunan permukiman di perbukitan dan kawasan hulu menyebabkan tingkat erosi di kawasan hulu semakin meningkat. Erosi yang terjadi di kawasan hulu berdampak pada sedimentasi yang terjadi di kawasan hilir, seperti sedimentasi yang terjadi di Sungai Mamasa. Sedimentasi yang terjadi di Sungai Mamasa mempengaruhi besaran debit air yang digunakan sebagai penggerak PLTA Bakar. Salah satu akibat dari hal tersebut adalah terganggunya pasokan listrik untuk Kota Makassar dan daerah lainnya di sekitar Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Data sedimentasi dan erosi yang terjadi pada beberapa sungai besar di WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.22.

**Tabel 2.22 Perhitungan Erosi dan Sedimentasi
Pada Sungai Besar di WS Saddang**

No	Sungai	Luas (Ha)	Erosi (ton/th/Ha)	Total Erosi (ton/th)	Sedimentasi (ton/th/Ha)	Total Sedimentasi (ton/th)	Tingkat Erosi
1	Mamasa	109.797,10	62,9	6.907.324,7	10,47	1.149.727,21	Sangat berat
2	Mappak	25.772,254	141,1	3.635.814,09	33,41	861.139,49	Sangat berat
3	Masupu	144.242,893	72,5	10.455.267,43	13,46	1.941.973,96	Sangat berat
4	Saddang	176.024.156	60,9	10.716.246,35	9,93	1.748.726,10	Sangat berat
5	Mata Allo	100.786,681	65,5	6.599.113,40	11,73	1.182.102,90	Sangat berat

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

6. Data Bencana Banjir

Banjir genangan di kawasan permukiman rutin terjadi setiap tahun di DAS Saddang. Berdasarkan data kejadian bencana banjir yang terjadi di WS Saddang, periode banjir terjadi 2 kali dalam setahun, dengan ketinggian genangan berkisar antara 1-2 meter, dan durasi 2-4 jam. Bencana banjir telah menyebabkan kerugian yang bervariasi, dengan nilai estimasi kerugian Rp. 500.000.000 rupiah hingga Rp. 24.000.000.000. Penanganan yang dilakukan umumnya bertujuan untuk jangka pendek, yaitu dengan membangun tanggul dari karung pasir untuk menahan air.

Data kejadian banjir WS Saddang dapat diperhatikan dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Data Kejadian Banjir di WS Saddang Tahun 2005-2009

No	Nama Sungai	Lokasi			Waktu Terjadi	Dampak Bencana/Kerugian			Taksiran Nilai Kerugian (x Rp. 1000)	Genangan		Tindakan Darurat Penanggulangan	Skala banjir	Ket.
		Desa/ kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota		Penduduk (KK)	Lahan (Ha) 1) Pemukiman; 2) Irigasi; 3) Perkebunan; 4) Perikanan	Insfrastruktur 1) Jalan (Km); 2) Jembatan; 3) Tanggul (m); 4) Saluran (m)		Luas (Ha)	Tinggi (Cm)			
1	Saddang	Salipolo, Bababinanga, Lasape, Mangki, Bakoko, Tanacica, Bulu-bulu	Cempa, Duampanua	Pinrang	March - Mei 2005	513 KK	1) 350 Ha 2) 500 Ha 4) 1.000 Ha	1) 10,5 km; 2) 1 Unit; 3) 530 m, 4) 5000 m	24.000.000	7.000 Ha	s/d 120	Pengamanan dengan bahan banjir	Lokal	± 2 Minggu Tergena ng
2	Jampue; Takkalasi; Mangkoso	Tuwu; Takkalasi; Madallo; Mangkoso; Kiru-Kiru	Barru; Balusu; Soppeng Riaja	Barru	28-Mar-06		2) 500 Ha	1) 70 m	1.000.000	750 Ha	s/d 100	Pengamanan dengan bahan banjir	Lokal	4 jam
3	Pangkajene, Sigeri	Tekolabua; Mappasaile; Pa'bundukang; Bontomate'ne; Segeri; Bawasalo	Pangkajene; Sigeri	Pangkep	29-Dec-06	± 75 KK	1) 25 Ha; 2) 500 Ha; 4) 142 Ha	1. 1,5 Km; 4. 1 km	5.000.000	691 Ha	s/d 100	Pengaman dengan bahan banjir	Lokal	3 jam
4	Saddang.		Pitumpanua, Duampanua ; Cempa	Pinrang	3-Apr-07	214 kk	1) 56 Ha	1) 4 Km	1.000.000	600 Ha	s/d 150	Pengamanan dengan bahan banjir	Lokal	6 jam
5	Mata Allo	Kota Enrekang	Jumpandang	Enrekang	11-Apr-07	50 KK	1) ± 20 Ha; 2) ± 400 Ha; 3) ± 40 Ha	1) 10,7 Km	500.000	±890	s/d 200	Tanggul darurat / karung berisi pasir	Lokal	3 hari
6	Saddang	Bababinanga, Cilellang; Babana	Duampanua; Cempa	Pinrang	19-Apr-08	20 kk	1) ± 6 Ha; 3) 50 Ha	3) 20 m	100.000	300 Ha	s/d 100	Tanggul darurat / karung berisi pasir	Lokal	4 jam

No	Nama Sungai	Lokasi			Waktu Terjadi	Dampak Bencana/Kerugian			Taksiran Nilai Kerugian (x Rp. 1000)	Genangan		Tindakan Darurat Penanggula- ngan	Skala banjir	Ket.
		Desa/ kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota		Penduduk (KK)	Lahan (Ha)	Insfrastruktur		Luas (Ha)	Tinggi (Cm)			
							1) Pemukiman; 2) Irigasi; 3) Perkebunan; 4) Perikanan	1) Jalan (Km); 2) Jembatan; 3) Tanggul (m); 4) Saluran (m)						
7	Saddang; Surame; Massila; Putti; Toriu; Tapparan		Saddang; Balusu; Tallunglipu; Rantepao; Kesu'; Makale Selatan; Rembon	Tana Toraja	20-Apr-08	250 kk	1. 200 Ha; 2. 1.656 Ha	1) 5 km; 2) 14 m	2.000.000	2.132 Ha	s/d 150	Pengamanan dengan bahan banjiran	Lokal	5 jam
8	Saddang	Lampa; Katomporang; Pekkabata; Babana; Tanralili	Duampanua	Pinrang	20-Nov-08	230 kk	1) ± 200 Ha; 2) ± 300 Ha; 3) ± 200 Ha	-	500.000	501	150	Pembersihan sampah di saluran/ sungai	Lokal	3 jam
9	Mata Allo; Saddang	Enrekang; Galonta; Lewaja	Jumpandang	Enrekang	20-Nov-08	500 kk	1) ± 10 Ha; 3) ± 200 Ha	-	50.000	900	s/d 100	Perkuatan tebing dengan karung pasir	Lokal	4 jam
10	Saddang; Embang	Kollo; Embang	Tondon	Rantepao	8 Mei 2009			4) 1.230 m rusak	500.000	500 Ha	s/d 150	Pengalihan Aliran Air	Lokal	
11	Saddang	Salipolo; Bababinanga	Cempa; Duampanua	Pinrang	29 s/d 31 Mei 2009	513 KK	1) 4 unit 2) 482,2 Ha 3) 330 Ha	1) 4 km 2) 1 unit 3) 530 m	24.000.000		s/d 120	Sosialisasi bahaya yang mengancam dan penga- manan insta- lasi listrik & penyerahan pakaian dan makanan pada korban bencana	Lokal	Telah 3 kali mengala mi banjir

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2010

7. Pantai Kritis

Letak WS Saddang bagian barat yang langsung berbatasan Selat Makassar membuat potensi abrasi menjadi besar. Pesisir kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Pare-Pare telah memiliki pantai yang terdampak abrasi. Berikut merupakan data pantai yang mengalami abrasi :

- Kabupaten Pinrang : Pantai Pallameang, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Wiringtasi, Pantai Labattoa, Pantai Pinrang;
- Kota Pare-Pare : Pantai Bojo;
- Kabupaten Pangkajene Kepulauan : Pantai Pangkep;
- Kabupaten Barru : Pantai Barru, Pantai Lapakka, Pantai Cilellang, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Patupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo; dan
- Kabupaten Polewali Mandar : Pantai Polewali

8. Data Kualitas Air

Dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan berbagai kegiatan diantaranya industri, beban polusi cenderung meningkat, sehingga kemampuan untuk pemurnian sendiri dari air permukaan yang menerima beban polusi yang meningkat ini akan terlampaui dan kualitas air akan menurun dengan cepat.

Oleh karena itu harus diketahui Status Mutu Air, yaitu tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik WS Saddang, dapat diketahui dengan cara mengevaluasi Kualitas Sumber Air, yaitu membandingkan kualitas air hasil pengukuran dengan Baku Mutu Air yang ditetapkan seperti Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003 atau Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001.

Penggolongan peruntukan air :

- a. Kelas I, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas II, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas III, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan

- d. Kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Berdasarkan 12 kali pemantauan kualitas air di Sungai Saddang dan 4 kali pemantauan kualitas air di Sungai Mamasa, kualitas air baku dalam WS Saddang masih memenuhi kriteria mutu air kelas II menurut Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003. Demikian juga air tanah yang diambil secara acak mulai dari Kabupaten Pinrang hingga Kabupaten Pangkajene Kepulauan menunjukkan hasil pencemaran pestisida telah mulai terjadi di DI Saddang Kabupaten Pinrang dan Sidengreng Rappang.

Hasil analisis kualitas air baku pada Sungai Saddang yang pernah dilakukan disajikan dalam Tabel 2.24 sampai dengan Tabel 2.27

Tabel 2.24 Hasil Analisis Kualitas Air Baku Sungai Saddang

Lokasi : Bendung Benteng					
Kabupaten : Pinrang					
DAS/WS : Saddang / Saddang					
Koordinat : 119°40'46" BT 03°41'02" LS					
Tahun : 2009					

No	Waktu & Parameter	Hasil Pengukuran & Pengujian			Batas Maksimum
		5 Mei	12 Agut	5 Des	
	Tanggal	5 Mei	12 Agut	5 Des	
	Jam	13:05	17:00	12:35	
A.	FISIKA				
	Daya Hantar Listrik (DHL) *) mmhos/cm	0,17	0,19	0,15	1500
	Kekeruhan *) NTU	230	26	130	15
	Temperatur Air *) °C	27	29	28	deviasi 3
	Kegaraman *) ppt	-	-	-	-
	Warna (color) *)	325	50	240	25
	Zat Padat terlarut (TDS) **) mg/L	254	236	210	800
	Zat Pada tersuspensi (TSS) **) mg/L	34,75	17,48	98,0	50
	Zat Organik **) mg/L	7,9	6,32	1,92	20
B.	KIMIA				
	pH *)	9,2	10,4	10,2	6-8.5
	Oksigen Terlarut (DO) *) mg/L O ₂	5,4	5,7	4,2	dianjurkan ≥ 6
	Keb. O ₂ Biokimia (BOD) **) mg/L N	7,78	5,06	4,34	2
	Keb. O ₂ Kimiawi (COD) **)	19,96	12,64	10,86	10

No	Waktu & Parameter	Hasil Pengukuran &			Batas Maksimum
		Pengujian			
	mg/L				
	Nitrat Nitrogen (NO ₃ ⁻¹) *) mg/L	-	-		10
	Nitrat Nitrogen (NO ₂ ⁻¹) *) mg/L N	-	-	-	0
	Phosphat terlarut *) mg/L SO ₂	-	-	-	0,2
	Sulfat (SO ₄) mg/L SO ₄	-	-	-	400
	Flouride (F) *)	-	-	-	0,5
	Besi (Non LR) mg Fe/L *) mg Fe/L	-	-	-	0,3
	Mangan *) mg Mn/L	-	-	-	0,1
C.	MIKROBIOLOGI				
	Fecal Coloform	-	-	-	100
	Total Coliform	-	-	-	1.000
D.	DEBIT ALIRAN				
	MA. = m	-	-	-	
	Q = m³/der.	-	-	-	

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2010

Keterangan :

tt = Tidak terdeteksi

- = Tidak diperiksa

*) = Diperiksa dilapangan

**) = Diperiksa dilaboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Baku mutu air untuk golongan I sesuai SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003

Tabel 2.25 Hasil Analisa Kualitas Air Baku Sungai Saddang

Lokasi	: Saddang Batu-Batu / Jemb. Lasape
Kabupaten	: Pinrang
DAS/WS	: Saddang / Saddang
Koordinat	: 119°40'46" BT 03°41'02" LS
Tahun	: 2009

No	Waktu & Parameter	Hasil Pengukuran &			Batas Maksimum
		Pengujian			
	Tanggal	5 Mei	12 Agut	5 Des	
	Jam	18:35	18:35	18:15	
A.	FISIKA				
	Daya Hantar Listrik (DHL) *) mmhos/cm	0,17	0,20	0,15	1500
	Kekeruhan *) NTU	210	8	125	15
	Temperatur Air *) °C	27	30	28	deviasi 3

No	Waktu & Parameter	Hasil Pengukuran &			Batas Maksimum
		Pengujian			
	Kegaraman *) ppt	-	-	-	-
	Warna (color) *)	395	30	230	25
	Zat Padat terlarut (TDS) **) mg/L	359	348	184	800
	Zat Pada tersuspensi (TSS) **) mg/L	35,65	14,74	75,0	50
	Zat Organik **) mg/L	10,74	9,48	1,84	20
B.	KIMIA				
	pH *)	9,3	10,5	10,2	6-8.5
	Oksigen Terlarut (DO) *) mg/L O ₂	4,7	4,2	5,0	dianjurkan ≥ 6
	Keb. O ₂ Biokimia (BOD) **) mg/L N	9,82	8,22	3,96	2
	Keb. O ₂ Kimiawi (COD) **) mg/L	22,48	18,96	9,92	10
	Nitrat Nitrogen (NO ₃ ⁻¹) *) mg/L	-	-	-	10
	Nitrat Nitrogen (NO ₂ ⁻¹) *) mg/L N	-	-	-	0
	Phosphat terlarut *) mg/L SO ₂	-	-	-	0,2
	Sulfat (SO ₄) mg/L SO ₄	-	-	-	400
	Flouride (F) *)	-	-	-	0,5
	Besi (Non LR) mg Fe/L *) mg Fe/L	-	-	-	0,3
	Mangan *) mg Mn/L	-	-	-	0,1
C.	MIKROBIOLOGI				
	Fecal Coloform	-	-	-	100
	Total Coliform	-	-	-	1.000
D.	DEBIT ALIRAN				
	MA. = m	3,10	1,35	1,80	
	Q = m³/der.	678,15	90,95	115,16	

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2010

Keterangan :

tt = Tidak terdeteksi

- = Tidak diperiksa

*) = Diperiksa dilapangan

**) = Diperiksa dilaboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Baku mutu air untuk golongan I sesuai SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003

Tabel 2.26 Hasil Analisa Kualitas Air Baku Sungai Saddang

Lokasi	: Bendung Benteng
Kabupaten	: Pinrang
DAS/WS	: Saddang / Saddang
Koordinat	: 119°40'46" BT 03°41'02" LS
Tahun	: 2010

No	Waktu & Parameter	Hasil Pengukuran & Pengujian				Batas Maksimum
		9 Maret	24 Juli	30 Okt	28 Des	
	Tanggal	9 Maret	24 Juli	30 Okt	28 Des	
	Jam	13:05	17:00	12:35	12:40	
A.	FISIKA					
	Daya Hantar Listrik (DHL) *) mmhos/cm	0,17	0,10	0,16	0,17	1500
	Kekeruhan NTU *)	76	160	300	35	15
	Temperatur Air °C *)	27,5	27,5	26	25	Suhu Udara ± 5° C
	Kegaraman ppt *)	-	-	-	-	-
	Warna (color) *)	110	195	230	30	25
	Zat Padat terlarut (TDS) mg/L **)	210	375	56	62,3	10000
	Zat Pada tersuspensi (TSS) mg/L **)	42,1	118,5	175,8	84	30
	Zat Organik mg/L **)	4,22	5,16	3,16	3,16	20
B.	KIMIA					
	pH *)	8,4	8,1	7,9	7,7	5 - 9
	Oksigen Terlarut (DO) mg/L O ₂ *)	4,6	4,6	6,0	6,6	Dianjurkan ≥ 6
	Keb. O ₂ Biokimia (BOD) mg/L N **)	5,18	5,83	4,72	5,27	-
	Keb. O ₂ Kimiawi (COD) mg/L **)	12,96	14,48	11,80	12,9	-
	Nitrat Nitrogen (NO ₃ ⁻¹) mg/L *)	-	-	-	-	10,0
	Nitrat Nitrogen (NO ₂ ⁻¹) mg/L N *)	-	-	-	-	1,00
	Phosphat terlarut mg/L SO ₂ *)	-	-	-	-	
	Sulfat (SO ₄) mg/L SO ₄	-	-	-	-	400
	Flouride (F) *)	-	-	-	-	1
	Besi (Non LR) mg Fe/L *) mg Fe/L	-	-	-	-	3
	Mangan mg Mn/L *)	-	-	-	-	0,5
C.	MIKROBIOLOGI					
	Fecal Coloform	-	-	-	-	2000
	Total Coliform	-	-	-	-	10,000

No	Waktu & Parameter	Hasil Pengukuran &				Batas Maksimum
		Pengujian				
D.	DEBIT ALIRAN					
	MA. = m	0,05	2,11	2,20	1,38	
	Q = m³/der.	-	-	-	-	

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2010

Keterangan :

tt = Tidak terdeteksi

- = Tidak diperiksa

*) = Diperiksa dilapangan

**) = Diperiksa dilaboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Baku mutu air untuk golongan I sesuai SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003

Tabel 2.27 Hasil Analisa Kualitas Air Baku Sungai Saddang

Lokasi	: Saddang Batu-Batu / Jemb. Lasape
Kabupaten	: Pinrang
DAS/WS	: Saddang / Saddang
Koordinat	:
Tahun	: 2010

No	Waktu & Parameter	Hasil Pengukuran &				Batas Maksimum
		Pengujian				
	Tanggal	9 Mar	24 Juli	30 Okt	28 Des	
	Jam	13:55	17:58	11:30	12:05	
A.	FISIKA					
	Daya Hantar Listrik (DHL) *) mmhos/cm	0,14	0,20	0,16	0,18	1500
	Kekeruhan *) NTU	TT	110	270	TT	15
	Temperatur Air *) °C	26,0	26,5	25,3	25,2	Suhu Udara ± 5° C
	Kegaraman *) ppt	-	-	-	-	-
	Warna (color) *)	455	195	150	TT	25
	Zat Padat terlarut (TDS) **) mg/L	420	324	57,6	628	10000
	Zat Pada tersuspensi (TSS) **) mg/L	175	71,03	185,6	146	30
	Zat Organik **) mg/L	6,32	4,74	3,16	4,74	20
B.	KIMIA					
	pH *)	8,3	8,2	7,8	7,6	5 - 9
	Oksigen Terlarut (DO) *) mg/L O ₂	5,0	4,7	9,1	10,5	Dianjurkan ≥ 6
	Keb. O ₂ Biokimia (BOD) **) mg/L N	5,84	4,99	4,96	5,21	-
	Keb. O ₂ Kimiawi (COD) **) mg/L	14,6	12,48	12,4	13,02	-

No	Waktu & Parameter	Hasil Pengukuran & Pengujian				Batas Maksimum
	Nitrat Nitrogen (NO_3^{-1}) *) mg/L	-	-	-	-	10,0
	Nitrat Nitrogen (NO_2^{-1}) *) mg/L N	-	-	-	-	1,00
	Phosphat terlarut *) mg/L SO_2	-	-	-	-	
	Sulfat (SO_4) mg/L SO_4	-	-	-	-	400
	Flouride (F) *)	-	-	-	-	1
	Besi (Non LR) mg Fe/L *) mg Fe/L	-	-	-	-	3
	Mangan *) mg Mn/L	-	-	-	-	0,5
C.	MIKROBIOLOGI					
	Fecal Coloform	-	-	-	-	2000
	Total Coliform	-	-	-	-	10,000
D.	DEBIT ALIRAN					
	MA. = m	3,75	2,2	3,3	1,95	
	Q = $\text{m}^3/\text{der.}$	488,17	419,11	701,106	275,66	

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2010

Keterangan :

tt = Tidak terdeteksi

- = Tidak diperiksa

*) = Diperiksa dilapangan

**) = Diperiksa dilaboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Baku mutu air untuk golongan I sesuai SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003

9. Data Kebutuhan Air

Neraca air dimaksudkan sebagai keseimbangan antara ketersediaan air yang merupakan produk dari karakter DAS dan karakter iklim di suatu DAS dengan berbagai macam kebutuhan (air yang dibutuhkan untuk pertanian, tambak dan kolam ikan, peternakan, rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI), air untuk pertambangan, untuk menjaga kualitas air di sungai (pemeliharaan sungai), untuk menjaga lingkungan ekosistem lahan basah dan sebagainya.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian masyarakat, maka kebutuhan air untuk berbagai sektor juga terus meningkat. Dari kebutuhan air WS Saddang meliputi :

1) Kebutuhan Air Untuk Rumah Tangga, Perkotaan, dan Industri

Kebutuhan air untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri WS Saddang pada saat ini disuplai dari air PDAM, air tanah, mata air dan sumber air-sumber air yang lain. Tingkat pelayanan PDAM di wilayah studi terbilang masih rendah, dan diharapkan tingkat

pelayanan PDAM di wilayah studi dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya bangunan-bangunan prasarana pengairan di WS Saddang.

Kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dihitung berdasarkan jumlah penduduk di kabupaten/kota yang ada di WS Saddang. Total kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan WS Saddang adalah sebesar 4,884 m³/detik, yang terdiri dari 3,757 m³/detik untuk rumah tangga, dan 1,127 m³/detik untuk perkotaan, sementara untuk industri angka kebutuhan adalah sebesar 0,344 m³/detik, sehingga total kebutuhan RKI menjadi 5,228 m³/detik. Kebutuhan paling besar terdapat di WS Saddang yang merupakan wilayah sungai terluas di WS Saddang. Lebih lengkapnya tentang kebutuhan air RKI WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan

No	Nama DAS	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rumah Tangga dan Perkotaan (m ³ /detik)	Industri (m ³ /detik)	Total
1	DAS Galanggalang	39.865	0,094	0,007	0,101
2	DAS Bungi	17.880	0,042	0,003	0,045
3	DAS Massila	16.907	0,040	0,003	0,043
4	DAS Saddang	904.880	2,140	0,151	2,291
5	DAS Sibbo	30.879	0,073	0,005	0,078
6	DAS Kariango	207.310	0,490	0,035	0,525
7	DAS Agalacange	8.193	0,019	0,001	0,021
8	DAS Jawijawi	93.650	0,222	0,016	0,237
9	DAS Karajae	90.206	0,213	0,015	0,228
10	DAS Bojo	10.638	0,025	0,002	0,027
11	DAS Pelapekae	1.857	0,004	0,000	0,005
12	DAS Kupa	2.095	0,005	0,000	0,005
13	DAS Jampue	33.763	0,080	0,006	0,085
14	DAS Lampoko	33.270	0,079	0,006	0,084
15	DAS Lakepo	20.333	0,048	0,003	0,051
16	DAS Binangae	23.185	0,055	0,004	0,059
17	DAS Lipukasi	51.376	0,122	0,009	0,130
18	DAS Matajang	36.921	0,087	0,006	0,093
19	DAS Sageri	36.803	0,087	0,006	0,093
20	DAS Limbangan	36.063	0,085	0,006	0,091
21	DAS Labbakkang	34.814	0,082	0,006	0,088
22	DAS Pangkajene	117.759	0,279	0,020	0,298
23	DAS Sangkara	162.899	0,385	0,027	0,412
24	DAS Maronak	53.208	0,126	0,009	0,135
Total		2.064.752	4,884	0,344	5,228

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

2) Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi ditentukan oleh faktor luas tanam, pola tanam yang digunakan, dan iklim yang mempengaruhi DI. Terdapat luas irigasi sebesar 165.669,03 km² dengan ragam kewenangan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Luasan daerah irigasi dan kebutuhann air irigasi setiap bulan sepanjang tahun di WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Kebutuhan Air Irigasi pada WS Saddang

No	Nama DAS	Luas DI (km ²)	Bulan (m ³ /dt)												Rerata (m ³ /dt)
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Galanggalang	748,2	0,83	0,98	0,98	0,66	0,92	1,01	0,91	0,60	0,33	0,27	0,44	0,24	0,68
2	Bungi	1.243,9	1,37	1,64	1,63	1,10	1,53	1,68	1,52	1,00	0,55	0,46	0,73	0,40	1,13
3	Massila	575,7	0,64	0,76	0,76	0,51	0,71	0,78	0,70	0,46	0,26	0,21	0,34	0,19	0,52
4	Saddang	107.643,7	118,92	141,62	141,23	94,88	132,23	145,42	131,44	86,22	47,81	39,43	62,82	34,66	98,06
5	Sibo	643,9	0,71	0,85	0,84	0,57	0,79	0,87	0,79	0,52	0,29	0,24	0,38	0,21	0,59
6	Kariango	2.303,5	2,54	3,03	3,02	2,03	2,83	3,11	2,81	1,85	1,02	0,84	1,34	0,74	2,10
7	Agalacange	111,4	0,12	0,15	0,15	0,10	0,14	0,15	0,14	0,09	0,05	0,04	0,07	0,04	0,10
8	Jawijawi	2.244,3	2,48	2,95	2,94	1,98	2,76	3,03	2,74	1,80	1,00	0,82	1,31	0,72	2,04
9	Karajae	9.929,7	10,97	13,06	13,03	8,75	12,20	13,41	12,12	7,95	4,41	3,64	5,79	3,20	9,05
10	Bojo	281,2	0,31	0,37	0,37	0,25	0,35	0,38	0,34	0,23	0,12	0,10	0,16	0,09	0,26
11	Pelapekae	147,1	0,16	0,19	0,19	0,13	0,18	0,20	0,18	0,12	0,07	0,05	0,09	0,05	0,13
12	Kupa	165,9	0,18	0,22	0,22	0,15	0,20	0,22	0,20	0,13	0,07	0,06	0,10	0,05	0,15
13	Jampue	2.387,6	2,64	3,14	3,13	2,10	2,93	3,23	2,92	1,91	1,06	0,87	1,39	0,77	2,17
14	Lampoko	1.631,2	1,80	2,15	2,14	1,44	2,00	2,20	1,99	1,31	0,72	0,60	0,95	0,53	1,49
15	Lakepo	933,4	1,03	1,23	1,22	0,82	1,15	1,26	1,14	0,75	0,41	0,34	0,54	0,30	0,85
16	Binangae	957,3	1,06	1,26	1,26	0,84	1,18	1,29	1,17	0,77	0,43	0,35	0,56	0,31	0,87
17	Lipukasi	3.395,2	3,75	4,47	4,45	2,99	4,17	4,59	4,15	2,72	1,51	1,24	1,98	1,09	3,09
18	Matajang	1.865,2	2,06	2,45	2,45	1,64	2,29	2,52	2,28	1,49	0,83	0,68	1,09	0,60	1,70
19	Segeri	2.790,8	3,08	3,67	3,66	2,46	3,43	3,77	3,41	2,24	1,24	1,02	1,63	0,90	2,54
20	Limbangan	2.069,7	2,29	2,72	2,72	1,82	2,54	2,80	2,53	1,66	0,92	0,76	1,21	0,67	1,89
21	Labbakang	4.251,7	4,70	5,59	5,58	3,75	5,22	5,74	5,19	3,41	1,89	1,56	2,48	1,37	3,87
22	Pangkajene	13.989,4	15,45	18,41	18,35	12,33	17,18	18,90	17,08	11,20	6,21	5,12	8,16	4,50	12,74
23	Sangkara	4.997,4	5,52	6,57	6,56	4,40	6,14	6,75	6,10	4,00	2,22	1,83	2,92	1,61	4,55
24	Maronak	361,4	0,40	0,48	0,47	0,32	0,44	0,49	0,44	0,29	0,16	0,13	0,21	0,12	0,33
	WS Saddang	165.669,03	183,02	217,96	217,36	146,03	203,50	223,80	202,29	132,69	73,58	60,69	96,68	53,35	150,91

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 293 KPT/M/2014 tentang Daerah Irigasi Yang Pengelolaan Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota, 2014; Hasil Analisis, Tahun 2013

3) Kebutuhan Air Untuk Peternakan

Peternakan merupakan sektor yang menempati urutan kedua sebagai sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan setelah pertanian. Seperti halnya pertanian, sektor peternakan sangat membutuhkan suplai air yang cukup untuk terus berkembang, terutama untuk kebutuhan minum ternak. Kebutuhan air untuk peternakan dalam dokumen ini dihitung berdasarkan jumlah populasi ternak. Jenis populasi ternak dibedakan menjadi ternak besar, yang terdiri dari sapi potong, sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Ternak kecil (unggas) yang terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik/itik manila.

Keberadaan KAPET Pare-Pare yang salah satu fokusnya adalah sektor peternakan menyebabkan kebutuhan air untuk peternakan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Suplai air sangat vital bagi pengembangan KAPET Pare-Pare di masa yang akan datang.

Hasil perhitungan yang dilakukan terhadap data jumlah populasi ternak (BPS, Tahun 2013) di WS Saddang mencapai 904.988 ekor untuk ternak besar, dan 6.970.656 untuk ternak kecil. Total kebutuhan air peternakan di sektor peternakan di WS Saddang adalah sebesar 0,508 m³/detik. Perhitungan kebutuhan air ternak di WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Kebutuhan Air Untuk Peternakan WS Saddang

No	Kabupaten/Kota	Hewan Besar	Hewan Kecil	Kebutuhan (m ³ /detik)
1	Pangkajene Kepulauan	77.595	461.148	0,036
2	Barrau	57.607	1.525.638	0,095
3	Enrekang	81.124	620.623	0,045
4	Pinrang	71.198	2.994.532	0,182
5	Tana Toraja	298.783	493.428	0,063
6	Toraja Utara	304.509	354.476	0,056
7	Pare-Pare	14.172	520.811	0,032
Total		904.988	6.970.656	0,508

Sumber : BPS Kabupaten/Kota dan Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013 dan Hasil Analisis, Tahun 2013

10. Neraca Air

Perencanaan pengelolaan sumber daya air memerlukan data dan informasi mengenai ketersediaan dan kebutuhan air yang disajikan dalam neraca air. Neraca air adalah analisis kondisi ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air adalah jumlah air yang tersedia pada sumber air, sedangkan kebutuhan air adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk berbagai penggunaan.

Ketersediaan air pada dasarnya terdiri atas tiga jenis, yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. Dalam pengelolaan alokasi air, air hujan berkontribusi untuk mengurangi kebutuhan air irigasi yaitu dalam bentuk hujan efektif. Air hujan yang ditampung dengan baik juga dapat menjadi sumber air yang cukup berarti untuk keperluan rumah tangga. Sumber air utama dalam pengelolaan alokasi air adalah sumber air permukaan dalam bentuk air di sungai, saluran, danau, dan tampungan lainnya. Penggunaan air tanah kenyataannya sangat membantu pemenuhan kebutuhan air baku maupun air irigasi pada daerah yang sulit mendapatkan air permukaan, akan tetapi keberlanjutannya perlu dijaga dengan pengambilan yang terkendali di bawah debit aman (*safe yield*).

Neraca air eksisting untuk keseluruhan WS Saddang Tahun 2013 disajikan pada Tabel 2.31. Grafik neraca air eksisting di WS Saddang Tahun 2013 ditampilkan dalam Gambar 2.29. Neraca air DAS Saddang sebagai DAS yang memiliki potensi air terbesar ditampilkan dalam Tabel 2.32 dan Gambar 2.31. Selanjutnya disajikan skema sistem sungai di WS Saddang kondisi eksisting tanpa ada upaya pemenuhan ketersediaan air yang ditampilkan dalam Gambar 2.32.

Tabel 2.31 Neraca Air Eksisting WS Saddang

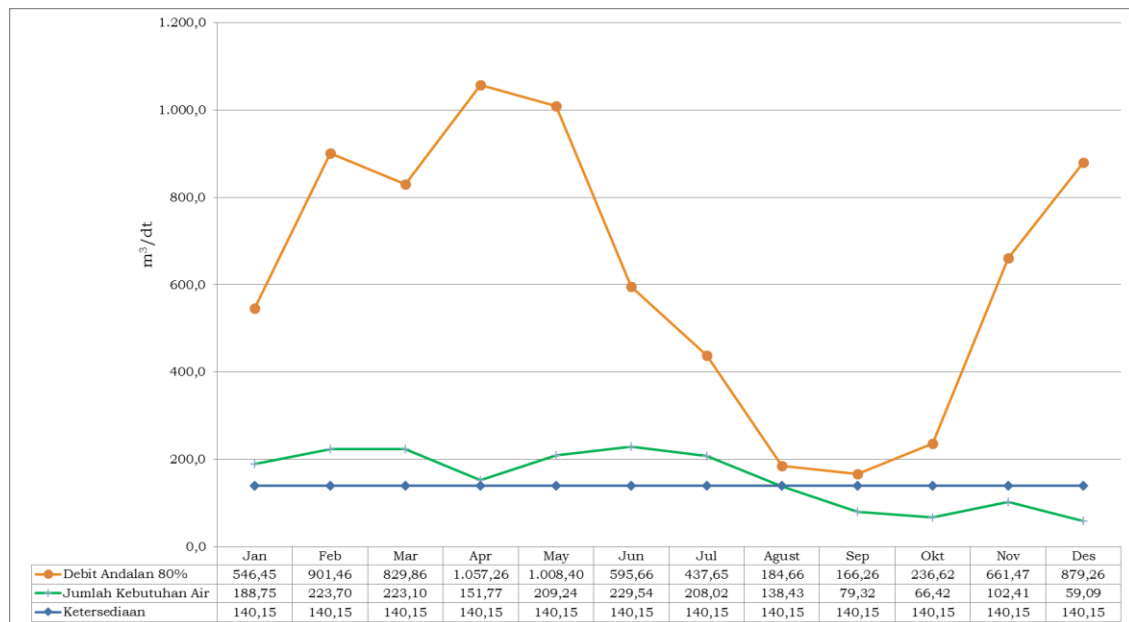
Keterangan	Bulan (m ³ /dt)												Rata-rata
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	(m ³ /dt)
Kebutuhan Air :													
- Irigasi	183,02	217,96	217,36	146,03	203,50	223,80	202,29	132,69	73,58	60,69	96,68	53,35	150,91
- Rumah Tangga dan Perkotaan	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
- Industri	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
- Peternakan	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Jumlah Kebutuhan Air	188,75	223,70	223,10	151,77	209,24	229,54	208,02	138,43	79,32	66,42	102,41	59,09	156,65
Debit Andalan 80%	546,45	901,46	829,86	1.057,26	1.008,40	595,66	437,65	184,66	166,26	236,62	661,47	879,26	625,42
Ketersediaan	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15	140,15

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Tabel 2.32 Neraca Air Eksisting DAS Saddang

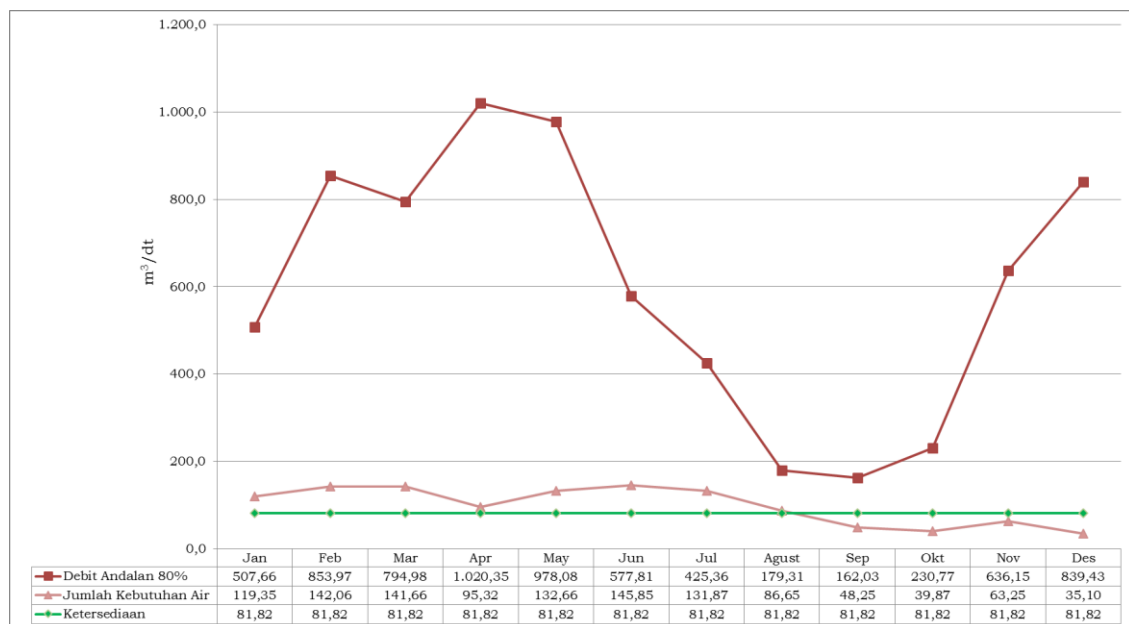
Keterangan	Bulan (m3/dt)												Rata-rata
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	(m3/dt)
Kebutuhan Air :													
- Irigasi	118,92	141,62	141,23	94,88	132,23	145,42	131,44	86,22	47,81	39,43	62,82	34,66	98,06
- Rumah Tangga	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- Perkotaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- Industri	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- Peternakan	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Jumlah Kebutuhan Air	119,35	142,06	141,66	95,32	132,66	145,85	131,87	86,65	48,25	39,87	63,25	35,10	98,49
Debit Andalan 80%	507,66	853,97	794,98	1.020,35	978,08	577,81	425,36	179,31	162,03	230,77	636,15	839,43	600,49
Ketersediaan	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013



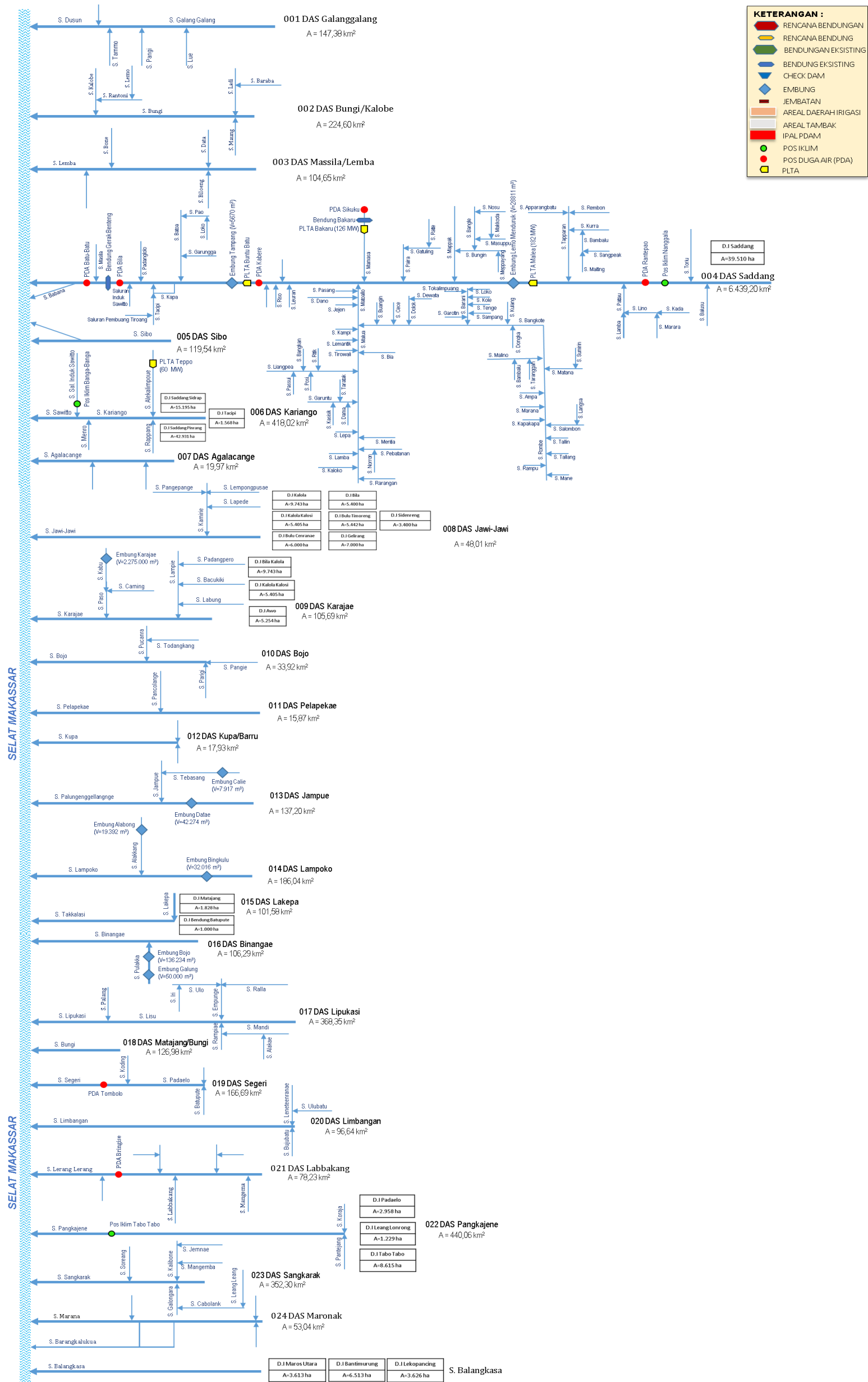
Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 2.29 Grafik Neraca Air Eksisting WS Saddang Tahun 2013



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 2.30 Grafik Neraca Air Eksisting DAS Saddang Tahun 2013



Sumber : Hasil analisis, Tahun 2013

Gambar 2.31 Skema Sistem Sungai Eksisting WS Saddang

2.3.3 Data Sosial dan Ekonomi

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di WS Saddang

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, jumlah penduduk yang terdapat di WS Sadang pada Tahun 2013 berjumlah sebesar 2.064.752 jiwa, dengan kepadatan sebesar 208 jiwa/km². DAS dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu DAS Saddang dengan total penduduk mencapai 904.880 jiwa. DAS dengan penduduk terpadat yaitu DAS Jawijawi dengan kepadatan sebesar 1.951 jiwa/km². Data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk masing-masing DAS disajikan dalam Tabel 2.30.

Tabel 2.33 Jumlah dan Kepadatan Penduduk WS Saddang Tahun 2012

No	Nama DAS	Luas (km2)	Jumlah Penduduk Tahun 2013 (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	DAS Galanggalang	147,38	39.865	270
2	DAS Bungi	224,6	17.880	80
3	DAS Massila	104,65	16.907	162
4	DAS Sadang	6.439,20	904.880	141
5	DAS Sibo	119,54	30.879	258
6	DAS Kariango	418,02	207.310	496
7	DAS Agalacange	19,97	8.193	410
8	DAS Jawijawi	48,01	93.650	1951
9	DAS Karajae	105,69	90.206	854
10	DAS Bojo	33,92	10.638	314
11	DAS Pelapekae	15,87	1.857	117
12	DAS Kupa	17,93	2.095	117
13	DAS Jampue	137,2	33.763	246
14	DAS Lampoko	186,04	33.270	179
15	DAS Lakepo	101,58	20.333	200
16	DAS Binangae	106,29	23.185	218
17	DAS Lipukasi	368,35	51.376	140
18	DAS Matajang	126,99	36.921	291
19	DAS Sageri	166,59	36.803	221
20	DAS Limbangan	96,64	36.063	373
21	DAS Labbakkang	78,23	34.814	445
22	DAS Pangkajene	440,06	117.759	268
23	DAS Sangkara	352,3	162.899	462
24	DAS Maronak	53,04	53.208	1003
	Total	9.908,09	2.064.752	208

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka, Tahun 2013; dan Hasil analisis, Tahun 2013

2. Pertumbuhan ekonomi WS Saddang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat untuk menilai kemajuan ekonomi suatu daerah secara makro. Secara teknis PDRB didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di suatu wilayah.

Berdasarkan data Sulawesi Selatan Dalam Angka dan Sulawesi Barat Dalam Angka, sektor pertanian merupakan penyumbang utama bagi PDRB provinsi. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian WS Saddang adalah 7,08% pertahun.

Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten yang masuk dalam WS Saddang disajikan dalam Tabel 2.30. Kabupaten Pangkajene Kepulauan memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi, mencapai 8,03% pertahun, sedangkan kabupaten dengan laju pertumbuhan relatif rendah adalah Kabupaten Enrekang, sebesar 6,16% tahun.

Tabel 2.34 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di WS Saddang

No	Kabupaten	PDRB Tahun 2009 (juta rupiah)	PDRB Tahun 2010 (juta rupiah)	PDRB Tahun 2011 (juta rupiah)	PDRB Tahun 2012 (juta rupiah)	Laju Tahun 2009 - Tahun 2010 (%)	Laju Tahun 2010 - Tahun 2011 (%)	Laju Tahun 2011 - Tahun 2012 (%)	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	2.369,77	2.519,98	2.751,14	3.015,46	6,15	8,78	9,17	8,03
2	Kabupaten Barru	685,03	729,81	783,93	844,80	6,33	7,15	7,48	6,99
3	Kabupaten Sidrap	1.459,40	1.524,36	1.704,53	1.847,21	4,35	11,17	8,04	7,86
4	Kabupaten Pinrang	2.384,28	2.532,60	2.713,03	2.937,28	6,03	6,88	7,94	6,95
5	Kabupaten Enrekang	716,02	751,76	803,66	861,34	4,87	6,68	6,93	6,16
6	Kabupaten Tana Toraja	623,23	662,58	714,82	772,84	6,12	7,59	7,80	7,17
7	Kabupaten Toraja Utara	641,94	686,87	741,17	803,97	6,77	7,61	8,13	7,50
8	Kota Pare-Pare	708,23	766,69	826,49	891,92	7,93	7,51	7,62	7,69
	Total	9.587,90	10.174,65	11.038,77	11.974,82	6,07	7,92	7,89	7,29

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka, Tahun 2013; dan Hasil analisis, Tahun 2013

2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan

a. Aspek konservasi sumber daya air

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPDAS Saddang Tahun 2010, ± 72.832 Ha hutan yang berada di hulu DAS Saddang mengalami kerusakan akibat kegiatan alih fungsi lahan yang kurang terkendali. Total lahan kritis di WS Saddang berdasarkan data BPDAS Saddang Tahun 2030 mencapai 1.848,02 km² untuk kategori sangat kritis, dan 1.666,13 km² untuk kategori kritis.

b. Aspek pendayagunaan sumber daya air

- Permasalahan yang terjadi adalah mengenai metoda permintaan alokasi air antar instansi. Ranting Dinas meminta sejumlah alokasi air kepada Cabang Dinas, untuk mengairi wilayahnya. Namun permintaan alokasi ini tidak direncanakan maupun tidak dijadwalkan, dengan pertimbangan karena air yang tersedia cukup besar (debit rata-rata di Bendung Benteng adalah 291 m³/dt). Selain itu, permintaan alokasi air yang besar disimpan untuk memenuhi kebutuhan penyiapan lahan selama 3 bulan. Papan duga yang seharusnya menjadi pengontrol pada lokasi tersebut, saat ini tidak lagi akurat, karena persamaan kurva liku debit yang belum dilakukan penyesuaian ulang;
- Permasalahan kurangnya dana pemeliharaan merupakan hal yang seringkali terjadi di lingkungan Ranting Dinas dan besarnya biaya ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Kemungkinan dana ini dapat dialokasikan oleh tiap-tiap instansi pengguna, sehingga diperlukan koordinasi antar instansi dalam Provinsi untuk menyelesaikan hal ini;
- Pemenuhan suplai air baku ke PDAM dan IKK (Ibu Kota Kecamatan) daerah masih relatif kecil, terutama di Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pangkajene Kepulauan diperlukan penambahan kapasitas dan perluasan distribusi air minum serta pembangunan prasarana penyedia air baku;
- Kebutuhan air baku untuk irigasi dan air bersih belum terpenuhi pada musim kemarau sehingga diperlukan pembangunan waduk;
- Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana sumber daya air di WS Saddang belum memadai (terutama di Bendung Benteng, DI Saddang dan DI Tabo-Tabo); dan
- Masih kurangnya pasokan listrik, terutama di kawasan wisata Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara;

c. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Permaalahan banjir, abrasi pantai, dan tanah longsor merupakan potensi bencana yang terdapat di WS Saddang. Banjir sering terjadi di bagian tengah dan hilir DAS (Sungai Saddang Hilir dan Sungai Mataallo di Kabupaten Enrekang) akibat tingginya *run-off* dari hulu, dan sedimentasi yang terjadi di sungai. Abrasi pantai terjadi di pantai barat Selat Makassar, terutama di pesisir pantai Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, dan Kota Pare-Pare. Kabupaten Mamasa, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang dan Pangkajene Kepulauan sering terjadi bencana longsor karena elevasi lahannya yang bergelombang hingga curam. Belum adanya sistem peringatan dini, maupun rencana tindakan darurat untuk setiap potensi bencana yang terjadi merupakan kendala yang menyebabkan potensi kerugian masih cukup tinggi.

d. Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

Saat ini di WS Saddang terdapat beberapa instansi pengelola sumber daya air yang memiliki dan mengelola informasi pengelolaan sumber daya air. Meskipun ditangani oleh beberapa instansi, terdapat beberapa kendala yang masih ada terkait dengan informasi sumber daya air, diantaranya :

- Data/informasi sumber daya air masih sulit untuk didapatkan/diakses;
- Data/informasi sumber daya air belum lengkap/belum tersedia;
- Data/informasi sumber daya air yang sama ditangani oleh instansi yang berbeda-beda;
- Kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola data dan informasi sumber daya air;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pencatat, penyimpan data/ informasi, pengelola data/informasi dan penyebarluasan data/informasi sumber daya air;
- Informasi sumber daya air belum tersedia cukup, baik kualitas maupun kuantitas. Akses terhadap data dan informasi masih sulit;
- Jumlah stasiun hidrologi, stasiun hujan, dan pos pengukur debit (AWLR) masih belum mencukupi. Kendala lainnya yaitu pada teknologi penyimpanan data yang umumnya masih dioperasikan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan; dan
- Belum adanya koordinasi antar pengelola data dari berbagai instansi yang menangani data dan informasi sumber daya air

e. Aspek Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha

- Wadah Koordinasi pengelolaan sumber daya air sudah terbentuk namun masih perlu penguatan;
- Kegiatan P3A, GP3A dan IP3A belum berfungsi secara efektif;
- partisipasi masyarakat masih rendah dan masih kurangnya kemampuan manajemen serta finansial;
- Belum signifikannya aktifitasnya Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang selanjutnya disebut GNKPA; dan
- Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengelolaan sumber daya air

2.5 Identifikasi Potensi Yang Dapat Dikembangkan

2.5.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air

- a. Penghutan kembali pada lahan yang sangat kritis dan kritis untuk mengurangi laju erosi seluas 66.100 Ha pada hulu DAS Saddang;
- b. Penataan ulang tataguna lahan;
- c. Pembangunan bangunan konservasi tanah dan air; dan
- d. Konservasi kawasan pantai Barat WS Saddang (pesisir pantai Selat Makassar antara pesisir pantai di Kota Pare-Pare – Kabupaten Pangkajene Kepulauan sepanjang 10 km)

2.5.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

1. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada tahun 2013, masih terdapat potensi air yang sangat besar yang dapat dikembangkan sebesar 16,53 milyar m³/tahun, potensi ini telah termanfaatkan sebesar 3,27 milyar m³ yaitu :
 - a. Irigasi : 1,44 milyar m³/th ~ 7,58%

Sawah Irigasi 61.662 ha ~ 1,5 lt/det/ha, produktivitas rata-rata adalah 4,5 – 6,5 ton/ha, IT = 150-200%. Total Produksi sekitar 650-750 ribu ton gabah kering giling (GKG)
 - b. Sawah Tadah Hujan

Luas sawah tadah hujan yaitu sebesar 32.560 ha, dengan kapasitas produksi 100-150 ribu ton
 - c. Tambak/Perikanan 26.600 ha ~ 291,3 jt m³/th ~ 1,54%.

Seluas 14.160 Ha ~ 48% area produksi perikanan berada di Kabupaten Pinrang, dan 12.470 Ha ~ 42% di Kabupaten

Pangkajene Kepulauan. Nilai total produksi perikanan di Sulawesi Selatan adalah Rp 3,78 trilyun

- d. Air Minum: 29,86 Jt m³/th ~ 0,16%.

Penyediaan air minum WS Saddang bersumber pada PDAM Kota Pare-Pare. Kabupaten Pinrang mempunyai 2 instalasi pengelolaan air minum yaitu PDAM Teppo dan Langnga dengan kapasitas masing-masing yaitu 50 lt/det dan 10 lt/det atau 1,44 Juta m³ per tahun. PDAM ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 4.718 KK dan 132 unit kantor. Total penggunaan untuk air minum dalam WS Saddang 950 lt/det atau 29,86 Juta m³/th.

- Listrik Tenaga Air : 1,42 Milyar m³/th (7,48%);
- PLTA Bakaru-I ~ 126 MW ~ 45 m³/det (Sub-DAS Mamasa); dan
- PLTA Teppo 3 x 540 KW ~ 6-10 m³/det (Saluran Induk Teppo)

2. Potensi air, tenaga air dan lahan yang masih tersedia dan dapat dikembangkan yaitu :

- a. Irigasi: ~ 1,98 milyar m³/th~10,46%.

Sawah Irigasi 85.662 ha ~ 1,5 lt/det/ha, Produktivitas rata-rata adalah 4,5 – 6,5 ton/ha, IT = 150-300%. Estimasi Produksi sekitar 1,0 -1,2 juta ton GKG

- b. Sawah Tadah Hujan

Luas sawah tadah hujan yang masih dapat dikembangkan seluas 8.560 ha, Produksi 40-50 ribu ton GKG ketika musim hujan

- c. Tambak /Perikanan 26.600 ha ~ 291,3 jt m³/th ~ 1,79 %

Seluas 14.160 Ha (48%) area produksi perikanan berada di Kabupaten Pinrang, dan 12.470 Ha (42%) di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

- d. Air Minum : 56 Jt m³/th ~ 0,20 %

Penyediaan air baku untuk air bersih kabupaten/kota ditargetkan meningkat setiap tahun sehingga setiap akhir periode 5-tahun pelayanan dapat menjangkau tambahan baru 10% penduduk. Pada Tahun 2030 total penduduk dalam WS Saddang yang mendapat akses terhadap air bersih mencapai 70%, atau sekitar 60 juta m³ per tahun

- Listrik Tenaga Air : 4,42 Milyar m³/th ~ 27,30 %;
- PLTA Bakaru I & II ~ 252 MW ~ 45 m³/det (Sub-DAS Mamasa);
- PLTA Teppo 3 x 540 KW ~ 6-10 m³/det (Sal-Induk Teppo); dan
- PLTA Batu 80 MW, Kuri 190 MW, dan Bonto Batu 200 MW

2.5.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

1. Pembangunan waduk di DAS Mamasa dan DAS Mataallo untuk menanggulangi permasalahan banjir di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang, sekaligus ditujukan untuk menyimpan potensi air bagi PLTA dan pertanian beririgasi. Hal ini juga akan mengurangi potensi terjadinya kekeringan dan gagal panen;
2. Pembangunan pengendali sedimen pada bagian hulu DAS Saddang dan DAS-DAS kecil lainnya di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep untuk menanggulangi sedimentasi pada daerah hilir DAS; dan
3. Pengembangan usaha pertambangan pertambangan bahan galian tambang non mineral (batu dan pasir) untuk memanfaatkan sedimen yang mengendap pada dasar sungai melalui kerjasama pemerintah-swasta, swasta dengan swasta. Hal ini akan mengembalikan kondisi dasar sungai ke level normal sekaligus mengurangi potensi banjir

2.5.4 Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

1. Rasionalisasi jumlah stasiun pengamatan data hidrometri dan klimatologi untuk menjamin kecukupan data dan informasi sumber daya air di WS Saddang;
2. Meningkatkan kualitas peralatan secara memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga ketepatan dan kecepatan pendataan dan distribusi data informasi dapat dilakukan secara lebih baik;
3. Mengembangkan kualitas pelayanan terhadap penyediaan data dan informasi sumber daya air;
4. Pengembangan sistem untuk memadukan data sumber daya air dari beberapa instansi pengelola; dan
5. Pengembangan sumber daya manusia

2.5.5 Aspek Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha Serta Kelembagaan

1. Penguatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Saddang;
2. Penguatan dan pelatihan GP3, IP3A untuk mendorong partisipasi mereka dalam memelihara, menggunakan prasarana sumber daya air yang telah dibangun;

3. Penciptaan peluang kerjasama pemerintah dan swasta untuk memacu peningkatan partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan dan pengembangan prasarana sumber daya air; dan
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air

BAB III

ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI SADDANG

3.1 Asumsi, Kriteria dan Standar

Pola pengelolaan sumber daya air WS Saddang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di WS Saddang dengan prinsip keterpaduan. Secara umum, asumsi dan kriteria dan standar yang digunakan dalam analisis data antara lain yang termuat didalam:

1. Pedoman Perencanaan Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Tahun 2004;
2. Kriteria penetapan lahan kritis, oleh Balai Rehabilitasi dan Konservasi Tanah (BRKT) dan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (DPKT);
3. Paket Program *Decision Support System Ribasim, Delft Hydraulic, Netherland*;
4. Kriteria Kelas Mutu Air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Daerah terkait;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; dan
6. Metode, analisis dan perhitungan sesuai dengan SNI

Rencana pengembangan sumber daya air di WS Saddang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*) serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
2. Pengelolaan kuantitas dan kualitas air untuk menjamin ketersediaan air baik untuk saat ini maupun pada saat mendatang melalui alokasi air, ijin pengambilan air, ijin pembuangan limbah cair dan lain sebagainya;
3. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-struktural melalui konservasi

sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah; dan

4. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

Strategi dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang ini diarahkan pada 2 (dua) cakupan umum, yaitu :

1. Pengelolaan sumber daya air untuk tujuan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak secara terpadu dan menyeluruh guna mencapai manfaat yang optimal dalam memenuhi hajat hidup dan kehidupan masyarakat; dan
2. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dalam pola tata ruang yang serasi dan terkoordinasi dengan sektor lainnya sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan menjamin fungsi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berikut ini adalah asumsi, kriteria, standart dan analisa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang.

A. Asumsi dalam Penyusunan Rancangan Pola

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pola ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan yang memuat parameter perubahan politik, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim.

1) Perubahan Politik

Situasi tatakelola pemerintahan (perubahan politik) dimasa yang akan datang kurang lebih sama dengan kondisi saat ini atau *status quo* dan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan, serta melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan penegakan hukum dan dukungan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memadai.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kondisi sebelumnya dengan kecenderungan stabil antara 4,5% dan 6,5% per tahun. Dalam pola ini digunakan skenario dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah (<4,5%), pertumbuhan ekonomi sedang (antara 4,5% dan 6,5%), pertumbuhan ekonomi tinggi (>6,5%).

3) Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang masuk dalam WS Saddang pada Tahun 2013 adalah sebesar 2.064.752 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata kabupaten/kota di WS Saddang sekitar 1,45% pertahun. Laju tersebut hampir sama dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional yang berada pada angka 1,49% pertahun.

4) Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan air dihitung dengan asumsi berdasarkan standar kebutuhan air domestik didasarkan pada petunjuk teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan dari Ditjen Cipta Karya, yaitu seperti ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Standar Perhitungan Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan

Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air	
	Rumah Tangga (l/org/hr)	Perkotaan (%)
> 1.000.000	174	60
500.000-1.000.000	142	40
100.000-500.000	126	30
20.000-100.000	78	20
3.000-20.000	54	5

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Tahun 2006

5) Kebutuhan Air Bersih

Dalam menghitung proyeksi kebutuhan air sebagaimana ditargetkan dalam *Millenium Development Goal's* sampai dengan Tahun 2015, beberapa kriteria yang ditentukan sebagai berikut :

- Skala perkotaan adalah untuk kota dengan status ibukota kabupaten/kota dan ibu kota kecamatan dengan jumlah penduduk tahun 2004 sebesar ≥ 20.000 jiwa;
- Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan ditetapkan dari setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Tingkat konsumsi kebutuhan air melalui hidran umum = 45 liter/orang/hari;
- Rasio pelayanan melalui SR = HU dari 90% : 10% menjadi 95% : 5%;
- Pelayanan non-domestik ditetapkan 10% dari kebutuhan domestik;
- Tingkat penurunan kehilangan air 28% menjadi 20%;
- Faktor koefisien hari maksimum adalah 1,25;
- Faktor koefisien jam puncak adalah 1,75;

- i) Faktor koefisien kebutuhan air baku adalah 1,1;
- j) Skala IKK adalah kota dengan status ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk tahun 2004 $\leq$ 20.000 jiwa;
- k) Rasio pelayanan melalui SR : HU dari 82% : 18% menjadi 94% : 6%; dan
- l) Kriteria lainnya sama dengan skala perkotaan.

6) Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi didasarkan pada jenis tanaman dan periode pertumbuhan dan berdasarkan analisa dan hasil diskusi diperoleh nilai 1,2 lt/dt/ha.

B. Kriteria Dalam Penyusunan Rancangan Pola

- 1) Pedoman Perencanaan Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Tahun 2004;
- 2) Kriteria Perencanaan oleh Dirjen Pengairan (KP. 01 s/d 07, PT. 01 s/d 04);
- 3) Kriteria penetapan lahan kritis, oleh BRLKT dan DPKT;
- 4) Kriteria Kelas Mutu Air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
- 5) Kriteria Bendungan kecil untuk daerah semi kering di Indonesia; Nomor 04.00139-HAB; dan
- 6) Paket Program DSS Ribasim, *Delft Hydraulic*, Netherland.

C. Standard Dalam Penyusunan Rancangan Pola

- 1) Perencanaan Banjir untuk *Spillway* Bendungan: SNI-03-3432-1994;
- 2) *Design flood*/Perhitungan Banjir: SNI-03-2415-1991;
- 3) Standar Nasional Indonesia: SNI-03-3432-1994, 05-2919-1991;
- 4) Standar Nasional Indonesia; SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air; dan
- 5) Standar Perencanaan dan Proyeksi Jumlah Penduduk, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1979.

D. Analisa

1) Kebutuhan Air Irigasi WS Saddang

Acuan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air irigasi berdasarkan Standar Kriteria Perencanaan Irigasi KP-01 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1986. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menghitung kebutuhan air irigasi menurut rencana pola tata tanam yaitu :

- a) Pola tanam yang direncanakan;
- b) Luas areal yang akan ditanami;
- c) Kebutuhan air pada petak sawah;
- d) Efisiensi irigasi; dan
- e) Awal Tanam.

Kebutuhan air irigasi dihitung dengan memperhitungkan pola tanam, awal tanam dan intensitas tanam yang akan dihitung dengan bantuan paket program DSS Ribasim, sedangkan besar kebutuhan air irigasi pada pintu pengambilan sangat dipengaruhi oleh efisiensi irigasi, yang dalam studi ini diperkirakan sebesar 0,91. Luas DI tiap DAS di WS Saddang Tahun 2013 dan proyeksi luasan sampai dengan Tahun 2033 ditampilkan pada Tabel 3.2. Proyeksi kebutuhan air irigasi tiap DAS di WS Saddang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 ditampilkan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Proyeksi Luas Daerah Irigasi WS Saddang
Tahun 2013 - Tahun 2033**

No.	Nama DAS	Proyeksi Luas DI (Ha)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Galanggalang	748,19	748,19	748,19	748,19	748,19
2	Bungi	1.243,91	1.243,91	1.243,91	1.243,91	1.243,91
3	Massila	575,70	575,70	575,70	575,70	575,70
4	Saddang	107.643,73	113.943,73	132.843,73	151.743,73	172.091,73
5	Sibo	643,93	643,93	643,93	643,93	643,93
6	Kariango	2.303,52	2.303,52	2.303,52	2.303,52	2.303,52
7	Agalacange	111,39	111,39	111,39	111,39	111,39
8	Jawijawi	2.244,26	2.244,26	2.244,26	2.244,26	2.244,26
9	Karajae	9.929,71	9.929,71	9.929,71	9.929,71	9.929,71
10	Bojo	281,17	281,17	281,17	281,17	281,17
11	Pelapekae	147,10	147,10	147,10	147,10	147,10
12	Kupa	165,93	165,93	165,93	165,93	165,93
13	Jampue	2.387,62	2.387,62	2.387,62	2.387,62	2.387,62
14	Lampoko	1.631,24	1.631,24	1.631,24	1.631,24	1.631,24
15	Lakepo	933,40	933,40	933,40	933,40	933,40
16	Binangae	957,32	957,32	957,32	957,32	957,32
17	Lipukasi	3.395,19	3.395,19	3.395,19	3.395,19	3.395,19
18	Matajang	1.865,24	1.865,24	1.865,24	1.865,24	1.865,24

No.	Nama DAS	Proyeksi Luas DI (Ha)				
		2013	2018	2023	2028	2033
19	Segeri	2.790,82	2.790,82	2.790,82	2.790,82	2.790,82
20	Limbangan	2.069,67	2.069,67	2.069,67	2.069,67	2.069,67
21	Labbakang	4.251,72	4.251,72	4.251,72	4.251,72	4.251,72
22	Pangkajene	13.989,44	13.989,44	13.989,44	13.989,44	14.923,44
23	Sangkara	4.997,40	4.997,40	4.997,40	4.997,40	4.997,40
24	Maronak	361,43	361,43	361,43	361,43	361,43
	WS Saddang	165.669,03	171.969,03	190.869,03	209.769,03	231.051,03

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

**Tabel 3.3 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi WS Saddang
Tahun 2013 - Tahun 2033**

No.	Nama DAS	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi (m ³ /dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Galanggalang	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
2	Bungi	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
3	Massila	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
4	Saddang	98,06	103,79	121,01	138,23	156,76
5	Sibo	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
6	Kariango	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
7	Agalacange	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
8	Jawijawi	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
9	Karajae	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
10	Bojo	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
11	Pelapekae	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
12	Kupa	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
13	Jampue	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
14	Lampoko	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
15	Lakepo	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
16	Binangae	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
17	Lipukasi	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
18	Matajang	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
19	Segeri	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
20	Limbangan	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
21	Labbakang	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
22	Pangkajene	12,74	12,74	12,74	12,74	13,59
23	Sangkara	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
24	Maronak	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	WS Saddang	150,91	156,65	173,87	191,09	210,47

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

2) Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan

Analisis pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan perkotaan sangat tergantung pada jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk diukur dengan menggunakan 2 periode data jumlah penduduk pada tahun yang berbeda, sehingga didapatkan angka laju pertumbuhan penduduk yang bervariasi dari 0,98 hingga 1,95. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata WS Saddang adalah 1,45% per tahun. DAS Saddang, DAS Bungi, dan DAS Massila, DAS Agalacange merupakan DAS yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tinggi. Hasil perhitungan proyeksi penduduk disajikan dalam Tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Proyeksi Penduduk WS Saddang
Tahun 2013 - Tahun 2033**

No.	DAS	Laju Pertumbu- han (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
			2013	2018	2023	2028	2033
1	DAS Galanggalang	1,37	39.865	42.691	45.724	48.980	52.477
2	DAS Bungi/Kalobe	1,95	17.880	19.713	21.733	23.960	26.416
3	DAS Massila	1,95	16.907	18.640	20.550	22.656	24.978
4	DAS Sadang	1,88	904.880	994.135	1.093.615	1.204.706	1.329.019
5	DAS Sibio	1,95	30.879	34.043	37.532	41.378	45.619
6	DAS Kariango	1,95	207.310	228.552	251.971	277.790	306.255
7	DAS Agalacange	1,92	8.193	9.016	9.924	10.923	12.025
8	DAS Jawijawi	1,49	93.650	100.915	108.767	117.254	126.429
9	DAS Karajae	1,26	90.206	96.074	102.366	109.113	116.352
10	DAS Bojo	1,44	10.638	11.433	12.290	13.213	14.208
11	DAS Pelapekae	1,16	1.857	1.968	2.085	2.209	2.341
12	DAS Kupa	1,16	2.095	2.220	2.352	2.492	2.640
13	DAS Jampue	0,98	33.763	35.457	37.240	39.115	41.088
14	DAS Lampoko	0,99	33.270	34.950	36.720	38.583	40.545
15	DAS Lakepo	0,99	20.333	21.362	22.445	23.586	24.787
16	DAS Binangae	1,15	23.185	24.562	26.020	27.566	29.203
17	DAS Lipukasi	1,16	51.376	54.435	57.675	61.109	64.746
18	DAS Matajang	1,25	36.921	39.305	41.845	44.550	47.431
19	DAS Sageri	1,34	36.803	39.358	42.091	45.014	48.141
20	DAS Limbangan	1,37	36.063	38.622	41.362	44.297	47.440
21	DAS Labbakkang	1,37	34.814	37.284	39.929	42.763	45.797
22	DAS Pangkajene	1,44	117.759	126.526	135.956	146.098	157.008
23	DAS Sangkara	1,63	162.899	176.706	191.697	207.974	225.650
24	DAS Maronak	1,74	53.208	58.042	63.316	69.068	75.344
	Total	1,45	2.064.752	2.246.009	2.445.205	2.664.399	2.905.937

Analisis kebutuhan air dilakukan dengan menghitung kebutuhan air perkapita ditambah dengan potensi kehilangan sebesar 25%. Kebutuhan air eksisting untuk rumah tangga dan perkotaan WS Saddang adalah sebesar 4,884 m³/detik. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5,585 m³/detik pada Tahun 2018; 6,414 m³/detik pada Tahun 2023; 7,312 m³/detik pada Tahun 2028; dan 8,371 m³/detik pada Tahun 2033 sebagai tahun akhir perencanaan. Lebih lengkapnya tentang proyeksi kebutuhan air rumah tangga WS Saddang disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033

No.	Nama DAS	Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan (m ³ /dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	DAS Galanggalang	0,094	0,106	0,120	0,134	0,151
2	DAS Bungi	0,042	0,049	0,057	0,066	0,076
3	DAS Massila	0,040	0,046	0,054	0,062	0,072
4	DAS Saddang	2,140	2,472	2,869	3,306	3,829
5	DAS Sibio	0,073	0,085	0,098	0,114	0,131
6	DAS Kariango	0,490	0,568	0,661	0,762	0,882
7	DAS Agalacange	0,019	0,022	0,026	0,030	0,035
8	DAS Jawijawi	0,222	0,251	0,285	0,322	0,364
9	DAS Karajae	0,213	0,239	0,269	0,299	0,335
10	DAS Bojo	0,025	0,028	0,032	0,036	0,041
11	DAS Pelapekae	0,004	0,005	0,005	0,006	0,007
12	DAS Kupa	0,005	0,006	0,006	0,007	0,008
13	DAS Jampue	0,080	0,088	0,098	0,107	0,118
14	DAS Lampoko	0,079	0,087	0,096	0,106	0,117
15	DAS Lakepo	0,048	0,053	0,059	0,065	0,071
16	DAS Binangae	0,055	0,061	0,068	0,076	0,084
17	DAS Lipukasi	0,122	0,135	0,151	0,168	0,187
18	DAS Matajang	0,087	0,098	0,110	0,122	0,137
19	DAS Sageri	0,087	0,098	0,110	0,124	0,139
20	DAS Limbangan	0,085	0,096	0,108	0,122	0,137
21	DAS Labbakkang	0,082	0,093	0,105	0,117	0,132
22	DAS Pangkajene	0,279	0,315	0,357	0,401	0,452
23	DAS Sangkara	0,385	0,439	0,503	0,571	0,650
24	DAS Maronak	0,126	0,144	0,166	0,190	0,217
Total		4,884	5,585	6,414	7,312	8,371

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

3) Kebutuhan Air Industri

Kebutuhan air eksisting untuk industri Tahun 2013 di WS Saddang adalah 0,344 m³/dtk. Proyeksi kebutuhan air industri tiap DAS di

WS Saddang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 ditampilkan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Proyeksi Kebutuhan Air Industri WS Saddang
Tahun 2013 - Tahun 2033**

No.	Nama DAS	Proyeksi Kebutuhan Air Industri (m ³ /dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	DAS Galanggalang	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011
2	DAS Bungi	0,003	0,004	0,004	0,005	0,006
3	DAS Massila	0,003	0,003	0,004	0,005	0,005
4	DAS Saddang	0,151	0,181	0,216	0,256	0,282
5	DAS Sibbo	0,005	0,006	0,007	0,009	0,010
6	DAS Kariango	0,035	0,042	0,050	0,059	0,065
7	DAS Agalacange	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003
8	DAS Jawijawi	0,016	0,018	0,021	0,025	0,027
9	DAS Karajae	0,015	0,017	0,020	0,023	0,025
10	DAS Bojo	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
11	DAS Pelapekae	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	DAS Kupa	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
13	DAS Jampue	0,006	0,006	0,007	0,008	0,009
14	DAS Lampoko	0,006	0,006	0,007	0,008	0,009
15	DAS Lakepo	0,003	0,004	0,004	0,005	0,005
16	DAS Binangae	0,004	0,004	0,005	0,006	0,006
17	DAS Lipukasi	0,009	0,010	0,011	0,013	0,014
18	DAS Matajang	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010
19	DAS Sageri	0,006	0,007	0,008	0,010	0,010
20	DAS Limbangan	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010
21	DAS Labbakkang	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010
22	DAS Pangkajene	0,020	0,023	0,027	0,031	0,033
23	DAS Sangkara	0,027	0,032	0,038	0,044	0,048
24	DAS Maronak	0,009	0,011	0,012	0,015	0,016
Total		0,344	0,409	0,482	0,566	0,617

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

4) Kebutuhan Air Peternakan

Perhitungan kebutuhan air peternakan dilakukan berdasarkan jumlah hewan yang berada di masing-masing wilayah administrasi pada tahun 2013. Proyeksi pertumbuhan per-tahun sebesar diasumsikan sebesar 2%. Kabupaten Pinrang merupakan kabupaten dengan kebutuhan air peternakan terbesar, diikuti oleh Kabupaten Barru dan Kabupaten Tana Toraja. Total kebutuhan pada Tahun 2013 adalah sebesar 0,602 m³/detik. Perhitungan proyeksi kebutuhan air untuk peternakan disajikan dalam Tabel 3.7.

**Tabel 3.7 Kebutuhan Air Peternakan WS Saddang
Tahun 2013 - Tahun 2033**

No	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Air Peternakan (m ³ /detik)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Pangkajene Kepulauan	0,036	0,044	0,049	0,054	0,060
2	Barru	0,095	0,109	0,120	0,132	0,146
3	Enrekang	0,045	0,055	0,061	0,067	0,074
4	Pinrang	0,182	0,205	0,226	0,250	0,276
5	Tana Toraja	0,063	0,089	0,098	0,108	0,120
6	Toraja Utara	0,056	0,081	0,089	0,099	0,109
7	Pare-Pare	0,032	0,036	0,040	0,044	0,048
Total		0,508	0,619	0,683	0,754	0,833

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

3.2 Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, dan Perubahan Iklim Pada WS Saddang

Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumber daya air dalam forum Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM). PKM dihadiri oleh anggota TKPSDA WS Saddang yang telah terbentuk. Forum TKPSDA WS Saddang dibentuk untuk menjadi wadah koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air di WS Saddang. Forum PKM melakukan pembahasan strategi ekonomi yang akan dipilih dalam pengelolaan sumber daya air WS Saddang di masa yang akan datang.

Skenario dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang ditentukan dengan menganalisa aspek strategis yang dominan dan berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya air dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Skenario kondisi WS Saddang merupakan asumsi tentang kondisi yang mungkin terjadi di WS Saddang di masa yang akan datang. Analisis skenario mencakup 3 kondisi, yaitu kondisi perekonomian, kondisi perubahan politik, dan kondisi perubahan iklim.

Kondisi perekonomian adalah kondisi kemampuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membiayai pembangunan bidang sumber daya air, terutama untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, RKI, lingkungan, maupun keperluan lainnya. Pengelolaan sumber daya air memerlukan dana yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan menghambat pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air.

Pembangunan prasarana sumber daya air memerlukan iklim politik yang kondusif. Iklim politik dan kebijakan yang kondusif akan berpengaruh positif terhadap jumlah investasi yang ditanamkan oleh pihak swasta. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi akan lebih cepat bila kondisi politik dan kebijakan pemerintah berjalan baik dan mendukung dunia usaha.

Perubahan iklim global (*global climate change*) dalam jangka panjang akan mempengaruhi siklus hidrologi dalam DAS. Kenaikan suhu udara, cuaca ekstrim dan perubahan musim kering dan basah adalah contoh dampak perubahan iklim bagi pengelolaan sumber daya air. Antisipasi terhadap perubahan global harus disiapkan untuk mencegah kemungkinan yang merugikan di masa yang akan datang.

Berikut merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi perubahan iklim yang terjadi di WS Saddang.

A. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur hasil pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, jasa, telekomunikasi dan sektor lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun diukur dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha secara berkala. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu Tahun 2009 hingga Tahun 2012 di kabupaten yang berada di WS Saddang berada pada angka 7,29% per-tahun (disajikan pada BAB II Tabel 2.34). Laju tersebut sedikit lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada periode yang sama, sebesar 7,68% per-tahun. Namun, angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,78% per-tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi WS Saddang cukup baik dan mendukung untuk menerapkan skenario ekonomi tinggi.

B. Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan hasil PKM, tata kelola pemerintahan (*governance*) di WS Saddang di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, kota, diasumsikan mendukung pengelolaan sumber daya air WS Saddang. Hal tersebut memungkinkan adanya pengembangan pengelolaan sumber daya air yang padat modal, inovatif, untuk meningkatkan kontribusi sektor terkait terhadap perekonomian daerah.

C. Perubahan Iklim

Perkiraan perubahan iklim yang terjadi di WS Saddang terbatas pada perubahan curah hujan rata-rata dimasa yang akan datang. Saat ini dampak perubahan iklim belum berpengaruh besar terhadap pengelolaan sumber daya air di masa yang datang, sehingga analisis perubahan iklim belum dilakukan secara mendalam.

Hasil analisis skenario pengelolaan sumber daya air WS Saddang dikelompokkan menjadi 3 skenario, yaitu :

A. Skenario A : Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Rendah

Skenario ini merupakan skenario proyeksi perkembangan ekonomi berdasarkan kondisi makro ekonomi yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun $<5\%$;
2. Luasan potensial irigasi WS Saddang adalah sebesar 65.382 ha. Berdasarkan pemilihan skenario ekonomi rendah, kemampuan pengembangan daerah irigasi baru adalah sebesar 10.366 ha.
3. Kenaikan kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan rata-rata 5% per 5 tahun;
4. Upaya pemenuhan kebutuhan air secara keseluruhan didanai oleh APBN;
5. Pembangunan infrastruktur berupa intake air baku untuk memenuhi kebutuhan air di masing-masing kabupaten/kota di WS Saddang. Kapasitas intake air baku yang direncanakan yaitu sebesar $17,85 \text{ m}^3/\text{detik}$; dan
6. Pembangunan bendungan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku dengan dibangunnya Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang)

Konsep pembangunan pengelolaan sumber daya air WS Saddang dengan skenario ekonomi rendah, yaitu :

1. Melakukan konservasi vegetatif di lahan kritis yang luasnya mencapai 6.517 km^2 ;
2. Pembangunan *check dam* dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo;

3. Melakukan pembangunan bangunan pengendali sedimen di bagian hulu dan tengah Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, dan Sungai Tabo-Tabo;
4. Menyusun Peraturan Daerah pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan dan penetapan Peraturan Daerah tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk;
5. Melakukan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran *ilegal logging* di kawasan konservasi;
6. Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang. Prioritas utama adalah Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang) yang memiliki potensi irigasi sebesar 63.000 ha. Bendungan ini direncanakan memiliki potensi listrik sebesar 90 MW
7. Pembangunan bendungan yang difungsikan sebagai PLTA yaitu Bakkaru, Bendungan Poko, Bendungan Malea, dan Bendungan Bojo;
8. Pembangunan jaringan irigasi permukaan di WS Saddang terutama di DI Saddang seluas 20 % dari potensi luasannya.
9. Pengembangan jaringan irigasi DI Banteng dan DI Tabo-Tabo.
10. Melakukan O & P, rehabilitasi, *upgrading* prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang. Melalui rehabilitasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas DI sebesar 50% selama 20 tahun mendatang;
11. Melakukan O & P, rehabilitasi, *upgrading* prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare;
12. Pembangunan *check-dam* dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo;
13. Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama Pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Labattoa, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Palie, Pantai Batupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo sebagai prioritas jangka menengah;
14. Normalisasi Sungai Saddang dan Sungai Mataallo;

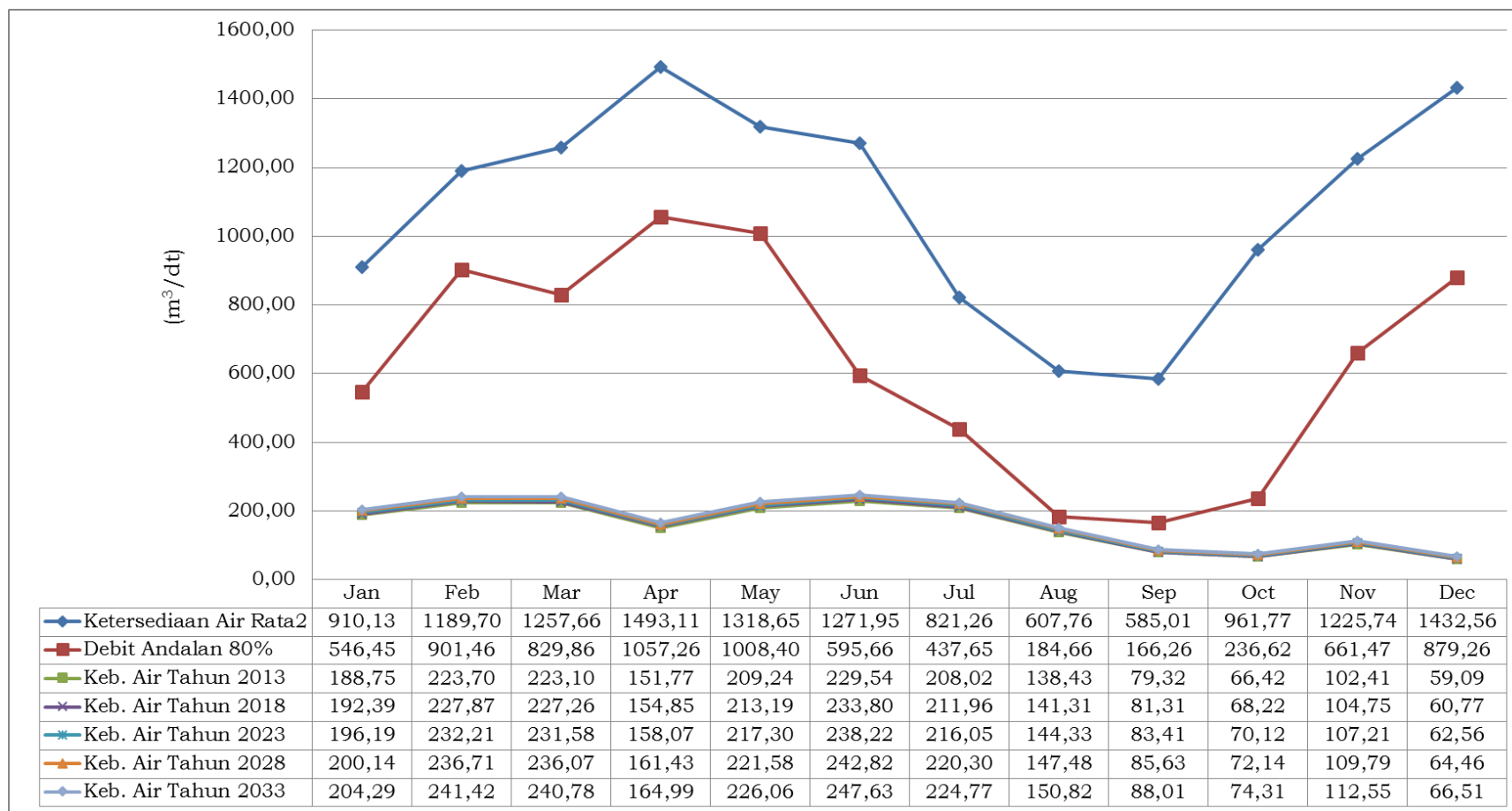
15. Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu sebagai prioritas jangka menengah;
16. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
17. Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan kemampuan tenaga Sumber Daya Manusia.

Analisa keseimbangan air (*water balance*) pada WS Saddang disajikan dalam bentuk neraca air. Proyeksi neraca air WS Saddang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 untuk skenario ekonomi rendah ditampilkan pada Tabel 3.8. Gambaran neraca air bulanan skenario ekonomi rendah disajikan dalam Gambar 3.1. Sedangkan usaha pemenuhan air pada WS Saddang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 skenario ekonomi rendah terdapat di Gambar 3.2.

Tabel 3.8 Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Rendah

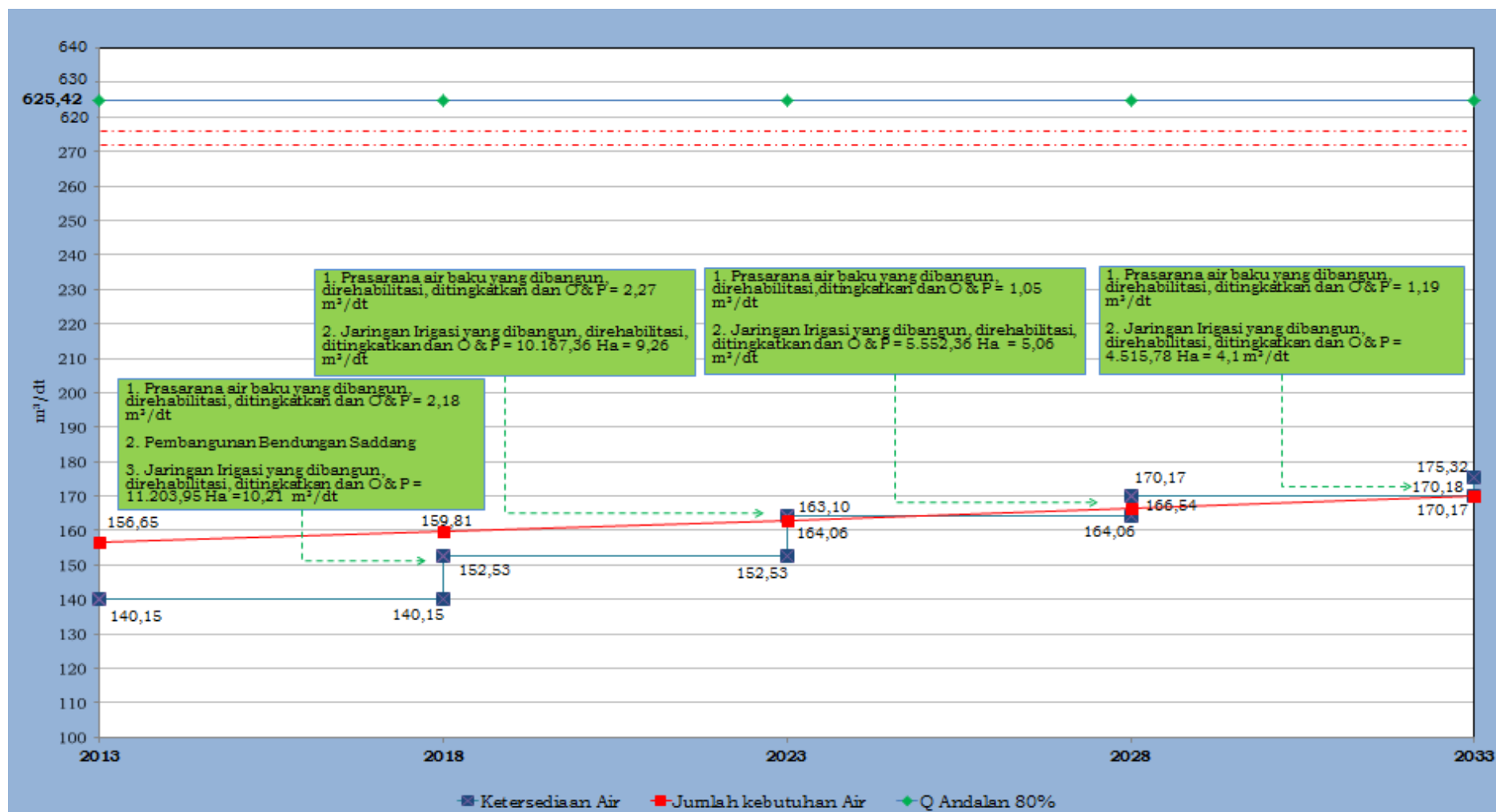
Keterangan	Tahun (m ³ /dt)				
	2013	2018	2023	2028	2033
Kebutuhan					
- Irigasi	150,91	153,19	155,53	157,91	160,36
- Rumah Tangga dan Perkotaan	4,88	5,58	6,41	7,31	8,37
- Industri	0,34	0,41	0,48	0,57	0,62
- Peternakan	0,51	0,62	0,68	0,75	0,83
Jumlah kebutuhan Air	156,65	159,81	163,10	166,54	170,18
Ketersediaan	140,15	152,53	164,06	170,17	175,32
Q Andalan 80%	625,42	625,42	625,42	625,42	625,42

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.1 Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Rendah



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.2 Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang Ekonomi Rendah

B. Skenario B : Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Sedang

Skenario kedua ini merupakan proyeksi perkembangan ekonomi berdasarkan kondisi makro ekonomi saat ini. Adapun kriteria dasar yang dipakai dalam skenario berikut adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun 5% - 6,5%;
2. Luasan potensial irigasi WS Saddang adalah sebesar 65.382 ha. Berdasarkan pemilihan skenario ekonomi rendah, kemampuan pengembangan daerah irigasi baru adalah sebesar 27.709 ha.
3. Kenaikan kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan rata-rata 6,5% per 5 tahun;
4. Upaya pemenuhan kebutuhan air sebagian besar didanai oleh APBN dan sedikit dari APBD;
5. Pembangunan infrastruktur berupa intake air baku untuk memenuhi kebutuhan air di masing-masing kabupaten/kota di WS Saddang; dan
6. Pembangunan Bendungan Saddang untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku.

Konsep pembangunan pengelolaan sumber daya air WS Saddang dengan skenario ekonomi sedang, yaitu :

1. Melakukan konservasi vegetatif di lahan kritis yang luasnya mencapai 6.517 km²;
2. Pembangunan *check dam* dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo;
3. Melakukan pembangunan bangunan pengendali sedimen di bagian hulu dan tengah Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, dan Sungai Tabo-Tabo;
4. Menyusun Peraturan Daerah pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan dan penetapan Peraturan Daerah tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk;
5. Melakukan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ilegal logging di kawasan konservasi;
6. Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang. Prioritas utama adalah Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang) yang memiliki potensi irigasi sebesar 63.000 ha. Bendungan ini direncanakan memiliki potensi listrik sebesar 90 MW;

7. Pembangunan bendungan yang difungsikan sebagai PLTA yaitu Bakkaru, Bendungan Poko, Bendungan Malea, dan Bendungan Bojo;
8. Pembangunan jaringan irigasi permukaan di WS Saddang terutama di DI Saddang seluas 60 % dari potensi luasannya;
9. Pengembangan jaringan irigasi DI Banteng dan DI Tabo-Tabo;
10. Melakukan O & P, rehabilitasi, *upgrading* prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang. Melalui rehabilitasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas DI sebesar 70% selama 20 tahun mendatang;
11. Melakukan O & P, rehabilitasi, *upgrading* prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare;
12. Pembangunan *check-dam* dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo;
13. Normalisasi Sungai Saddang dan Sungai Mataallo;
14. Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama Pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, yang dimulai dalam jangka pendek;
15. Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu;
16. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
17. Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan kemampuan tenaga Sumber Daya Manusia.

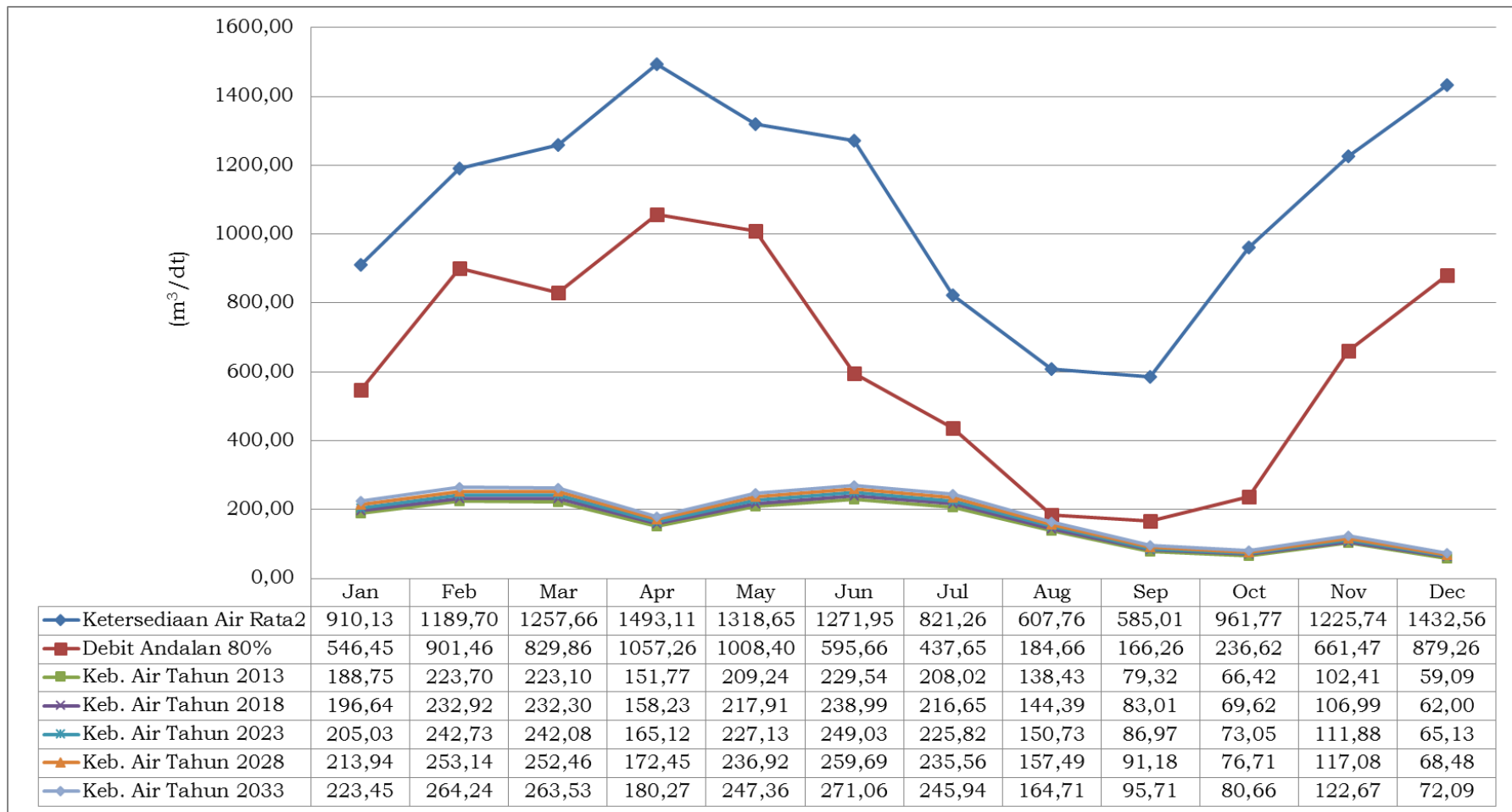
Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat (>6,5%) namun terdapat unit pengelola sumber daya air di daerah yang sedang. Unit pengelola sumber daya air yang tidak kuat menyebabkan tujuan pengelolaan sumber daya air sulit dicapai karena kurangnya jaringan kelembagaan, koordinasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan.

Proyeksi neraca air WS Saddang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 untuk skenario ekonomi sedang ditampilkan pada Tabel 3.9. Gambaran neraca bulanan air skenario ekonomi sedang disajikan dalam Gambar 3.3.

Tabel 3.9 Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Sedang

Keterangan	Tahun (m ³ /dt)				
	2013	2018	2023	2028	2033
Kebutuhan					
- Irigasi	150,91	156,69	162,81	169,29	176,15
- Rumah Tangga dan Perkotaan	4,88	5,58	6,41	7,31	8,37
- Industri	0,34	0,41	0,48	0,57	0,62
- Peternakan	0,51	0,62	0,68	0,75	0,83
Jumlah kebutuhan Air	156,65	163,30	170,39	177,92	185,98
Ketersediaan	140,15	155,16	170,27	181,58	190,36
Q Andalan 80%	625,42	625,42	625,42	625,42	625,42

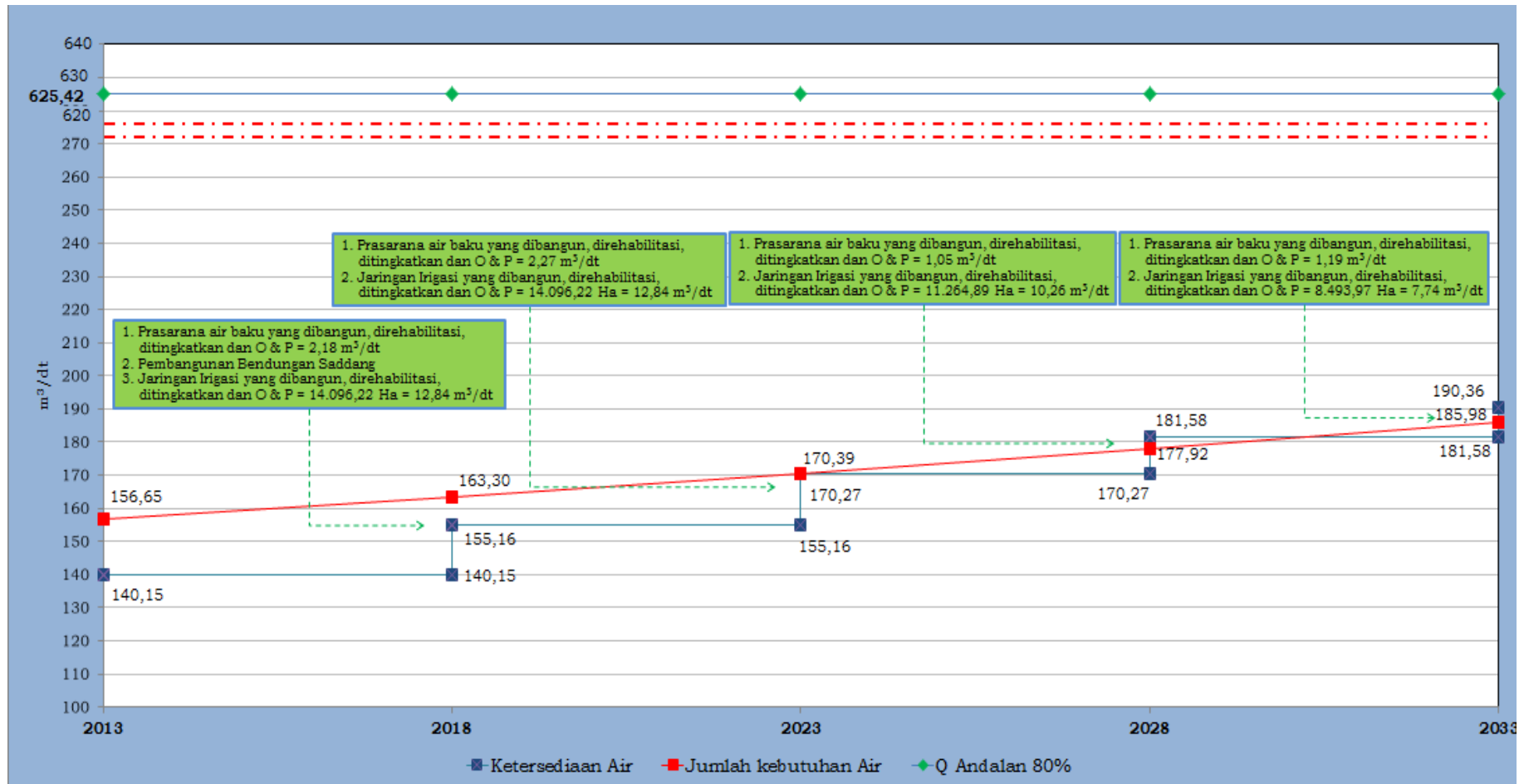
Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.3 Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Sedang

Berdasarkan asumsi tersebut, maka usaha pemenuhan suplai air pada skenario ekonomi sedang disajikan pada Gambar 3.4.



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.4 Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang Ekonomi Sedang

C. Skenario C : Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Tinggi

Skenario ketiga ini merupakan proyeksi perkembangan ekonomi berdasarkan kondisi makro ekonomi saat ini. Adapun kriteria dasar yang dipakai dalam skenario berikut adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun $>6,5\%$;
2. Luasan potensial irigasi WS Saddang adalah sebesar 65.382 ha. Berdasarkan pemilihan skenario ekonomi rendah, luasan tersebut dapat dikembangkan sepenuhnya;
3. Kenaikan kebutuhan air non domestik rata-rata 10% per 5 tahun;
4. Upaya pemenuhan kebutuhan air didanai oleh APBN dan APBD.
5. Pembangunan infrastruktur berupa intake air baku untuk memenuhi kebutuhan air di masing-masing kabupaten/kota di WS Saddang; dan
6. Pembangunan Bendungan Saddang untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan air baku.

Konsep pembangunan pengelolaan sumber daya air WS Saddang dengan skenario ekonomi tinggi, yaitu :

1. Melakukan konservasi vegetatif di lahan kritis yang luasnya mencapai 6.517 km²;
2. Pembangunan *check dam* dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo;
3. Melakukan pembangunan bangunan pengendali sedimen di bagian hulu dan tengah sungai, terutama Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, dan Sungai Tabo-Tabo;
4. Menyusun Peraturan Daerah pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan dan penetapan Peraturan Daerah tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk;
5. Melakukan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ilegal logging di kawasan konservasi;
6. Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan *check dam* diseluruh WS Saddang. Prioritas utama adalah Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang) yang memiliki potensi irigasi sebesar 63.000 ha. Bendungan ini direncanakan memiliki potensi listrik sebesar 90 MW;

7. Pembangunan bendungan yang difungsikan sebagai PLTA yaitu Bakkaru, Bendungan Poko, Bendungan Malea, dan Bendungan Bojo;
8. Pembangunan jaringan irigasi permukaan di WS Saddang terutama di DI Saddang seluas 20 % dari potensi luasannya;
9. Pengembangan jaringan irigasi DI Banteng dan DI Tabo-Tabo;
10. Melakukan O & P, rehabilitasi, *upgrading* prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang. Melalui rehabilitasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas DI sebesar 100% selama 20 tahun mendatang;
11. Melakukan O & P, rehabilitasi, *upgrading* prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare;
12. Pembangunan *check-dam* dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo;
13. Normalisasi Sungai Saddang dan Sungai Mataallo;
14. Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama Pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Labattoa, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Palie, Pantai Batupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo yang dimulai dalam jangka pendek;
15. Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu, Sungai Koyan, Sungai Tangnya, Sungai Segeri, Sungai Marreppang, Sungai Kupa, Sungai Barantang, Sungai Nepo, Sungai Mangkoso, Sungai Manuba, Sungai Mattoanging, Sungai Lasijelling;
16. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
17. Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan kemampuan tenaga Sumber Daya Manusia.

Skenario ini dapat dilaksanakan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat (>6,5%) dan unit pengelola sumber daya air di

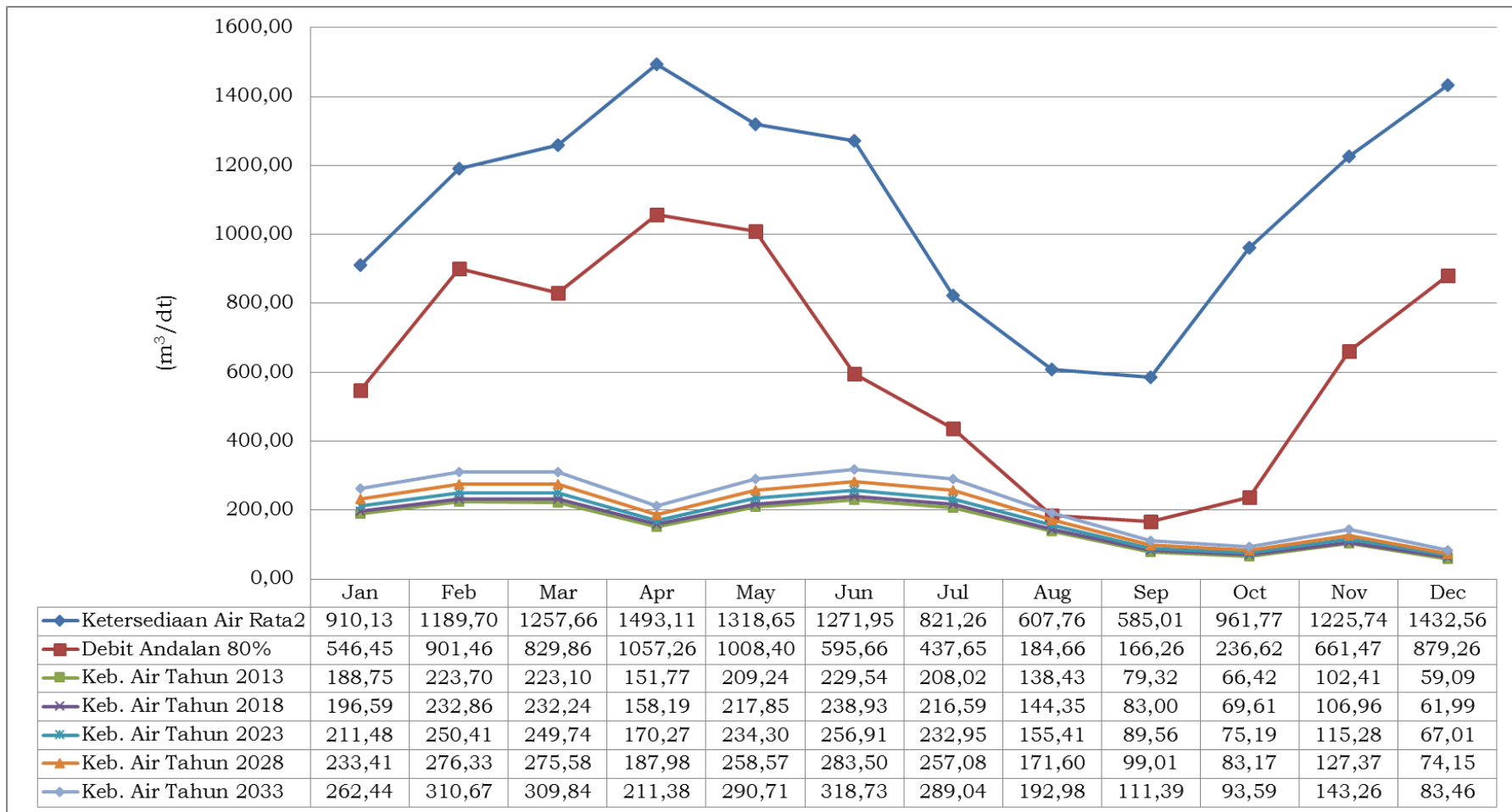
daerah yang kuat. Upaya pengelolaan sumber daya air yang dilakukan akan menerapkan perubahan dan inovasi baru, memungkinkan adanya pengembangan yang padat modal dan keuntungan sosial ekonomi tinggi. Skenario ini memungkinkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur baru dengan kapasitas yang cukup besar. Pengembangan akan menarik investasi, walaupun berisiko tinggi. Skenario ini dibuat untuk memenuhi target jangka panjang dari pemerintah.

Proyeksi neraca air WS Saddang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 untuk skenario ekonomi tinggi ditampilkan pada Tabel 3.10. Gambaran neraca air bulanan skenario ekonomi tinggi disajikan dalam Gambar 3.5. Usaha pemenuhan suplai air skenario ekonomi tinggi disajikan pada Gambar 3.6. Adapun skema sistem sungai di WS Saddang dalam rangka upaya pemenuhan ketersediaan air di WS Saddang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 disajikan dalam Gambar 3.7.

Tabel 3.10 Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Tinggi

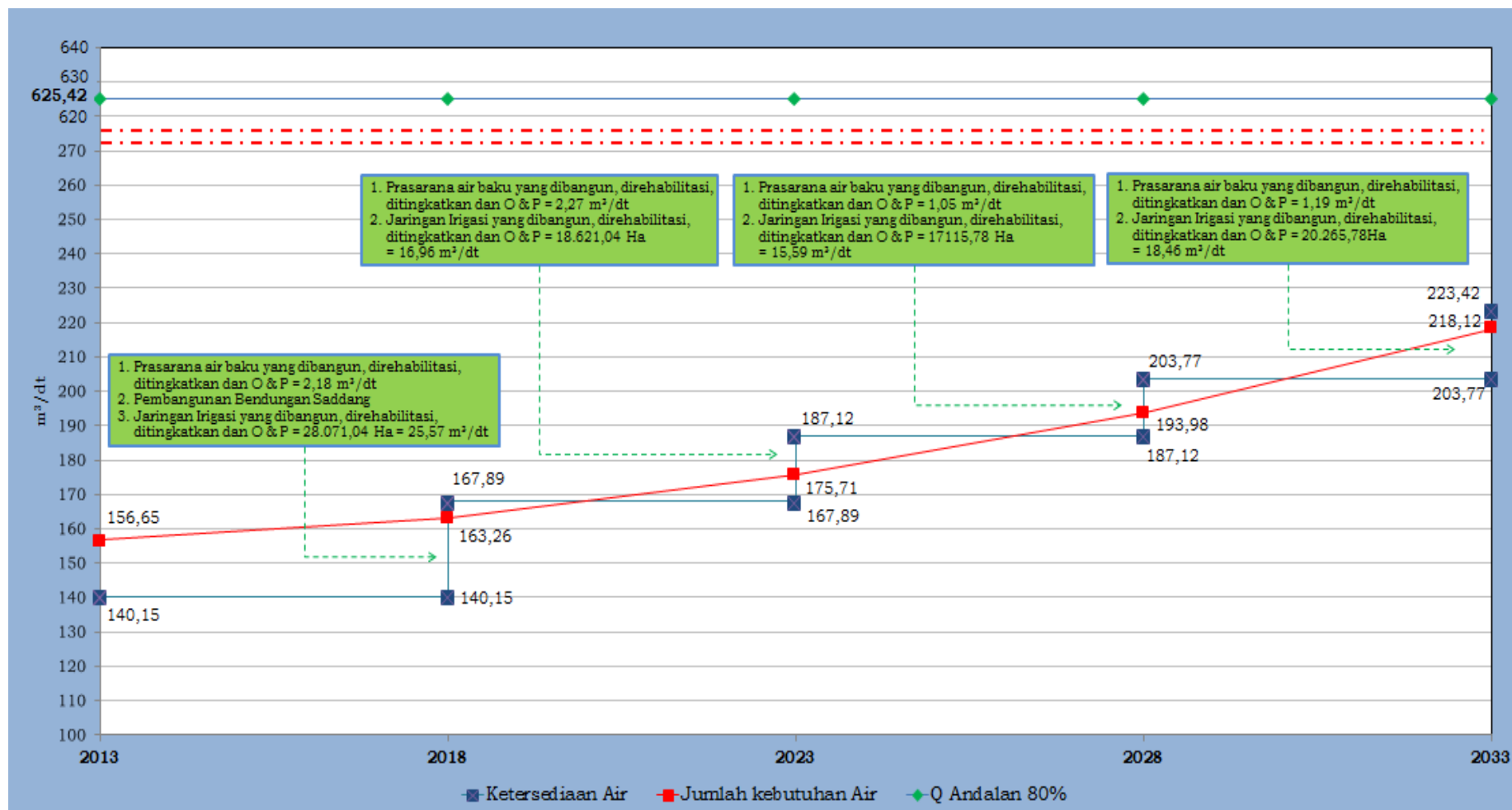
Keterangan	Tahun (m ³ /dt)				
	2013	2018	2023	2028	2033
Kebutuhan					
- Irigasi	150,91	156,65	168,13	185,35	208,30
- Rumah Tangga dan Perkotaan	4,88	5,58	6,41	7,31	8,37
- Industri	0,34	0,41	0,48	0,57	0,62
- Peternakan	0,51	0,62	0,68	0,75	0,83
Jumlah kebutuhan Air	156,65	163,26	175,71	193,98	218,12
Ketersediaan	140,15	167,89	187,12	203,77	223,42
Q Andalan 80%	625,42	625,42	625,42	625,42	625,42

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.5 Proyeksi Neraca Air WS Saddang Tahun 2013 - Tahun 2033 Skenario Ekonomi Tinggi



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.6 Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang Ekonomi Tinggi

3.3 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang

Strategi pengelolaan sumber daya air akan dikelompokkan berdasarkan lingkup konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, aspek sistem informasi sumber daya air, dan aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha.

3.3.1 Konservasi Sumber Daya Air

Strategi pola pengelolaan sumber daya air pada aspek konservasi sumber daya air di WS Saddang dirinci berdasarkan sub-sub aspek, yaitu perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air.

perlindungan dan pelestarian sumber air, meliputi :

1. pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang
 - a) melakukan sosialisasi dan konservasi secara vegetatif melalui reforestasi lahan kritis;
 - b) pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai;
 - c) kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya);
 - d) pengendalian praktek ilegal logging dan peladang berpindah;
 - e) perbaikan cara bertani lahan kering; dan
 - f) penetapan garis sempadan sungai.
2. pengawetan air, meliputi :
 - a) pembangunan waduk, embung, dan check dam; dan
 - b) penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air.
3. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
 - a) mensosialisasikan kebijakan pengendalian pencemaran;
 - b) menegakkan hukum; dan
 - c) pembangunan IPAL terpadu.

3.3.2 Strategi Pendayagunaan Sumber Daya Air

Strategi pendayagunaan sumber daya air di WS Saddang dirinci berdasarkan sub-sub aspek, yang meliputi :

1. penatagunaan sumber daya air, meliputi :

- a) sosialisasi daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai;
 - b) sosialisasi RTRW, terutama pada kawasan lindung; dan
 - c) penegakkan hukum terhadap pelanggaran tata ruang pada kawasan lindung.
2. pembangunan prasarana penyediaan air baku baru untuk kebutuhan RKI, irigasi, peternakan dan listrik
 3. penggunaan sumber daya air, meliputi :
 - a) melakukan pembangunan, OP, rehabilitasi, dan *upgrading* prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya;
 - b) melakukan pembangunan, OP, rehabilitasi, dan *upgrading* prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum;
 - c) sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air; dan
 - d) penyusunan alokasi air.
 4. pengembangan sumber daya air, yaitu dengan mengembangkan sumber-sumber air baku untuk kebutuhan air minum, irigasi, peternakan dan energi listrik
 5. pengusahaan sumber daya air
 - a) inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan;
 - b) sosialisasi Peraturan Daerah pembinaan-pengawasan mutu pelayanan BU/perseorangan pemegang ijin pengusahaan air; dan
 - c) fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha, pembinaan pengawasan mutu pelayanan Badan Usaha/perseorangan pemegang ijin pengusahaan air, kegiatan CSR, PKM, dan *community development*.

3.3.3 Strategi Pengendalian Daya Rusak Air

Strategi Pengendalian Daya Rusak Air di WS Saddang diarahkan untuk dapat mengupayakan sistem pencegahan bencana akibat daya rusak air dan meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan daya rusak air. Strategi pokok tersebut dikembangkan melalui sub-aspek yang meliputi :

1. pencegahan bencana alam
 - a) pembuatan peta bencana;
 - b) pembangunan checkdam dan prasarana pengendali sedimen;
 - c) pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai; dan
 - d) pembangunan sistem peringatan dini.

2. penanggulangan dampak bencana alam
 - a) penguatan manajemen organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi/kabupaten/ kota;
 - b) pembangunan tanggul, perkuatan tebing, abrasi pantai;
 - c) membangun waduk pengendali banjir, dan kolam retardasi;
 - d) pelaksanaan tindakan penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat daya rusak air;
 - e) penetapan prosedur operasi standart penanggulangan bencana alam; dan
 - f) penyampaian berita tentang kejadian bencana alam.
3. pemulihan daya rusak air
 - a) rehabilitasi prasarana dan infastruktur sumber daya air yang mengalami kerusakan;
 - b) pelaksanaan OP serta rehabilitasi infrastruktur yang terdampak bencana;
 - c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sistem peringatan dini yang telah disusun;
 - d) pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kecepatan daya pulih setelah terjadi bencana; dan
 - e) revitalisasi daerah retensi untuk mencegah bencana banjir dan longsor.

3.3.4 Strategi Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air

1. sub-aspek prasarana dan sarana, meliputi :
 - a) melakukan kalibrasi sarana dan prasarana pencatat data/informasi Sumber Daya Air;
 - b) menyediakan/merawat sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi dan penyebar-luasan data/informasi sumber daya air; dan
 - c) memasang instalasi telemetri, master station di pusat dan daerah.
2. sub aspek institusi pengelola, meliputi :
 - a) melaksanakan sosialisasi pengelolaan data/informasi sumber daya air; dan

- b) mengadakan/mengikutsertakan pengelola informasi sumber daya air dalam pelatihan (training) pengelolaan SISDA.
- 3. sub-aspek peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan SISDA, meliputi :
 - a) menginventarisasi dan memvalidasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang;
 - b) pembuatan dan peningkatan system database dan web data dan informasi sumber daya air WS Saddang;
 - c) pembuatan sistem informasi dan publikasi data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah diakses;
 - d) melakukan koordinasi dan kerjasama antar institusi/instansi dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air; dan
 - e) menyeragamkan penggunaan form, simbol dan kode dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air.

3.3.5 Strategi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

- 1. sub-aspek aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, meliputi :
 - a) pembentukan TKPSDA WS Saddang;
 - b) melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air; dan
 - c) melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.
- 2. sub-aspek aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, meliputi :
 - a) melaksanakan koordinasi dan sosialisasi (PKM); dan
 - b) pemberdayaan masyarakat.
- 3. sub aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air, meliputi: pemberdayaan masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS SADDANG

Kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air merupakan arahan pokok untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air yang telah ditentukan. Skenario penentuan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air dipengaruhi oleh kondisi skenario pertumbuhan ekonomi baik rendah, sedang, maupun tinggi, serta faktor kondisi politik dan perubahan iklim.

Skenario yang masih akan dikaji pada penyusunan pola pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) perubahan iklim masih dikaji diseluruh dunia antara lain akibat kenaikan muka air laut dan perubahan pola hujan di suatu wilayah sungai dan masih perlu di evaluasi pada 5 tahun yang akan datang; dan
- 2) perubahan kondisi politik: pengaruhnya tidak dapat diprediksikan, meskipun dukungan politik (misalnya dukungan dari Pemerintah Daerah) sangat diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, terutama aspek organisasi.

Kebijakan Operasional dalam pengelolaan sumber daya air menurut skenario dan strategi jangka pendek, menengah dan panjang ditampilkan dalam bentuk matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air WS Saddang skenario ekonomi rendah ditampilkan dalam Tabel 4.1, matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air WS Saddang skenario ekonomi sedang ditampilkan dalam Tabel 4.2 dan matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air WS Saddang skenario ekonomi tinggi ditampilkan dalam Tabel 4.3. Masing-masing matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air memuat:

- 1) strategi untuk masing-masing skenario;
- 2) kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi;
- 3) stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan masing-masing strategi; dan
- 4) instansi yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, dari hasil matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam peta tematik setiap aspek pengelolaan untuk masing-masing skenario. Peta tematik pengelolaan sumber daya air WS Saddang skenario ekonomi rendah dapat dilihat pada Gambar 4.1 sampai

dengan Gambar 4.5. Peta tematik pengelolaan sumber daya air WS Saddang skenario sedang dapat dilihat pada Gambar 4.6 sampai dengan Gambar 4.10. Peta tematik pengelolaan sumber daya air WS Saddang skenario ekonomi tinggi dapat dilihat pada Gambar 4.11 sampai dengan Gambar 4.15.

Tabel 4.1 Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang Skenario Ekonomi Rendah

I. ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Perlindungan dan pelestarian sumber air	- Erosi lahan dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi (Sub DAS Masupu, Saddang Hulu, Saddang Mamasa, Bakar, Mataallo dan Baraka) - Adanya <i>Illegal logging</i> (Hulu Mamasa)	- Terciptanya kawasan lindung dan budidaya dalam rangka keberlanjutan sumber air - Terkendalikannya erosi lahan dan pengurangan debit puncak - Terkendalinya fungsi hutan sebagai kawasan konservasi - Terkendalinya kegiatan ilegal logging - Perladangan berpindah	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tataruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan sangat kritis & kritis 3.514 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan ladang berpindah - Perbaikan cara	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan agak kritis 2.197 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo, - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan peladang berpindah	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan berpotensi kritis 806 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo, - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan peladang berpindah	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Melakukan sosialisasi dan konservasi secara vegetatif melalui reforestasi lahan kritis seluas 6.517 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Pengendalian praktek ilegal logging dan peladang berpindah - Perbaikan cara bertani lahan	Kementerian Kehutanan–Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				bertani lahan kering	- Perbaikan cara bertani lahan kering	- Perbaikan cara bertani lahan kering	kering	
2	Pengawetan air	- Kekeringan pada musim kemarau	- Tersedianya sumber air yang berkelanjutan	- Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendungan Saddang, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekkko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung	- Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendungan Saddang, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekkko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung	- Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendungan Saddang, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekkko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung	- Pembangunan waduk, embung, dan <i>check dam</i> . - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Kementerian Kehutanan-Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air		
3	Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air	Pencemaran pestisida di kawasan pertanian (Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap), limbah rumah tangga, dan industri (Kota Pare-Pare)	Mencegah pencemaran air sumber air dan lingkungan yang melewati ambang batas.	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran - Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran - Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran - Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran	- Mensosialisasikan kebijakan pengendalian pencemaran - Menegakkan hukum	Kementerian Kehutanan- Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum-Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

II. ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Penatagunaan sumber daya air	- Belum sesuai pemanfaatan lahan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan tata ruang wilayah	- Penetapan dan dipatuhinya zona kawasan lindung, budidaya, sempadan sungai, waduk, mata air.	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 25% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 50% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Kegiatan sosialisasi dan penegakkan hukum	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 100% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Kegiatan sosialisasi dan penegakkan hukum	- Sosialisasi daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Sosialisasi RTRW - Penegakkan hukum	Kementerian Kehutanan– Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Saddang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
2	Penyediaan sumber daya air	- Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk RKI, irigasi, peternakan, dan listrik	- Tersedianya sumber air dan prasarana penyediaan air baku baru	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan Bakaru,	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan	- Pembangunan prasarana penyediaan air baku baru untuk kebutuhan DMI, irigas, peternakan, dan listrik	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, - Pembangunan jaringan irigasi/ JIAT di seluruh DAS di WS Saddang terutama di DI Matajang, DI	Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, - Pembangunan jaringan irigasi/ JIAT di seluruh DAS di WS Saddang terutama di DI Matajang, DI Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten	Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, - Pembangunan jaringan irigasi/ JIAT di seluruh DAS di WS Saddang		Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, PT PLN

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (20%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun Bendungan Bakar, Bendungan Bonto Batu, Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo	Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (40%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun Bendungan Bakar, Bendungan Bonto Batu, Bendungan Butt Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo	terutama di DI Matajang, DI Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (60%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun Bendungan Bakar, Bendungan Poko, Bendungan Bonto Batu, Bendungan Butt Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
3	Penggunaan sumber daya air	- Belum optimalnya pemanfaatan air guna mendukung ketahanan pangan dan pencapaian target MDGs - Belum terkontrolnya penggunaan air	- Meningkatkan produksi pangan dan menambah penyediaan pangan - Penggunaan sumber daya air dapat teralokasi dengan baik	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (10%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (20%) - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (20%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (40%) - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air - Pembuatan alokasi	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (50%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (70%) - Sosialisasi	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air - Penyusunan alokasi air	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, PT. PLN

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				- Pembuatan alokasi air pada 20% DAS di WS Saddang	air pada 40% DAS di WS Saddang	penatagunaan sumber daya air dan hak guna air - Pembuatan alokasi air pada 70% DAS di WS Saddang		
4	Pengembangan sumber daya air	Belum memadainya suplai air baku untuk RKI, energi listrik dan pangan serta perikanan	- Tersedianya PLTA dan swasembada pangan	- Pemanfaatan Waduk Kuri-Kuri dan PLTA Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan sebagai penyimpan air baku - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare-Pare	- Pemanfaatan Waduk Kuri-Kuri dan PLTA Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan sebagai penyimpan air baku - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare-Pare	- Pemanfaatan Waduk Buttu Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan irigasi seluas 60.000 ha. - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare-Pare	- Mengembangkan distribusi air minum dan energi listrik	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, PT PLNS
5	Pengusahaan sumber daya air	- Penerima manfaat belum menanggung sepenuhnya jasa penyediaan air	- Penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain :	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain :	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain : - Sosialisasi	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
			kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat	volume, sumber air, pembuangan limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	volume, sumber air, pembuangan limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	volume, sumber air, pembuangan limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Penyusunan Peraturan Daerah penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	Peraturan Daerah pembinaan-pengawasan mutu pelayanan BU/ perseorangan pemegang ijin pengusahaan air, Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha, pembinaan pengawasan mutu pelayanan Badan Usaha/ perseorangan pemegang ijin pengusahaan air, kegiatan CSR, PKM, dan <i>community development</i>	Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai

III. ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Pencegahan	- Belum adanya penetapan zona rawan bencana/peta bencana - Pendangkalan sungai oleh sedimen menyebabkan banjir (Kabupaten Enrekang, Pinrang, Barru) - Abrasi pantai di pesisir pantai barat (Pare-pare s/d Barru, dan Pangkep) - Belum adanya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana	- Terhindarnya masyarakat dari bencana - Tersedianya <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen - Tersedianya bangunan pencegah abrasi pantai - Tersedianya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana	- Pembuatan peta bencana pada daerah rawan bencana sebanyak 20% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	- Sosialisasi/desiminasi 10% peta bencana dan pembuatan peta rawan bencana hingga 40% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep,	- Sosialisasi/desiminasi 10% peta bencana dan pembuatan peta rawan bencana hingga 60% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai	- Pembuatan peta bencana - Pembangunan <i>checkdam</i> dan prasarana pengendali sedimen - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai - Pembangunan sistem peringatan dini.	Kementerian Kehutanan–Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Barru, Kementerian Pekerjaan Umum–Balai Besar Wilayah Sungai

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
					Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun		Pompengan-Jeneberang
2	Penanggula- ngan	-Belum dipahaminya manajemen banjir/bencana oleh masyarakat -Belum adanya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana -Terjadinya pendangkalan pada Sungai Saddang hilir dan Mataallo	- Daerah rawan banjir/bencana siap menghadapi banjir/bencana - Tersedianya prasarana peringatan dini - Berkurangnya resiko dan kerugian akibat banjir. - Meminimalisir dampak banjir atau bencana - Tersedianya	- Penyusunan Rencana Tanggap Darurat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana pada 20% dari Seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	- Penyusunan Rencana Tanggap Darurat dalam mengantisi-pasi kemungkinan terjadinya bencana pada 40% dari seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun - Normalisasi sungai	- Penyusunan Rencana Tanggap Darurat dalam mengantisi-pasi kemungkinan terjadinya bencana pada 60% dari seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada	- Penyusunan kebijakan penanggulangan darurat bencana pada daerah rawan bencana - Penyiapan bahan banjir - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan sistem peringatan dini - Normalisasi sungai	Kementerian Kehutanan–Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		- Terjadinya abrasi pantai di pesisir Selat Makassar - Terjadi banjir setiap tahun di Sungai Saddang Hilir dan Sungai Mataallo	daerah retensi banjir	- Normalisasi sungai (20%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu (25%)	(40%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Polewija. - Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai	- PLTA yang telah dibangun - Normalisasi sungai (60%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Polewija. - Pembangunan prasarana pengendali banjir	- Pembangunan prasarana pelindung pantai - Penanaman vegetasi mangrove di sepanjang garis pantai - Pembangunan prasarana pengendali banjir	Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Barru, Kementerian Pekerjaan Umum-Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
					Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu (40%)	diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu (60%)		
3	Pemulihan	- Banyaknya infrastruktur yang rusak pasca bencana - Masyarakat belum ikut berperan aktif dalam pemulihan pasca bencana - Belum termanfaatkan wadah-wadah air	- Terehabilitasi prasarana yang mengalami kerusakan - Ikutsertanya masyarakat dalam pemulihan pasca bencana - Tersedianya daerah retensi	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pasca bencana - Survey wadah-	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pasca bencana - Revitalisasi wadah-wadah air sebagai	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan	- Rehabilitasi prasarana yang mengalami kerusakan - Pelaksanaan OP serta rehabilitasi - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi - Pemberdayaan masyarakat - Revitalisasi daerah retensi	Kementerian Kehutanan–Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				wadah retensi	daerah retensi	pasca bencana - Revitalisasi wadah-wadah air sebagai daerah retensi		Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Barro, Kementerian Pekerjaan Umum – Balai Besat Wilayah Sungai Pompengan- Jeneberang

IV. ASPEK SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Prasarana dan sarana SISDA	Masih kurangnya sarana dan prasarana pencatat, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi	Tersedianya sarana dan prasarana SISDA yang memadai secara kuantitas dan kualitas.	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA - Penyediaan/perawatan sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi sumber daya air	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA - Penyediaan/perawatan sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi dan penyebarluasan data/informasi sumber daya air - Pemasangan instalasi telemetri, <i>master station</i> di pusat dan daerah	- Melakukan kalibrasi sarana dan prasarana pencatat data/informasi Sumber Daya Air - Menyediakan/m erawat sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi dan penyebarluasan data/ informasi sumber daya air - Memasang instalasi telemetri, <i>master station</i> di pusat dan daerah	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten-Kota, Kementerian Pekerjaan Umum-Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Badan Meteorologi dan Geofisika, Universitas,
2	Institusi pengelola	Masih kurangnya sumber daya manusia profesional dan terlatih untuk	Tersedianya petugas yang profesional dan terlatih untuk mengelola SISDA	- Sosialisasi pembentukan unit pelaksana teknis pengelola data/informasi sumber daya air	- Sosialisasi penguatan unit pelaksana teknis pengelola data/informasi sumber daya air	- Sosialisasi penguatan unit pelaksana teknis pengelola data/informasi sumber daya air	- Melaksanakan sosialisasi pengelolaan data/informasi sumber daya air - Mengadakan/me ngikutsertakan	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat,

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		mengelola SISDA					pengelola informasi sumber daya air dalam pelatihan (<i>training</i>) pengelolaan SISDA	Pemerintahan Kabupaten-Kota, Kementerian Pekerjaan Umum BBWS-PJ, BMKG
3	Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan SISDA	- Data dan informasi sumber daya air belum cukup tersedia dan sulit diakses - Data dan informasi sumber daya air ditangani oleh beberapa instansi yang berbeda	- Tersedianya data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah diakses - Terciptanya kesesuaian dan keterpaduan antar institusi pengelola dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi pengelola data/informasi sumber daya air - Penyeragaman penggunaan form, simbol dan kode dalam	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi pengelola data/informasi	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi pengelola data/informasi	- Menginventarisasi dan memvalidasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan dan peningkatan system database dan web data dan informasi sumber daya air WS Saddang - Pembuatan sistem informasi dan publikasi data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah diakses - Melakukan	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten-Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Badan Meteorologi dan Geofisika, Universitas,

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				pengelolaan data/informasi sumber daya air	pengelolaan data/informasi sumber daya air	sumber daya air	koordinasi dan kerjasama antar institusi/ instansi dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air - Menyeragamkan penggunaan form, simbol dan kode dalam pengelolaan data/informasi SDA	

V. ASPEK PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan	Masih kurangnya peran masyarakat pengguna air dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air	Masyarakat pengguna air terlibat dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti koordinasi lintas sektor, Musrembangda, Musrembangnas dan Konsultasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pembentukan TKPSDA WS Saddang - Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air. - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten-Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat
2	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan	Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan sumber daya	Masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi (PKM) - Pemberdayaan masyarakat	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten-Kota,

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		air		masyarakat, lembaga dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.	masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.		Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat
3	Peningkatan peran masyarakat serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan	Masih kurangnya pengertian masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air	Masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten-Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat

Tabel 4.2 Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang (Skenario Ekonomi Sedang)

I. ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Perlindungan dan pelestarian sumber air	- Erosi lahan dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi (Sub DAS Masupu, Saddang Hulu, Saddang Mamasa, Bakaru, Mataallo dan Baraka) - Adanya <i>Illegal logging</i> (Hulu Mamasa)	- Terciptanya kawasan lindung dan budidaya dalam rangka keberlanjutan sumber air - Terkendalikannya erosi lahan dan pengurangan debit puncak - Terkendalinya fungsi hutan sebagai kawasan konservasi - Terkendalinya kegiatan ilegal logging - Perlindungan berpindah	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tataruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan sangat kritis & kritis 661 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo, Sungai Lampoko - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan ladang berpindah	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan agak kritis 1.669 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo, Sungai Lampoko - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan peladang	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan berpotensi kritis 4.999 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo, Sungai Lampoko - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya)	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Melakukan sosialisasi dan konservasi secara vegetatif melalui reforestasi lahan kritis seluas 8000 km² (Kabupaten Mamasa, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, dan Kabupateb Barru). - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya)	Kementerian Kehutanan – Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten / Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				- Perbaikan cara bertani lahan kering	berpindah - Perbaikan cara bertani lahan kering	budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan peladang berpindah - Perbaikan cara bertani lahan kering	- Pengendalian praktek ilegal logging dan peladang berpindah - Perbaikan cara bertani lahan kering	
2	Pengawetan air	- Kekeringan pada musim kemarau	- Tersedianya sumber air yang berkelanjutan	- Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan <i>check dam</i> diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendungan Saddang, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan,	- Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan <i>check dam</i> diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendungan Saddang, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Malino,	- Pembangunan bendungan, bendung, waduk, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendungan Saddang, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan,	- Pembangunan waduk, embung, dan <i>check dam</i> . - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Kementerian Kehutanan– Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, Embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung konservasi Lampoko, Check dam Sungai Lancirang, Sungai Lampoko - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, Embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung konservasi Lampoko, Check dam Sungai Lampoko - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, Embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung konservasi Lampoko, Check dam Sungai Lancirang, Sungai Lampoko - Penegakkan hukum dalam		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
						penggunaan sumber daya air		
3	Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air	Pencemaran pestisida di kawasan pertanian (Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap), limbah rumah tangga, dan industri (Kota Pare-Pare)	Mencegah pencemaran air sumber air dan lingkungan yang melewati ambang batas.	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran - Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran - Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran - Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran - Pengelolaan limbah	- Mensosialisasikan kebijakan pengendalian pencemaran - Menegakkan hukum - Pembangunan IPAL terpadu (Pare-Pare)	Kementerian Kehutanan-Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

II. ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Penatagunaan sumber daya air	- Belum sesuai pemanfaatan lahan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan tata ruang wilayah	- Penetapan dan dipatuhinya zona kawasan lindung, budidaya, sempadan sungai, waduk, mata air.	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 25% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 50% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Kegiatan sosialisasi dan penegakkan hukum	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 100% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Kegiatan sosialisasi dan penegakkan hukum	- Sosialisasi daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Sosialisasi RTRW - Penegakkan hukum	Kementerian Kehutanan – Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Saddang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/ Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
2	Penyediaan sumber daya air	- Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk RKI, irigasi, peternakan dan listrik	- Tersedianya sumber air dan prasarana penyediaan air baku baru	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Buttu	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan	- Pembangunan prasarana penyediaan air baku baru untuk kebutuhan DMI, irigasi, peternakan, dan listrik	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/ Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, PT

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung Konservasi	Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung Konservasi - Pembangunan jaringan irigasi /	Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, embung Konservasi Bulu Dua, Embung		PLN

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Lampoko - Pembangunan jaringan irigasi / JIAT di seluruh DAS di WS Saddang terutama di DI Matajang, DI Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (20%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Bonto Batu, Bendungan Buttu Batu (Bendungan	JIAT di seluruh DAS di WS Saddang terutama di DI Matajang, DI Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (40%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Bonto Batu, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo	Ulusalu, Embung Konservasi Lampoko - Pembangunan jaringan irigasi / JIAT di seluruh DAS di WS Saddang terutama di DI Matajang, DI Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (600%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun Bendungan Bakaru, Bendungan Poko,		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo		Bendungan Bonto Batu, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo		
3	Penggunaan sumber daya air	- Belum optimalnya pemanfaatan air guna mendukung ketahanan pangan dan pencapaian target MDGs - Belum terkontrolnya penggunaan air	- Meningkatkan produksi pangan dan menambah penyediaan pangan - Penggunaan sumber daya air dapat teralokasi dengan baik	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (10%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap,	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (20%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (70%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air - Penyusunan alokasi air	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/ Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, PT. PLN

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (20%) - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air - Pembuatan alokasi air pada 20% DAS di WS Saddang	Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (40%) - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air - Pembuatan alokasi air pada 40% DAS di WS Saddang	Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (70%) - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air - Pembuatan alokasi air pada 70% DAS di WS Saddang		
4	Pengembangan sumber daya air	Belum memadainya suplai air baku untuk RKI, energi listrik dan pangan serta perikanan	- Tersedianya PLTA dan swasembada pangan	- Pemanfaatan Waduk Kuri-Kuri dan PLTA Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan sebagai penyimpan air baku - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang,	- Pemanfaatan Waduk Kuri-Kuri dan PLTA Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan sebagai penyimpan air baku - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare-Pare	- Pemanfaatan Waduk Buttu Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan irigasi seluas 60.000 ha. - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota	- Mengembangkan distribusi air minum dan energi listrik	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/ Balai Besar Wilayah Sungai Pompegan Jeneberang, PT PLNS

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare- Pare		Pare-Pare		
5	Pengusahaan sumber daya air	- Penerima manfaat belum menanggung sepenuhnya jasa penyediaan air	- Penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain : volume, sumber air, pembuangan limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain : volume, sumber air, pembuangan limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain : volume, sumber air, pembuangan limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Penyusunan Peraturan Daerah penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan - Sosialisasi Peraturan Daerah pembinaan-pengawasan mutu pelayanan BU/ perseorangan pemegang ijin pengusahaan air, - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha, pembinaan pengawasan mutu pelayanan Badan Usaha/ perseorangan pemegang ijin pengusahaan air, kegiatan CSR, PKM, dan <i>community development</i>	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/ Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai

III. ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Pencegahan	- Belum adanya penetapan zona rawan bencana/peta bencana - Pendangkalan sungai oleh sedimen menyebabkan banjir (Kabupaten Enrekang, Pinrang, Barru) - Abrasi pantai di pesisir pantai barat (Pare-pare s/d Barru, dan Pangkep) - Belum adanya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana	- Terhindarnya masyarakat dari bencana - Tersedianya <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen - Tersedianya bangunan pencegah abrasi pantai - Tersedianya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana	- Pembuatan peta bencana pada daerah rawan bencana sebanyak 20% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai (20%) di seluruh DAS di WS Saddang terutama Pantai	- Sosialisasi/desimasi 10% peta bencana dan pembuatan peta rawan bencana hingga 40% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai (40%) di seluruh DAS di WS Saddang terutama Pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai	- Sosialisasi/desimasi 10% peta bencana dan pembuatan peta rawan bencana hingga 60% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai (60%) di seluruh DAS di WS Saddang	- Pembuatan peta bencana - Pembangunan <i>checkdam</i> dan prasarana pengendali sedimen - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai - Pembangunan sistem peringatan dini.	Kementerian Kehutanan-Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Barru, Kementerian Pekerjaan Umum – Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang, - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang, - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	terutama Pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Polewija, - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun		
2	Penanggulang an	- Belum dipahaminya manajemen banjir/ bencana oleh masyarakat - Belum adanya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana - Terjadinya pendangkalan pada Sungai Saddang hilir	- Daerah rawan banjir/bencana siap menghadapi banjir/bencana - Tersedianya prasarana peringatan dini - Berkurangnya resiko dan kerugian akibat banjir. - Meminimalisir dampak banjir atau bencana - Tersedianya	- Penyusunan Rencana Tanggap Darurat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana pada 20% dari Seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	- Penyusunan Rencana Tanggap Darurat dalam mengantisi-pasi kemungkinan terjadinya bencana pada 40% dari seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun - Normalisasi sungai	- Penyusunan Rencana Tanggap Darurat dalam mengantisi-pasi kemungkinan terjadinya bencana pada 60% dari seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	- Penyusunan kebijakan penanggulangan darurat bencana pada daerah rawan bencana - Penyiapan bahan banjir - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan sistem peringatan dini - Normalisasi	Kementerian Kehutanan–Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		dan Mataallo - Terjadinya abrasi pantai di pesisir Selat Makassar - Terjadi banjir setiap tahun di Sungai Saddang Hilir dan Sungai Mataallo	daerah retensi banjir	- Normalisasi sungai (20%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang,. - Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan	(40%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang - Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai	- Normalisasi sungai (60%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Wiringtasi, Pantai Cilellang, - Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan	sungai - Pembangunan prasarana pelindung pantai - Penanaman vegetasi mangrove di sepanjang garis pantai - Pembangunan prasarana pengendali banjir	Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Barru, Kementerian Pekerjaan Umum – Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu (25%)	Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu (40%)	tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu (60%)		
3	Pemulihan	- Banyaknya infrastruktur yang rusak pasca bencana - Masyarakat belum ikut berperan aktif dalam pemulihan pasca bencana - Belum termanfaatkan wadah-wadah air	- Terehabilitasi prasarana yang mengalami kerusakan - Ikutsertanya masyarakat dalam pemulihan pasca bencana - Tersedianya daerah retensi	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pasca bencana - Survey wadah-wadah retensi	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pasca bencana - Revitalisasi wadah-wadah air sebagai daerah retensi	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pasca bencana - Revitalisasi wadah-wadah air sebagai daerah	- Rehabilitasi prasarana yang mengalami kerusakan - Pelaksanaan OP serta rehabilitasi - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi - Pemberdayaan masyarakat - Revitalisasi daerah retensi	Kementerian Kehutanan– Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
						retensi		Enrekang, Pemerintah Kabupaten Barru, Kementerian Pekerjaan Umum -Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan- Jeneberang

IV. ASPEK SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Prasarana dan sarana SISDA	Masih kurangnya sarana dan prasarana pencatat, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi	Tersedianya sarana dan prasarana SISDA yang memadai secara kuantitas dan kualitas.	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA - Penyediaan/ perawatan sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi sumber daya air	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA - Penyediaan/ perawatan sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi dan penyebarluasan data/informasi sumber daya air - Pemasangan instalasi telemetri, <i>master station</i> di pusat dan daerah	- Melakukan kalibrasi sarana dan prasarana pencatat data/informasi Sumber Daya Air - Menyediakan/ merawat sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi dan penyebarluasan data/ informasi sumber daya air - Memasang instalasi telemetri, <i>master station</i> di pusat dan daerah	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum -Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Badan Meteorologi dan Geofisika, Universitas,
2	Institusi pengelola	Masih kurangnya sumber daya manusia profesional dan terlatih untuk	Tersedianya petugas yang profesional dan terlatih untuk mengelola SISDA	- Sosialisasi pembentukan unit pelaksana teknis pengelola data/informasi sumber daya air	- Sosialisasi penguatan unit pelaksana teknis pengelola data/informasi sumber daya air	- Sosialisasi penguatan unit pelaksana teknis pengelola data/informasi sumber daya air	- Melaksanakan sosialisasi pengelolaan data/informasi sumber daya air - Mengadakan/me ngikutsertakan	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		mengelola SISDA					pengelola informasi sumber daya air dalam pelatihan (<i>training</i>) pengelolaan SISDA	Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum BBWS -PJ, BMKG
3	Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan SISDA	- Data dan informasi sumber daya air belum cukup tersedia dan sulit diakses - Data dan informasi sumber daya air ditangani oleh beberapa instansi yang berbeda	- Tersedianya data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah diakses - Terciptanya kesesuaian dan keterpaduan antar institusi pengelola dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi pengelola data/informasi sumber daya air - Penyeragaman penggunaan form, simbol dan kode dalam pengelolaan	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi pengelola data/informasi sumber daya air - Penyeragaman penggunaan form, simbol dan kode dalam pengelolaan data/informasi	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi pengelola data/informasi sumber daya air	- Menginventarisasi dan memvalidasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan dan peningkatan system database dan web data dan informasi sumber daya air WS Saddang - Pembuatan sistem informasi dan publikasi data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah diakses - Melakukan koordinasi dan	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum -Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Badan Meteorologi dan Geofisika, Universitas,

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				data/informasi sumber daya air	sumber daya air		kerjasama antar institusi/ instansi dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air - Menyeragamkan penggunaan form, simbol dan kode dalam pengelolaan data/informasi SDA	

V. ASPEK PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan	Masih kurangnya peran masyarakat pengguna air dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air	Masyarakat pengguna air terlibat dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti koordinasi lintas sektor, Musrembangda, Musrembangnas dan Konsultasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pembentukan TKPSDA WS Saddang - Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air. - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat
2	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan	Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan sumber daya	Masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi (PKM) - Pemberdayaan masyarakat	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		air		masyarakat, lembaga dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.	masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.		- Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat
3	Peningkatan peran masyarakat serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan	Masih kurangnya pengertian masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air	Masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat

Tabel 4.3 Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Saddang (Skenario Ekonomi Tinggi)

I. ASPEK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Perlindungan dan pelestarian sumber air	- Erosi lahan dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi (Sub DAS Masupu, Saddang Hulu, Saddang Mamasa, Bakaru, Mataallo dan Baraka) - Adanya <i>Illegal logging</i> (Hulu Mamasa)	- Terciptanya kawasan lindung dan budidaya dalam rangka keberlanjutan sumber air - Terkendalikannya erosi lahan dan pengurangan debit puncak - Terkendalinya fungsi hutan sebagai kawasan konservasi - Terkendalinya kegiatan ilegal logging - Perlindungan berpindah	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tataruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan sangat kritis & kritis 661 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Boya, Sungai Tabo-Tabo, Sungai Lampoko - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan agak kritis 1.669 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Boya, Sungai Tabo-Tabo, Sungai Lampoko - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Konservasi vegetatif, reforestasi lahan berpotensi kritis 4.999 km² - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Boya, Sungai Tabo-Tabo, Sungai Lampoko - Kegiatan konservasi secara vegetatif dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Terkendalinya praktek ilegal logging dan	- Pengawasan tata guna lahan sesuai tata ruang - Melakukan sosialisasi dan konservasi secara vegetatif melalui reforestasi lahan kritis seluas 3500 km² (Kabupaten Mamasa, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Barru). - Pembangunan bangunan pengendali sedimen dibagian hulu dan tengah sungai - Kegiatan konservasi secara vegetatif	Kementerian Kehutanan– Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				logging dan peladang berpindah - Perbaikan cara bertani lahan kering	peladang berpindah - Perbaikan cara bertani lahan kering	peladang berpindah - Perbaikan cara bertani lahan kering	dengan struktural dan non struktural (pendekatan budidaya) - Pengendalian praktek ilegal logging dan peladang berpindah - Perbaikan cara bertani lahan kering	
2	Pengawetan air	- Kekeringan pada musim kemarau	- Tersedianya sumber air yang berkelanjutan	- Pembangunan bendungan, bendung, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu,	- Pembangunan bendungan, bendung, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Kolai, Embung Malino,	- Pembangunan bendungan, bendung, embung, dan check dam diseluruh WS Saddang terutama Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Waduk Padangeng, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu,	- Pembangunan waduk, embung, dan <i>check dam</i> . - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Kementerian Kehutanan– Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, Embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung konservasi Lampoko, Check dam Sungai Lancirang, Sungai Lampoko - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, Embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung konservasi Lampoko, Check dam Sungai Lancirang, Sungai Lampoko - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air	Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung Padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, Embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung konservasi Lampoko, Check dam Sungai Lancirang, Sungai Lampoko - Penegakkan hukum dalam penggunaan sumber daya air		
3	Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran	Pencemaran pestisida di kawasan pertanian	Mencegah pencemaran air smber air dan lingkungan	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran	- Sosialisasi kebijakan pengendalian pencemaran	- Mensosialisasikan kebijakan pengendalian pencemaran	Kementerian Kehutanan– Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
	air	(Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap), limbah rumah tangga, dan industri (Kota Pare-Pare)	yang melewati ambang batas.	- Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran	- Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran	- Pemantauan kualitas air pada lokasi potensi pencemaran - Pengelolaan limbah	- Menegakkan hukum - Pembangunan IPAL terpadu (Pare-Pare)	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

II. ASPEK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Penatagunaan sumber daya air	- Belum sesuai pemanfaatan lahan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan tata ruang wilayah	- Penetapan dan dipatuhinya zona kawasan lindung, budidaya, sempadan sungai, waduk, mata air.	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 25% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 50% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Kegiatan sosialisasi dan penegakkan hukum	- Penetapan zona dan peruntukan penggunaan sumber daya air - Penetapan kawasan sabuk hijau di 100% kawasan sungai dan waduk - Penetapan daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Kegiatan sosialisasi dan penegakkan hukum	- Sosialisasi daerah sempadan sungai, waduk, mata air dan pantai - Sosialisasi RTRW - Penegakkan hukum	Kementerian Kehutanan– Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Saddang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
2	Penyediaan sumber daya air	- Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk RKI, irigasi, peternakan dan listrik	- Tersedianya sumber air dan prasarana penyediaan air baku baru	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan Bakaru,	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko,	- Pembangunan prasarana air baku untuk air minum berupa bendungan/bendung/embung/waduk di seluruh DAS di WS Saddang terutama Bendungan Bakaru,	- Pembangunan prasarana penyediaan air baku baru untuk kebutuhan RKI, irigasi, peternakan dan listrik	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung Konservasi Lampoko	Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung Konservasi Lampoko - Pembangunan	Bendungan Poko, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Saddang), Bendungan Malea, Bendung Bojo, Embung Garongan, Embung Biak, Embung Taulan, Embung Tobalu, Embung Kolai, Embung Malino, Embung Galung Rekko, Embung Cakke, Embung Lewaja, Embung padukku, Embung Salu, Embung Pudete, Embung Kebun Raya, Embung Luppereng Cebae, Embung Bulu Sipitto, Embung Konservasi Waesae, Embung Ammerung, embung Konservasi Bulu Dua, Embung Ulusalu, Embung Konservasi Lampoko		Jeneberang, PT PLN

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				- Pembangunan jaringan irigasi / JIAT di seluruh DAS di WS Saddang terutama di DI Matajang, DI Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (25%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun beberapa bendungan terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Bonto Batu, Bendungan Buttu Batu (Bendungan	jaringan irigasi / JIAT di seluruh DAS di WS Saddang terutama di DI Matajang, DI Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (50%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun beberapa bendungan terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Bonto Batu, Bendungan Buttu Batu (Bendungan Malea	- Pembangunan jaringan irigasi / JIAT di seluruh DAS di WS Saddang terutama di DI Matajang, DI Talung, DI Sawitto dan Rapping, JIAT Kabupaten Sidenreng Rappang, JIAT Kabupaten Pinrang, JIAT Kabupaten Barru, JIAT Kabupaten Pangkajene Kepulauan (100%) - Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan membangun beberapa bendungan terutama Bendungan Bakaru, Bendungan Poko, Bendungan Bonto Batu, Bendungan Buttu Batu		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Saddang), Bendungan Malea,		(Bendungan Saddang), Bendungan Malea		
3	Penggunaan sumber daya air	- Belum optimalnya pemanfaatan air guna mendukung ketahanan pangan dan pencapaian target MDGs - Belum terkontrolnya penggunaan air	- Meningkatkan produksi pangan dan menambah penyediaan pangan - Penggunaan sumber daya air dapat teralokasi dengan baik	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (25%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (20%) - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (50%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (70%) - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya yaitu DI Matajang, DI Talung, DI Saddang, DI Kalola Kalosi, DI Tabo-Tabo, DI Rajang (100%) - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum untuk suplai kebutuhan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare (100%) - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air	- Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya - Melakukan O & P, rehabilitasi, <i>upgrading</i> prasarana air baku untuk air minum dan jaringan distribusi air minum - Sosialisasi penatagunaan sumber daya air dan hak guna air - Penyusunan alokasi air	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, PT. PLN

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				dan hak guna air - Pembuatan alokasi air pada 25% DAS di WS Saddang	dan hak guna air - Pembuatan alokasi air pada 50% DAS di WS Saddang	dan hak guna air - Pembuatan alokasi air pada 100% DAS di WS Saddang		
4	Pengembangan sumber daya air	Belum memadainya suplai air baku untuk RKI, energi listrik dan pangan serta perikanan	- Tersedianya PLTA dan swasembada pangan	- Pemanfaatan Waduk Kuri-Kuri dan PLTA Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan sebagai penyimpan air baku - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare-Pare	- Pemanfaatan Waduk Kuri-Kuri dan PLTA Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan sebagai penyimpan air baku - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare-Pare	- Pemanfaatan Waduk Kuri-Kuri dan PLTA Batu untuk listrik sebesar 90 MW dan irigasi seluas 60.000 Ha - Mengoptimalkan dan mengembangkan suplai dan distribusi air minum untuk Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare-Pare	- Mengembangkan distribusi air minum dan energi listrik	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kementerian Pekerjaan Umum/ Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, PT PLNS
5	Pengusahaan sumber daya air	- Penerima manfaat belum menanggung sepenuhnya jasa penyediaan air	- Penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air kecuali untuk	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain : volume, sumber air, pembuangan	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain : volume, sumber air, pembuangan	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan antara lain : volume, sumber air, pembuangan	- Inventarisasi penggunaan air oleh kalangan industri dan perdagangan - Sosialisasi Peraturan Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Kementerian

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
			kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat	limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	limbah dan besar iuran jasa yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah - Penyusunan Peraturan Daerah penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha	pembinaan-pengawasan mutu pelayanan BU/ perseorangan pemegang ijin perusahaan air, - Fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap badan usaha, pembinaan pengawasan mutu pelayanan Badan Usaha/ perseorangan pemegang ijin perusahaan air, kegiatan CSR, PKM, dan <i>community development</i>	Pekerjaan Umum/ Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai

III. ASPEK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Pencegahan	- Belum adanya penetapan zona rawan bencana/peta bencana - Pendangkalan sungai oleh sedimen menyebabkan banjir (Kabupaten Enrekang, Pinrang, Barru) - Abrasi pantai di pesisir pantai barat (Pare-pare s/d Barru, dan Pangkep) - Belum adanya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana	- Terhindarnya masyarakat dari bencana - Tersedianya <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen - Tersedianya bangunan pencegah abrasi pantai - Tersedianya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana	- Pembuatan peta bencana pada daerah rawan bencana sebanyak 25% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai (25%) di seluruh DAS di WS Saddang terutama Pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai	- Sosialisasi/desimi nasi 10% peta bencana dan pembuatan peta rawan bencana hingga 50% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai (50%) di seluruh DAS di WS Saddang terutama Pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai	- Sosialisasi/desimi nasi 10% peta bencana dan pembuatan peta rawan bencana hingga 100% dari seluruh DAS di WS Saddang - Pembangunan <i>check dam</i> dan prasarana pengendali sedimen untuk perlindungan kawasan permukiman, sawah, dan kebun di seluruh DAS di WS Saddang terutama di Sungai Lancirang, Sungai Lampoko, Sungai Tabo-Tabo - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai (100%) di seluruh DAS di WS Saddang terutama Pantai Pallameang,	- Pembuatan peta bencana - Pembangunan <i>checkdam</i> dan prasarana pengendali sedimen - Pembangunan bangunan pencegah abrasi pantai - Pembangunan sistem peringatan dini.	Kementerian Kehutanan-Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Barru, Kementerian Pekerjaan Umum-Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Polewija, Pantai Ance, Pantai Labattoa, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Palie, Pantai Lancana, Pantai Batupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo, Pantai Lenga, Pantai Kae, Pantai Datae. -Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Polewija, Pantai Ance, Pantai Labattoa, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Palie, Pantai Lancana, Pantai Batupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo, Pantai Lenga, Pantai Kae, Pantai Datae. -Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun	Pantai Bojo, Pantai Lero, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Polewija, Pantai Ance, Pantai Labattoa, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Palie, Pantai Lancana, Pantai Batupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo, Pantai Lenga, Pantai Kae, Pantai Datae. -Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun		
2	Penanggulangan	- Belum dipahaminya	- Daerah rawan banjir/bencana	- Penyusunan Rencana Tanggap	- Penyusunan Rencana Tanggap	- Penyusunan Rencana Tanggap	- Penyusunan kebijakan	Kementerian Kehutanan-Balai

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		manajemen banjir/ bencana oleh masyarakat - Belum adanya sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana - Terjadinya pendangkalan pada Sungai Saddang hilir dan Mataallo - Terjadinya abrasi pantai di pesisir Selat Makassar - Terjadi banjir setiap tahun di Sungai Saddang Hilir dan Sungai Mataallo	siap menghadapi banjir/ bencana - Tersedianya prasarana peringatan dini - Berkurangnya resiko dan kerugian akibat banjir. - Meminimalisir dampak banjir atau bencana - Tersedianya daerah retensi banjir	Darurat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana pada 25% dari Seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun - Normalisasi sungai (25%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero,	Darurat dalam mengantisi-pasi kemungkinan terjadinya bencana pada 50% dari seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun - Normalisasi sungai (50%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulangan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe,	Darurat dalam mengantisi-pasi kemungkinan terjadinya bencana pada 100% dari seluruh DAS rawan bencana - Pembangunan sistem peringatan dini terhadap bencana pada PLTA yang telah dibangun - Normalisasi sungai (100%) - Koordinasi penang gulangan dengan pihak terkait - Penyiapan bahan banjiran - Penanggula-ngan darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan prasarana pelindung pantai diseluruh DAS di WS Saddang terutama pantai Pallameang, Pantai Bojo, Pantai Lero,	penanggulang an darurat bencana pada daerah rawan bencana - Penyiapan bahan banjiran - Penanggulang an darurat banjir dan kekeringan - Pembangunan sistem peringatan dini - Normalisasi sungai - Pembangunan prasarana pelindung pantai - Penanaman vegetasi mangrove di sepanjang garis pantai - Pembangunan prasarana pengendali banjir	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Barru, Kementerian Pekerjaan Umum-Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Labattoa, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Palie, Pantai Batupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo. -Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene,	Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Labattoa, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Palie, Pantai Batupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo. -Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene, Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu,	Pantai Suppa, Pantai Pangkep, Pantai Watuwoe, Pantai Barru, Pantai Lapakaka, Pantai Waringtasi, Pantai Cilellang, Pantai Labattoa, Pantai Garongkong, Pantai Siddo, Pantai Palie, Pantai Batupute, Pantai Lojie, Pantai Palanro, Pantai Kupa, Pantai Binanga-Coppo. -Pembangunan prasarana pengendali banjir diseluruh DAS di WS Saddang terutama pembuatan tanggul dan perkuatan tebing di Sungai Saddang, Sungai Bottoe, Sungai Kiru-Kiru, Sungai Saddang Hulu, Sungai Pangkajene,		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu, Sungai Koyan, Sungai Tangnya, Sungai Segeri, Sungai Marrep-pang, Sungai Kupa, Sungai Barantang, Sungai Nepo, Sungai Mangkoso, Sungai Manuba, Sungai Mattoanging, Sungai Lasijelling (25%)	Sungai Koyan, Sungai Tangnya, Sungai Segeri, Sungai Marreppang, Sungai Kupa, Sungai Barantang, Sungai Nepo, Sungai Mangkoso, Sungai Manuba, Sungai Mattoanging, Sungai Lasijelling (50%)	Sungai Ala Karajae, Sungai Saddang Hilir, Sungai Balusu, Sungai Koyan, Sungai Tangnya, Sungai Segeri, Sungai Marrep-pang, Sungai Kupa, Sungai Barantang, Sungai Nepo, Sungai Mangkoso, Sungai Manuba, Sungai Mattoanging, Sungai Lasijelling (100%)		
3	Pemulihan	- Banyaknya infrastruktur yang rusak pasca bencana - Masyarakat belum ikut berperan aktif dalam pemulihan pasca bencana - Belum memanfaatkan wadah-wadah air	- Terehabilitasi prasarana yang mengalami kerusakan - Ikutsertanya masyarakat dalam pemulihan pasca bencana - Tersedianya daerah retensi	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pasca bencana	- Rehabilitasi bangunan pengendali banjir. - Rehabilitasi prasarana yang rusak akibat banjir. - Penganggaran alokasi pemulihan pada kawasan rawan bencana - Pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan	- Rehabilitasi prasarana yang mengalami kerusakan - Pelaksanaan OP serta rehabilitasi - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi - Pemberdayaan masyarakat - Revitalisasi daerah retensi	Kementerian Kehutanan-Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota Pare-Pare, Pemerintah Kabupaten Mamas, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Enrekang,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				pasca bencana - Survey wadah- wadah retensi	- Revitalisasi wadah- wadah air sebagai daerah retensi	pasca bencana - Revitalisasi wadah-wadah air sebagai daerah retensi		Pemerintah Kabu- paten Barru, Ke- menterian Peker- jaan Umum –Balai Besar Wilayah Su- ngai Pompengan- Jeneberang

IV. ASPEK SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Prasarana dan sarana SISDA	Masih kurangnya sarana dan prasarana pencatat, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi	Tersedianya sarana dan prasarana SISDA yang memadai secara kuantitas dan kualitas.	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA - Penyediaan/perawatan sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi sumber daya air	- Kalibrasi sarana dan prasarana SISDA - Penyediaan/perawatan sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi, pengelola data/informasi dan penyebarluasan data/informasi sumber daya air - Pemasangan instalasi telemetri, <i>master station</i> di pusat dan daerah	- Melakukan kalibrasi sarana dan prasarana pencatat data/informasi Sumber Daya Air - Menyediakan/merawat sarana dan prasarana pencatat data, penyimpan data/informasi dan penyebarluasan data/informasi sumber daya air - Memasang instalasi telemetri, <i>master station</i> di pusat dan daerah	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Badan Meteorologi dan Geofisika, Universitas,
2	Institusi pengelola	Masih kurangnya sumber daya	Tersedianya petugas yang profesional dan	- Sosialisasi pembentukan unit pelaksana	- Sosialisasi penguatan unit pelaksana teknis	- Sosialisasi penguatan unit pelaksana teknis	- Melaksanakan sosialisasi pengelolaan	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan,

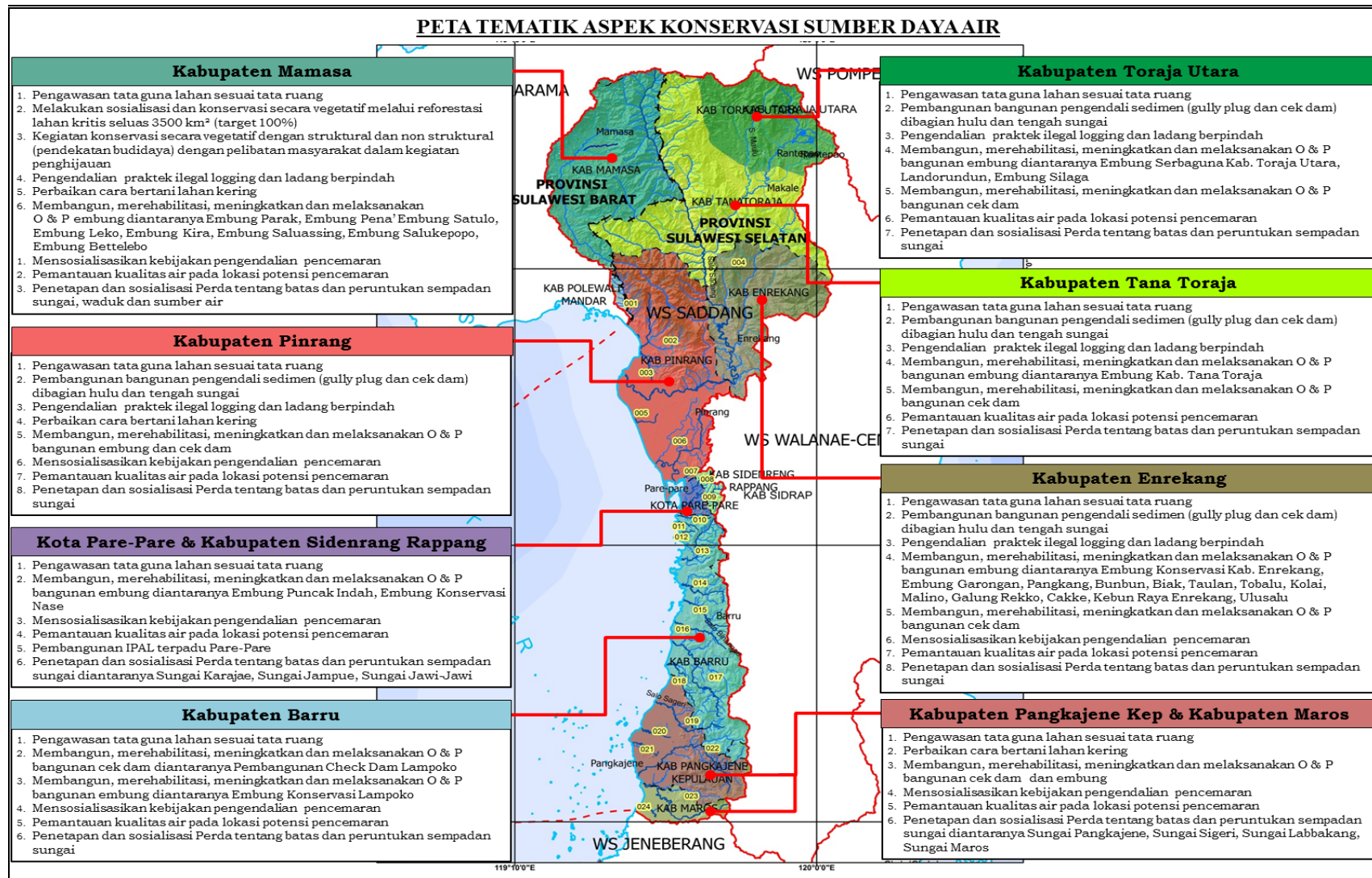
No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		manusia profesional dan terlatih untuk mengelola SISDA	terlatih untuk mengelola SISDA	teknis pengelola data/informasi sumber daya air	pengelola data/informasi sumber daya air	pengelola data/informasi sumber daya air	data/informasi sumber daya air - Mengadakan/mengikutsertakan pengelola informasi sumber daya air dalam pelatihan (<i>training</i>) pengelolaan SISDA	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum BBWS -PJ, BMKG
3	Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan SISDA	- Data dan informasi sumber daya air belum cukup tersedia dan sulit diakses - Data dan informasi sumber daya air ditangani oleh beberapa instansi yang berbeda	- Tersedianya data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah diakses - Terciptanya kesesuaian dan keterpaduan antar institusi pengelola dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi	- Inventarisasi dan validasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan sistem basis data sumber daya air WS Saddang - Peningkatan sistem database dan update web SISDA, sesuai perkembangan - Publikasi data dan informasi sumber daya air - Koordinasi antar institusi/instansi	- Menginventarisasi dan memvalidasi data dan informasi sumber daya air di WS Saddang - Pembuatan dan peningkatan system database dan web data dan informasi sumber daya air WS Saddang - Pembuatan	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompean Jeneberang, Badan Meteorologi dan Geofisika, Universitas,

No	SUB ASPEK	HASIL ANALISIS	SASARAN	STRATEGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				pengelola data/informasi sumber daya air - Penyeragaman penggunaan form, simbol dan kode dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air	pengelola data/informasi sumber daya air - Penyeragaman penggunaan form, simbol dan kode dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air	pengelola data/informasi sumber daya air	sistem informasi dan publikasi data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah diakses - Melakukan koordinasi dan kerjasama antar institusi/ instansi dalam pengelolaan data/informasi sumber daya air - Menyeragamkan penggunaan form, simbol dan kode dalam pengelolaan data/informasi SDA	

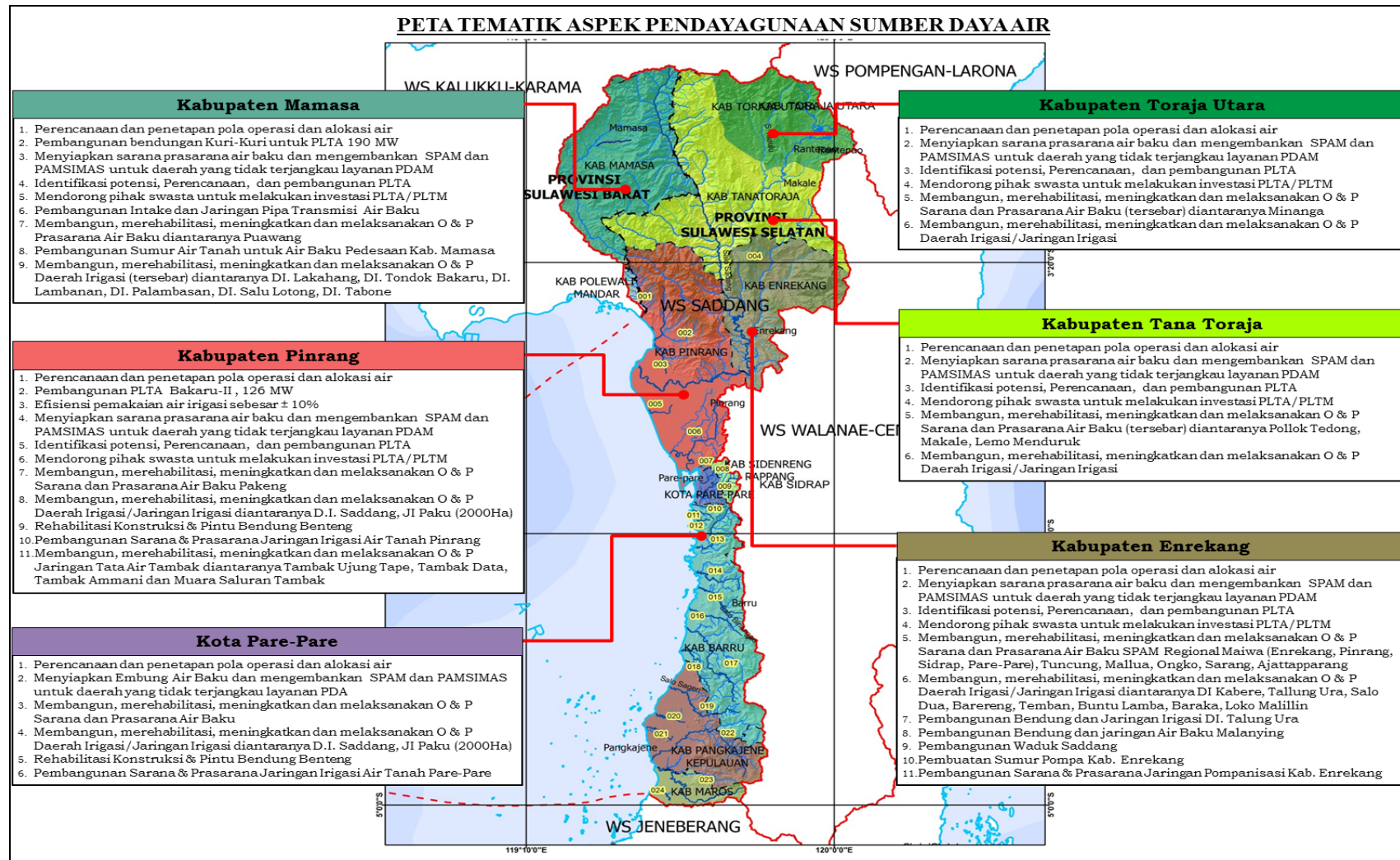
V. ASPEK PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
1	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan	Masih kurangnya peran masyarakat pengguna air dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air	Masyarakat pengguna air terlibat dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti koordinasi lintas sektor, Musrembangda, Musrembangnas dan Konsultasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pembentukan TKPSDA WS Saddang - Melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam tahap perencanaan pengelolaan sumber daya air. - Melaksanakan dan mengikuti Musrembangda, Musrembangnas dan Koordinasi Regional dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat
2	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan	Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam tahapan pelaksanaan	Masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dalam tahap pra konstruksi pelaksanaan infrastruktur	- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi (PKM) - Pemberdayaan masyarakat	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan

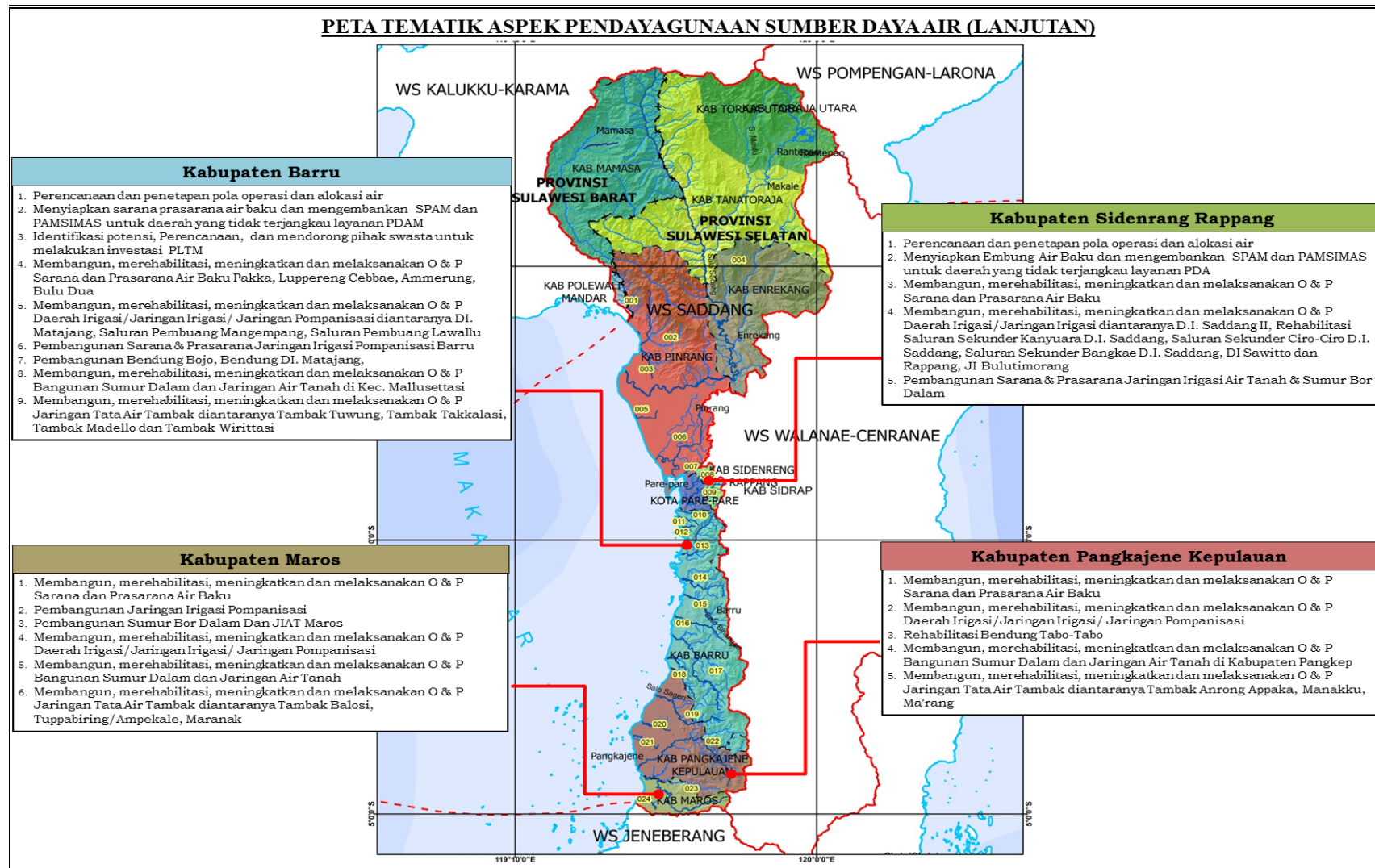
No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga / Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		pengelolaan sumber daya air		pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan masyarakat, lembaga dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.	pengelolaan sumber daya air - Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.		Kabupaten-Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat
3	Peningkatan peran masyarakat serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan	Masih kurangnya pengertian masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air	Masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan (GNKPA) - Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.	- Pemberdayaan masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintahan Kabupaten - Kota, Kementerian Pekerjaan Umum - Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat



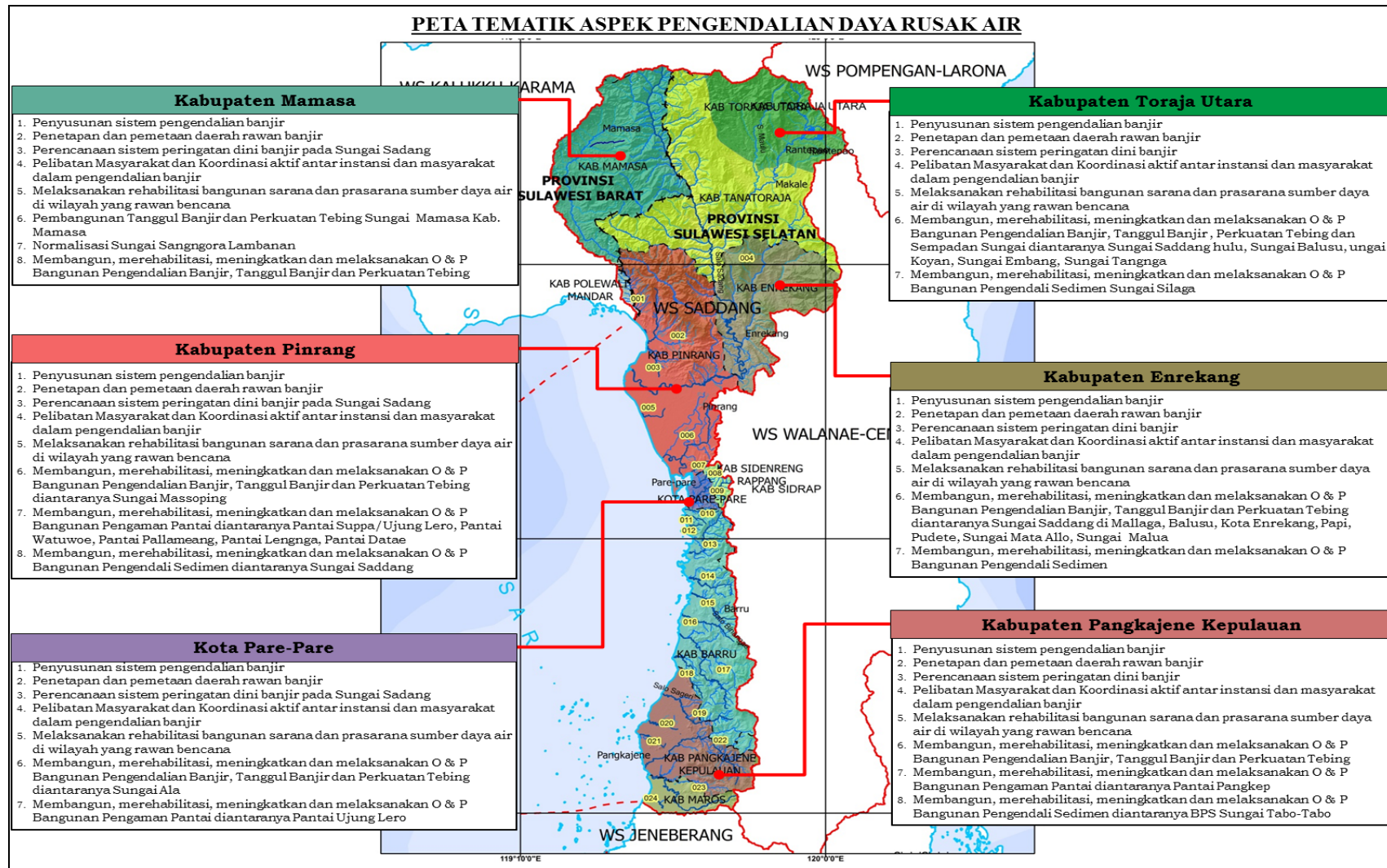
Gambar 4.1 Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi



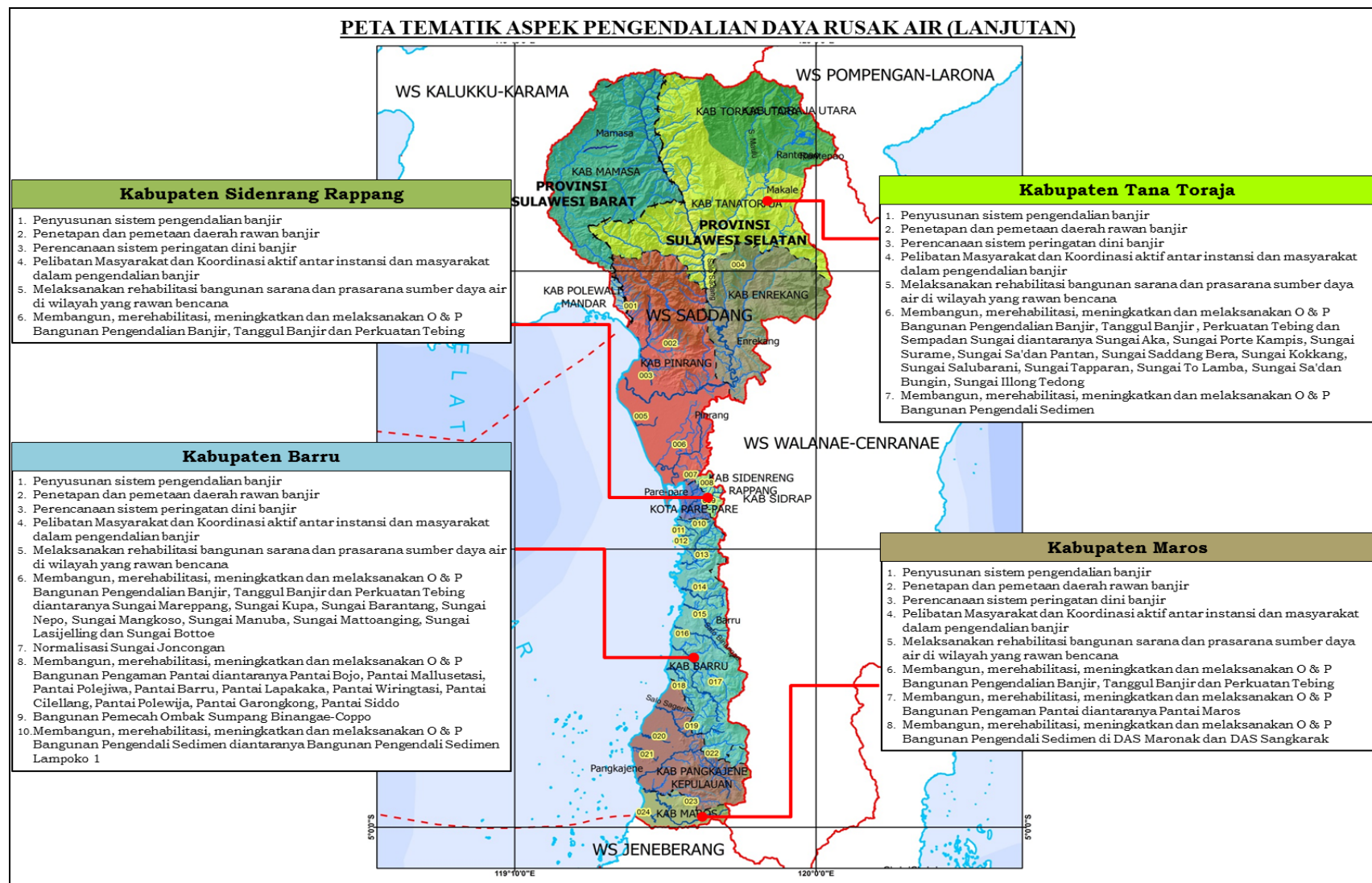
Gambar 4.2 Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi



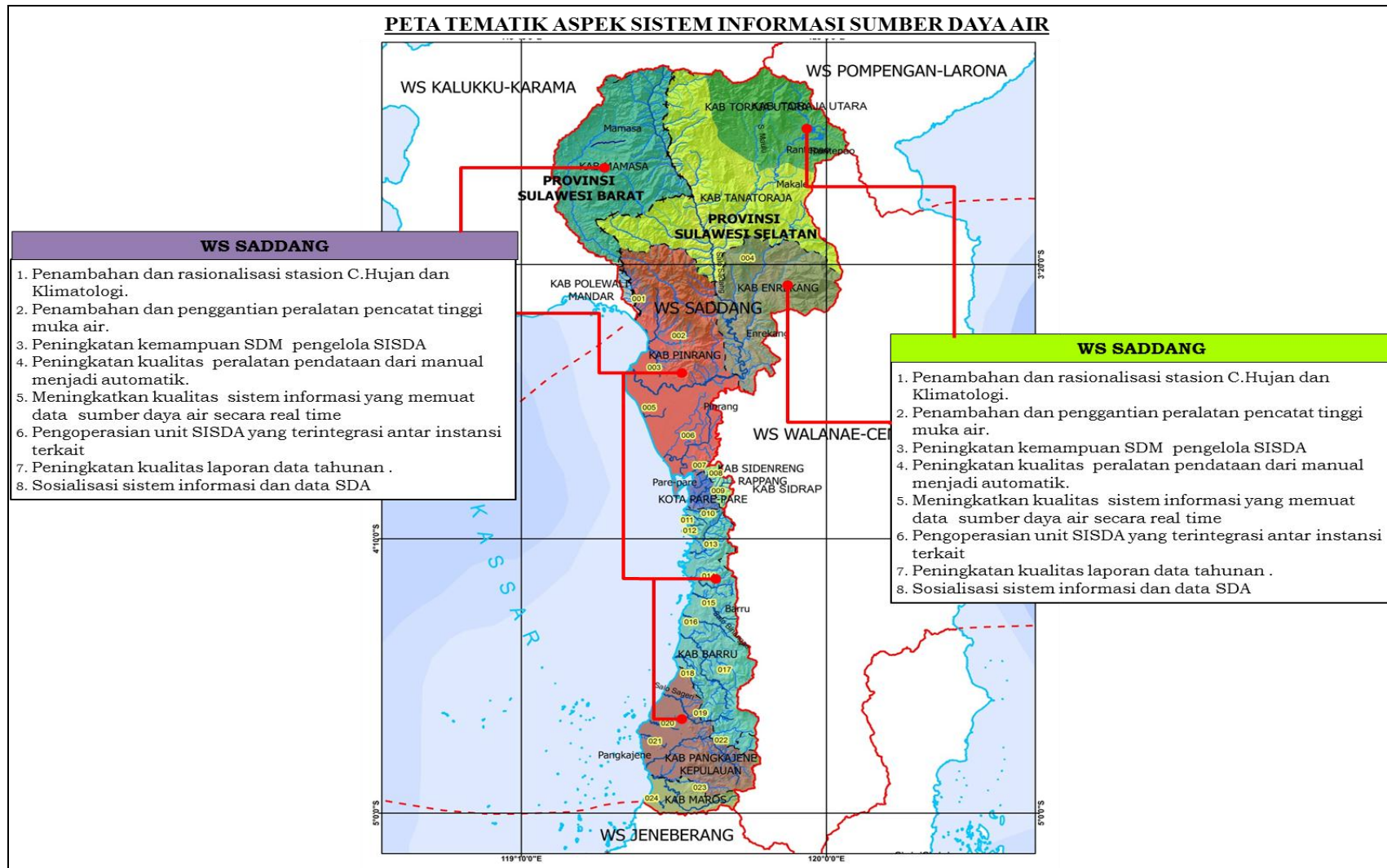
Gambar 4.3 Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan)



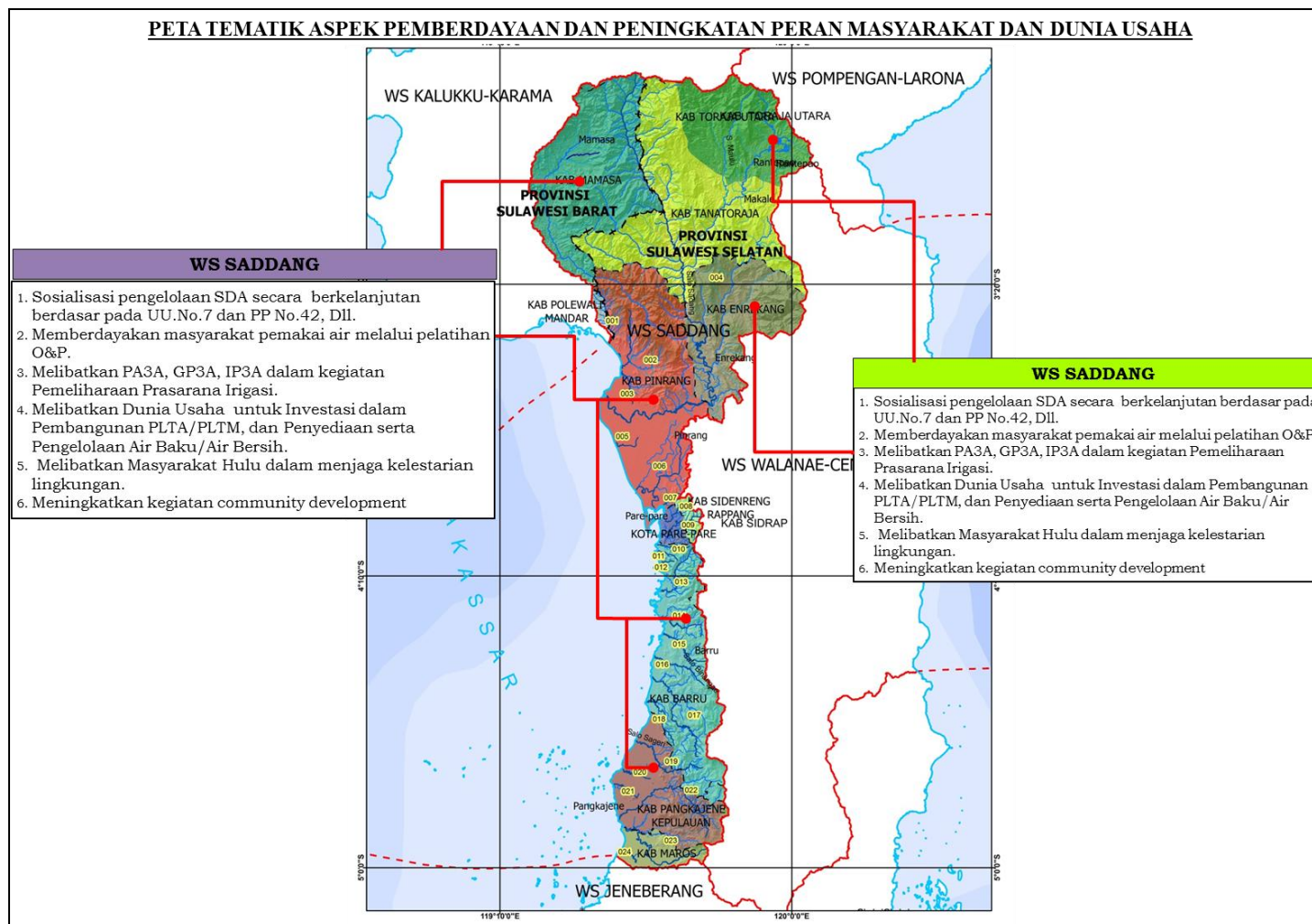
Gambar 4.4 Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi



Gambar 4.5 Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan)



Gambar 4.6 Peta Tematik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi



Gambar 4.7 Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Tinggi

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

(Signature)

M. BASUKI HADIMULJONO

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)

WILAYAH SUNGAI SADDANG

Jl. BATARA BIRA, No. 8 Km. 16 Baddoke, Makassar – Sulawesi Selatan, 90222

KEPUTUSAN HASIL SIDANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) WILAYAH SUNGAI SADDANG

DALAM SIDANG PEMBAHASAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH SUNGAI SADDANG

Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Saddang dalam Sidang Pembahasan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang, yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 20 Mei 2014 bertempat di Quality Plaza Hotel - Makassar yang dihadiri oleh anggota TKPSDA Wilayah Sungai Saddang, undangan serta narasumber seperti daftar terlampir.

Sidang pembahasan dimulai dengan mengundang pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk memaparkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Saddang yang telah disusun oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Setelah mendapatkan paparan rancangan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Saddang yang disampaikan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, sidang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui Dokumen Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Saddang yang telah dibahas dalam sidang pleno untuk disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan beberapa rekomendasi tambahan.
2. Rekomendasi tambahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan perizinan lingkungan wilayah sungai untuk mengantisipasi lebih awal sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi wilayah sungai agar memperhatikan bangunan-bangunan teknis untuk dikembangkan yang bisa bernilai ekonomis.
 - c. Disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Prov.Sul-Bar, Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk memberikan usulan kepada Direktorat Sumber Daya Air Cq. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan dalam Pembiayaan O&P untuk peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.
 - d. Identifikasi sungai-sungai yang berpotensi besar terjadi sedimentasi dalam rangka menetapkan prioritas penanganan.
 - e. Penataan kawasan pemukiman di sepanjang bantaran sungai dan tempat pemukiman lainnya yang rawan erosi.
 - f. Normalisasi sungai pada 5 titik (Tapparan, Maulu, Lapandan, Kamali, Bera) Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan Sungai Nosu Kab. Mamasa, Sulawesi Barat.
 - g. Perlu dilakukan pengujian sampling kualitas air secara periodik pada Wilayah Sungai Saddang.
 - h. Penerapan sistem tanam padi hemat air serta sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan aturan serta pelibatan masyarakat dalam kampanye hemat air.
 - i. Untuk konservasi wilayah hulu, tengah dan hilir, diharapkan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan memelihara dengan tanggung jawab yang melekat.
3. Untuk melaksanakan pembangunan sumber daya air di Wilayah Sungai Saddang, seperti yang berkembang dalam diskusi maka yang dipilih adalah skenario ekonomi tinggi

Makassar, 20 Mei 2014

Ketua Sidang



Ir. Akbar, M.Si